



Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK PERSANDIAN

2024

Ikhtisar Eksekutif

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi mengimplementasikan paradigma **Pemerintahan Berorientasi Hasil**. Melalui Laporan ini publik, instansi dan di internal organisasi dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Terdapat 6 (enam) sasaran strategis Dinas KominfoSP Tahun 2024, dengan capaian Sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (92,50)	Menuju Informatif (93,37)	100,94
Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Pubik			
Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terstandarisasi Kolaborasi	Terstandarisasi Kolaborasi	111,1
Indikator : Persentase Fungsi-fungsi Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi			
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	82	82,16	100,20
Indikator : Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data Dan Dapat Diakses Secara Online			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	A (89,50)	A (89,66)	104,17
Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah			
Indikator : Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan Dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%	100
Indikator : Indeks Pengguna Layanan Perangkat Daerah	Sangat Baik (98,85)	Sangat Baik (99,21)	Sangat Baik 100,36
			102,13%

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar **Rp 3.623.527.796,-** dan terealisasi **Rp 3.469.356.887,-** atau persentase realisasi **95,67%**. Capaian kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2024, secara keseluruhan dapat dinyatakan **“berhasil”**. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas KominfoSP sebesar **102,13%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **95,67%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas KominfoSP berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **13,6%**.

Kata Pengantar



Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Tahun 2024.

Laporan ini pula sebagai bentuk komitmen Dinas KominfoSP mengimplementasikan paradigma **Pemerintahan Berorientasi Hasil**.

Dalam penyusunannya, diungkapkan aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan. Dalam pengukurannya, diungkapkan perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Perubahan 2019-2024, analisis efisiensi, keberhasilan atau kegagalan dilengkapi faktor penunjang, kendala serta solusi yang diupayakan serta aspek akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas KominfoSP dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Semoga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, seluruh jajaran aparatur Dinas KominfoSP semakin memantapkan komitmen dan perannya untuk berkolaborasi meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Kepala Dinas Kominfo SP



Dr. Aco Musaddad HM, M.Ag., M.Si

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 8

A. Umum 8

B. Tugas dan Fungsi Organisasi 10

C. Isu Strategis Organisasi 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

A. Rencana Strategis 13

B. Perjanjian Kinerja 2024 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

A. Capaian Kinerja Tahun 2024 18

B. Akuntabilitas Keuangan 57

BAB IV PENUTUP 59

LAMPIRAN

Daftar Gambar, Chart dan Tabel

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 10

Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo SP, Tahun 2019-2024 13

Gambar 3.1 Pembinaan Admin Perangkat Daerah Terkait Penyajian Informasi Publik dalam Rangka Penguatan Layanan Informasi Publik 30

Gambar 3.2 Workshop Tim Tanggap Insiden Cyber (CSIRT) Dalam Mengoptimalkan SPBE 2024... 44

Gambar 3.3 Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kab. Polewali Mandar 2024 48

Gambar 3.4 Rapat Evaluasi Kinerja Pemangsu SAKIP Dinas Kominfo SP Terkait Pencapaian Target Kinerja 2024 51

Gambar 3.5 Penguatan Rapat Koordinasi Triwulan Internal Dinas Kominfo SP Oleh Pengelola Aset dan Keuangan Terkait Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan 2024 53

Tabel. 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024 13

Tabel 2.2 Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2024 16

Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024	28
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024	31
Tabel 3.3	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis SPBE Kab. Polewali Mandar Tahun 2024	33
Tabel 3.4	Pemetaan Fungsi-Fungsi Utama Pemerintahan yang Telah Didukung Teknologi Sistem Informasi	35
Tabel 3.5	Penataan Bandwith Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024	39
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024	45
Tabel 3.7	Pemenuhan Data Sektoral Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	46
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024	49
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024	54
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024	54
Tabel 3.11	Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas KominfoSP Tahun 2024	54
Tabel 3.12	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas KominfoSP Tahun 2024	58
Chart 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Target dengan Realisasi 2022, 2024-2023 dan Target Renstra (akhir)	28
Chart 3.2	Perbandingan Indeks SPBE Pemerintah Kab. Polewali Mandar Tahun 2023-2024 ...	32
Chart 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis SPBE Kab. Polewali Mandar Tahun 2024	35
Chart 3.4	Peningkatan Kapasitas Bandwitch Tahun 2022-2024	41
Chart 3.5	Pertumbuhan Menara Telekomunikasi Tahun 2022 s.d. 2024	42
Chart 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Data Statistik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Target dengan Realisasi 2024, 2022-2023 dan Target Renstra (akhir)	45
Chart 3.7	Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2022-2023	50
Chart 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas KominfoSP Tahun 2024, Serta Perbandingan Target Dengan Realisasi 2024,2022-2023 Dan Target Renstra (akhir).....	52
Chart 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Dinas KominfoSP Tahun 2024 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2024, 2022-2023 dan Target Renstra (akhir)	55
Chart 3.10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas KominfoSP Tahun 2024	57

01 PENDAHULUAN

Latar
Belakang

Maksud dan
Tujuan

Dasar Hukum

Tugas dan
Fungsi Organisasi

Isu Strategis
Organisasi

A. Umum

1. Latar belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengacu pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Melalui SAKIP ini, disusun perencanaan kinerja yang focus pada permasalahan utama pemerintahan atau organisasi serta berorientasi pada perbaikan pencapaian sasaran kinerja yang terukur. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya diukur pencapaiannya secara berkala serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi jangka pendek dan jangka

panjang yang dapat diupayakan untuk memastikan tercapainya sasaran. Pada setiap tahun kinerja berakhir, maka entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan diikuti dengan review dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP pada tahun-tahun selanjutnya.

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2024 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Dinas KominfoSP) sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan LAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan yang diharapkan melalui penyusunan LAKIP ini adalah tersedianya bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi selanjutnya dengan mencermati berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2024 ini, sebagai berikut :



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



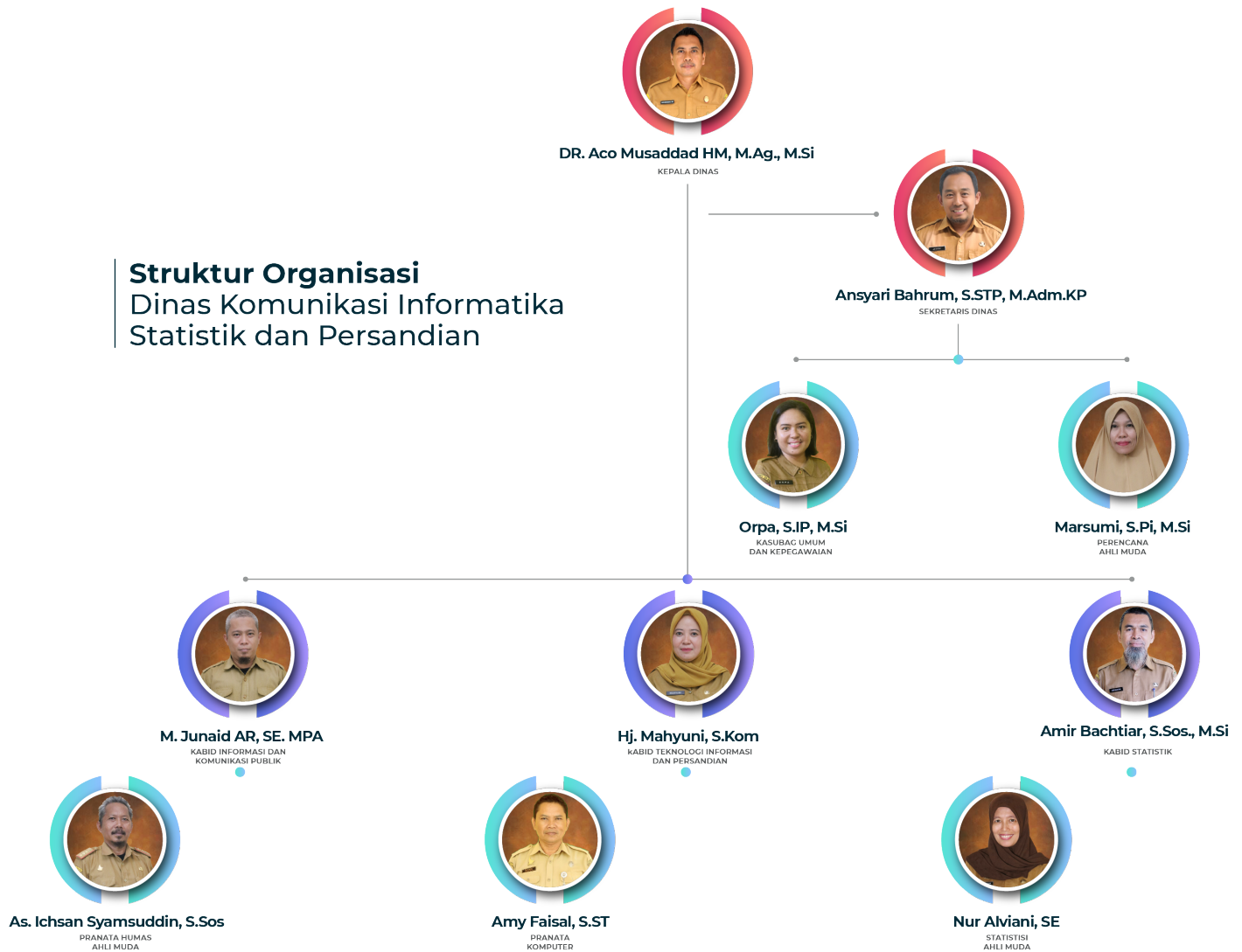
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan **unsur pelaksana** urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

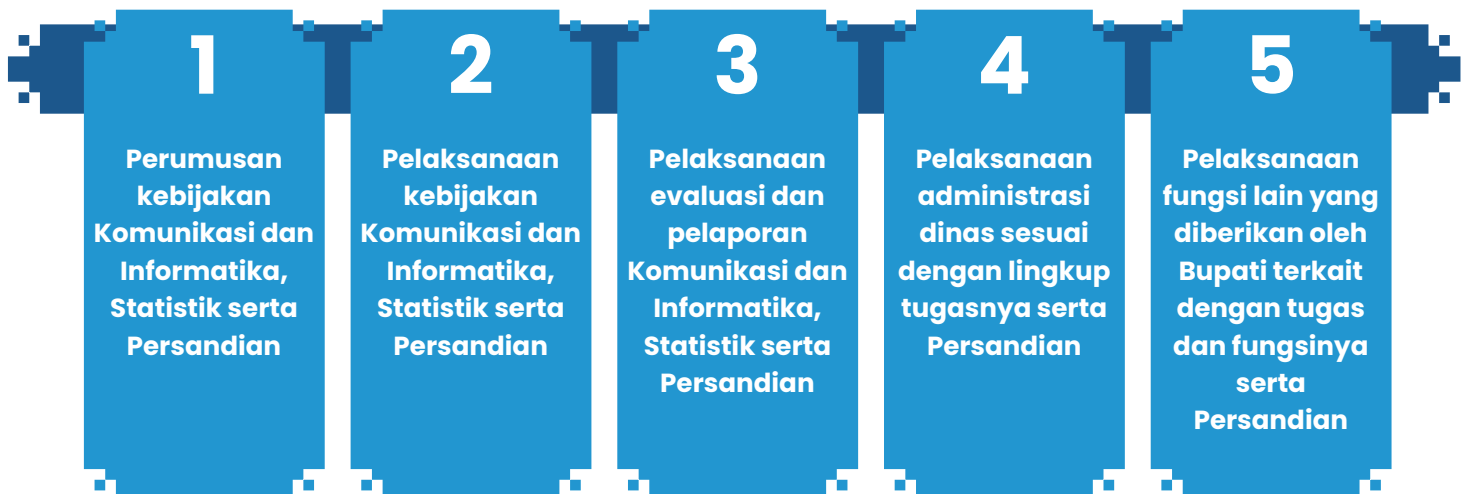


Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian



Dalam Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah

Pusat, serta membantu Bupati dalam urusan komunikasi statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi sebagai berikut :



C. Isu Strategis Organisasi

Identifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas KominfoSP dapat diuraikan sebagai berikut :

1). Belum optimalnya kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Hingga saat ini, kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Polewali Mandar masih berada dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan LAPOR.
- b. Belum optimalnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya publikasi kegiatan perangkat daerah pada masing-masing web. Hal ini dipengaruhi oleh belum terbangunnya standar dan sistem prosedur layanan peliputan dan publikasi kegiatan perangkat daerah dan belum optimalnya koordinasi dan kerjasama publikasi dengan perangkat daerah. Disisi lain media publikasi yang dapat dijangkau oleh Dinas hanya memanfaatkan Media Sosial dan Media Majalah Warta KominfoSP yang cakupan akses masyarakat terhadap informasi public tersebut terbatas pada masyarakat pengguna media sosial.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan e-PPID dan website Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

2). Belum optimalnya kualitas pemanfaatan teknologi Informasi dan persandian daerah

Hingga saat ini, cakupan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian mencapai 81,66%. Sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, antara lain :

- a. Belum optimalnya Data Center sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan data dan pemulihan data.
- b. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ada dan digunakan Perangkat Daerah saat ini belum terpadu dan belum memenuhi standar.
- c. Pemerintah Daerah belum menerapkan keamanan informasi yang memadai sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3). Belum optimalnya kualitas Data Sektoral

Hingga saat ini data-data sektoral yang dianggap valid dan memadai adalah data-data yang tersedia pada Polewali Mandar Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS, namun data ini hanya menyajikan keadaan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga dari aspek kekinian masih dianggap belum update. Perangkat Daerah

belum mengelola data sektoral dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data yang dibutuhkan belum dapat disediakan dalam waktu singkat, data belum dapat diakses secara luas dan mudah, data belum terstandarisasi, metadata belum tersedia, dan interoperabilitas data belum terbangun. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya tata kelola data sektoral;
- b. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melakukan penyediaan data; dan
- c. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi dalam penginputan data Perangkat Daerah;

02 PERENCANAAN KINERJA

Rencana
Strategis

Perjanjian
Kinerja

Instrumen
Data Pendukung

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (KominfoSP) Kabupaten Polewali Mandar menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024. Renstra dimaksud berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019–2024, dirumuskan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo SP, Tahun 2019–2024



TUJUAN :

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,akuntabel dan modern

INDIKATOR :

Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu : specific (jelas), measureable (dapat diukur), agreeable (dapat disetujui), realistic (dapat dicapai), time bounded (memiliki batas waktu

pencapaian) dan countinously improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level outcome (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Dengan mengamati kondisi saat ini dan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang ada, maka ditetapkan pencapaian target pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi melalui Forum Rapat Bersama, dengan penentuan target sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern		Indeks SPBE	2,61	2,65	2,75	2,85	3,64	3,70
		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif
		Meningkatnya kualitas data statistic sektoral	Persentase Data Sektoral yang memenuhi standar data dan dapat diakses secara online	40,37%	66,38%	70%	77%	80%	82%
		Meningkatnya kapabilitas proses dan fungsi teknis pemerintahan berbasis elektronik	Tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE	Terkelola Informasi	Rintisan Transaksi	Terkelola Transaksi	Terstandarisasi Transaksi	Terstandarisasi Kolaborasi	Terstandarisasi Kolaborasi
		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	A	A	A	A
			Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset Perangkat Daerah	93,33	95,56	97,78	100	100	100
			Indeks pengguna pelayanan public Perangkat Daerah	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

B. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Target : Menuju Informatif



SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator : Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE

Target : Terstandarisasi-Kolaborasi



SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor

Indikator : Persentase Data Sektor Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online

Target : 80%



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : A

Indikator : Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset Perangkat Daerah

Target : 100%

Indikator : Indeks Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Target : Sangat Baik

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas KominfoSP Tahun 2024 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2024

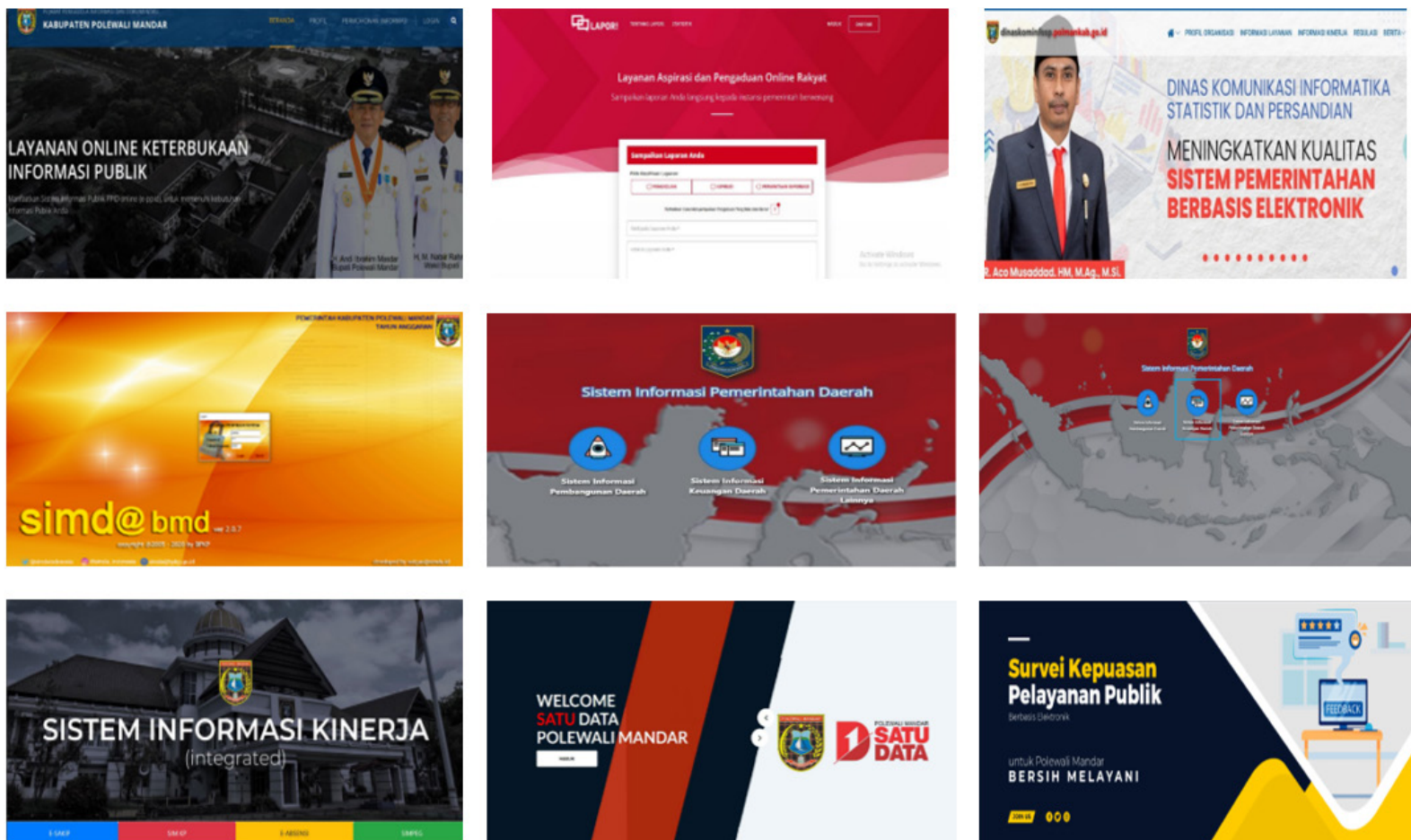
Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 62.762.385,-
Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemeritahan Berbasis Elektronik	Program Aplikasi Informatika	Rp. 1.263.985.236,-
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 14.946.330,-
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 58.404.382,-
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Program Manajemen Perkantoran	Rp. 2.223.459.463,-
Jumlah		Rp.3.623.557.796,-

C. Instrumen Pendukung 2024

Penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas menjadi suatu tuntutan utama. Dalam Upaya meningkatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, Dinas kominfoSP mengaplikasikan instrument layanan berbasis elektronik, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas keterbukaan informasi public, mengaplikasikan e-PPID, Website terintegrasi dan aplikasi Lapor dan Media social.
2. Peningkatan kapabilitas proses dan fungsi SPBE, mengintegrasikan aplikasi pemeritahan dan pelayanan public berbasis tugas dan fungsi, pembangunan infrastruktur TIK, dan layanan pusat data.
3. Peningkatan kualitas data statistic sectoral didukung layanan data sectoral, data makro melalui aplikasi Polman Satu Data.
4. Predikat SAKIP Perangkat Daerah didukung melalui layanan e-SAKIP terintegrasi, peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan dan asset didukung ketersediaan aplikasi Simda BMD, SIPD Perencanaan dan Penganggaran, serta Peningkatan indeks kepuasan Masyarakat/stakeholder didukung melalui ketersediaan aplikasi e-Survey layanan,

Gambar 2.2. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Dinas KominfoSP Berbasis Elektronik



03 AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian
Kinerja

Akuntabilitas
Keuangan



A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas KominfoSP tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP Tahun 2019-2024. Pada bagian ini diungkapkan pula analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.



SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Target : Menuju Informatif (92,50)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 yang mengisyaratkan pentingnya membangun keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Disamping regulasi dimaksud, keterbukaan informasi juga merupakan bagian penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi publik dan berdampak pula pada pertumbuhan investasi di daerah.

Untuk mengetahui kualitas keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Daerah dapat berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap tahun Komisi Informasi Pusat dan Propinsi menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan ditindaklanjuti dengan pemberian predikat keterbukaan informasi publik.

Sehubungan dengan Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Barat belum pernah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terkait implementasi keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, melalui Dinas KominfoSP melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri,

dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Berdasarkan hasil pengisian Kuisioner Mandiri, maka predikat keterbukaan informasi publik, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 97 – 100

:

Informatif
- nilai 80 – 96

:

Menuju Informatif
- nilai 60 – 79

:

Cukup Informatif
- nilai 40 – 59

:

Kurang informatif
- nilai < 39

:

Tidak informatif

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, dilaksanakan sebagai berikut :

Nomor	Variabel Penilaian	Persentase
1.	Pengumuman melalui Website	25%
	Pelayanan Informasi	
2.	2.1 – Informasi Wajib berkala	30%
	2.2 – Informasi Tersedia Setiap Saat	
	2.3 – Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan	
3.	Pendokumentasian	25%
4.	Pelayanan Informasi	20%
	Total	100

Berikut ini disajikan Capaian Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut :

a). Pengumuman Melalui Website

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2024	NILAI
1.	Aksesabilitas Website		
1,1	Memiliki web/situs/porta/khusus PPID/	www.ppid.polmankab.go.id	100
1.2	Mengumumkan informasi visi dan misi Badan Publik	Ada Lengkap	100
1,3	Mengumumkan program dan kegiatan yang sedang dijalankan badan publik tahun 2024	RPJMD 2019 RKPD 2024 Ringkasan APBD 2024	100
1.4	Mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik	Ada Lengkap	100
2.	Konten		
2,1	Mengumumkan Informasi mengenai Profil singkat PPID, struktur dan tugas PPID	Ada Lengkap	100
2,2	Tata Cara Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Ada Lengkap	100
2,3	Portal PPID memiliki (kanal) Regulasi berkenaan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan atau Peraturan Lain	Ada Lengkap	100
2,4	Portal PPID Saudara memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online	Ada Lengkap	100

2,5	Memiliki saluran akun PPID media sosial (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook)	Ada Sebagian	50
2,6	Mengaktifkan kolom komentar pada setiap konten informasi yang diunggah	Ada Lengkap	100
2,7	Mengumumkan Daftar Informasi Publik berkala, serta merta, setiap saat dan yang dikecualikan	Ada Lengkap	100
3.	Inovasi Pengembangan Layanan Publik		
3,1	Memiliki layanan publik yang memberi hak akses publik tentang: Perencanaan Program dan Anggaran dan Realisasi Anggaran Real Time	Ada Lengkap	100
3,2	Memiliki aplikasi layanan publik berbasis mobile (android, linux, apple, dll)	Layanan Perizinan	100
Jumlah			96,15

- Penyediaan Informasi Informasi Wajib Berkala

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2023	NILAI
1.	Informasi Profil Badan Publik		
1.1	Mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik, dengan mencakup nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail	Ada Sebagian	100
1.2	Mengumumkan informasi visi dan misi Badan Publik	Ada Lengkap	100
1.3	Mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik sampai dengan tiga tingkat kebawah	Ada Lengkap	100
1.4	Mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik	Ada Lengkap	100
2.	Informasi Profil Pimpinan Badan Publik		
2.1	Mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik tiga level ke bawah yang mencakup sekurang-kurangnya nama, jabatan, pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima	Ada Sebagian Besar	100
2.2	Mengumumkan LHKPN terakhir Pimpinan Daerah yang telah diperiksa KPK, atau telah menyerahkan LHKPN/LHKASN kepada KPK disertai tanda bukti kirim.	Ada Sebagian Besar	75
3.	Informasi Kegiatan dan Kinerja Badan Publik		
3.1	Mengumumkan informasi tentang program/kegiatan yang telah dijalankan di Tahun 2023 yang memuat: Nama Program/Kegiatan, Penanggung Jawab/Pelaksana Program, Jadwal kegiatan/program, Target capaian atau penyerapan, dan Sumber dan besaran anggaran	Ada Lengkap	100

3.2	Mengumumkan kerangka acuan kerja (KAK/TOR) kegiatan sesuai dengan program/ kegiatan tahun 2023	Belum Ada	0
3.3	Mengumumkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	Ada Lengkap	100
4.	Informasi Keuangan Badan Publik		
4.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023	Ada Lengkap	100
4.2	Neraca Tahun 2023	Ada Lengkap	100
4.3	Catatan atas laporan keuangan (CALK) Tahun 2023	Ada Lengkap	100
4.4	Daftar asset dan inventaris daerah Tahun 2023	Ada Lengkap	100
4.5	Ringkasan APBD Tahun 2024	Ada Lengkap	100
4.6	Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2024	Ada Lengkap	100
4.7	Ringkasan APBD Tahun 2024	Ada Lengkap	100
4.8	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA OPD) Tahun 2024	Ada Lengkap	100
4.9	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Tahun 2024	Ada Lengkap	100
4.10	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Tahun 2024	Ada Lengkap	100
4.11	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun 2024	Ada Lengkap	100
4.12	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh OPD Tahun 2023	Ada Lengkap	100
4.13	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA PPKD Tahun 2024	Ada Lengkap	100
4.14	Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2023	Ada Lengkap	100
4.15	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit Tahun 2024	Ada Lengkap	100
4.16	Opini BPK-RI atas LKPD Tahun 2023	Ada Lengkap	100
5.	Informasi Laporan Akses Informasi Badan Publik		
5.1	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima	Ada Lengkap	100
5.2	Mengumumkan Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik	Ada Sebagian	50
5.3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	Ada Sebagian	50
5.4	Alasan penolakan permohonan informasi publik.	Ada Sebagian	50
6.	Informasi mengenai Hak Memperoleh Informasi di Badan Publik		
6.1	Mengumumkan Tata Cara memperoleh informasi publik	Ada Lengkap	100
6.2	Mengumumkan Tata Cara Mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik	Ada Lengkap	100

6.3	Mengumumkan prosedur permohonan sengketa informasi	Ada Lengkap	100
6.4	Menyediakan form permohonan dan keberatan	Ada Lengkap	100
7.	Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Publik		
7.1	Menyediakan dan Mengumumkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa Tahun 2020 yang sekurang-kurangnya memuat 1) Nama lelang 2) Tanggal pembuatan 3) Lingkup Pekerjaan, 4) Tahapapan Lelang 5) Metode Pengadaan 6) Tahun anggaran, 7) Nilai Pagu Paket dan HPS 8). Lokasi Pekerjaan 9) Syarat Kualifikasi	Ada Sebagian Besar	75
8.	Informasi mengenai Regulasi Badan Publik		
8.1	Mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan	Ada Sebagian	50
8.2	Mengumumkan daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan	Ada Lengkap	100
JUMLAH			90,28

- Informasi Tersedia Setiap Saat

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2022	NILAI
1.	Perki 1/2010 tentang SLIP menetapkan 6 (enam) jenis informasi publik berkaitan dengan Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik. Apakah Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan menyediakan seluruh/sebagian jenis-jenis informasi publik dimaksud.		
1.1	Dokumen pendukung dalam bentuk naskah akademis, kajian atau pertimbangan atas kebijakan yang telah ditetapkan Tahun Anggaran 2024	Belum Ada	0
1.2	Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan dan kebijakan Tahun Anggaran 2024	Belum Ada	0
1.3	Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan Tahun Anggaran 2024	Ada Sebagian Besar	75
1.4	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan Tahun Anggaran 2024	Belum Ada	0
1.5	Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan Tahun Anggaran 2024	Belum Ada	0
1.6	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan Tahun Anggaran 2024	Ada Lengkap	100

2.	Badan Publik Saudara memiliki, menguasai atau menyediakan Informasi mengenai surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.		
2.1	Dokumen tentang Memorandum of Understanding/ Loi/ Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/sejenisnya berikut dokumen pendukungnya Tahun Anggaran 2024	Ada Lengkap	100
2.2	Dokumen pengadaan barang dan jasa lengkap dengan pendukungnya, termasuk kontrak/SPK Tahun Anggaran 2023 & 2024	Belum Ada	0
3.	Apakah Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan menyediakan Informasi-informasi tentang organisasi, administrasi dan kepegawaian sebagaimana dibawah ini.		
3.1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan	Ada Sebagian Besar	75
3.2	Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan dan penghargaan yang pernah diraih	Ada Sebagian Besar	75
3.3	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.	Ada Lengkap	100
3.4	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.	Ada Sebagian Besar	100
4.	Apakah Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan atau menyediakan dokumen-dokumen keuangan dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir		
4.1	Laporan realisasi anggaran	Ada Lengkap	100
4.2	Neraca	Ada Lengkap	100
4.3	Catatan atas laporan keuangan (CALK)	Ada Lengkap	100
4.4	Daftar asset dan inventaris	Ada Lengkap	100
4.5	Perda APBD	Ada Lengkap	100
4.6	Perda APBD Perubahan	Ada Lengkap	100
4.7	RKA OPD	Ada Lengkap	100
4.8	DPA OPD	Ada Lengkap	100
4.9	RKA PPKD	Ada Lengkap	100
4.10	DPA PPKD	Ada Lengkap	100
4.11	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh OPD	Ada Lengkap	100
4.12	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA PPKD	Ada Lengkap	100
4.13	LKPD (audited)	Ada Lengkap	100

4.14	Opini BPK-RI atas LKPD	Ada Lengkap	100
4.15	Laporan Arus Kas	Ada Lengkap	100
5.	Badan Publik Saudara memiliki, menguasai atau menyediakan Informasi tentang hal-hal berikut ini.		
5.1	Syarat-syarat perizinan	Ada Lengkap	100
5.2	Izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan	Ada Lengkap	100
5.3	Dokumen pendukung izin yang diterbitkan/dikeluarkan	Ada Lengkap	100
6.	Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan menyediakan Informasi mengenai laporan pelayanan informasi publik		
6.1	Dokumen kegiatan pelayanan Informasi Publik yang memuat sarana prasarana, SDM, anggaran dan penggunaan anggaran Tahun 2023	Ada Sebagian	50
7.	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		
7.1	Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya	Ada Lengkap	100
7.2	Sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya	Ada Lengkap	100
7.3	Anggaran layanan informasi publik beserta laporan penggunaannya	Ada Lengkap	100
8.	Informasi Lain-lain		
8.1	Memiliki dan menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja	Ada Lengkap	100
8.2	Memiliki dan menyediakan data aset atau inventaris Tahun Anggaran 2023	Ada Lengkap	100
JUMLAH			85,42

- DIP dan Informasi yang dikecualikan

No.	Pernyataan	Keterangan	NILAI
1.	Daftar Informasi Publik		
1.1	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2023	Ada Lengkap	100
1.2	Daftar Informasi Publik PPID Utama	Ada Lengkap	100
1.3	Daftar Informasi Publik PPID Pembantu	Ada Sebagian Besar	75
1.4	Menetapkan SOP Penyusunan DIP	Ada Lengkap	100
1.5	DIP disusun menguraikan ringkasan dan detail substansi setiap jenis informasi	Ada Lengkap	100
1.6	Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID disertai dengan SK Penetapan	Ada Lengkap	100
1.7	DIP dilakukan pembaharuan berkala (updating)	Ada Sebagian Besar	75

2.	Informasi Dikecualikan		
2.1	Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	Ada Lengkap	100
2.2	PPID melakukan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan	Ada Lengkap	100
2.3	Hasil uji konsekuensi ditetapkan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani Atasan PPID	Ada Lengkap	100
2.4	Memiliki dan menyediakan naskah pertimbangan hasil uji konsekuensi	Ada Lengkap	100
JUMLAH			95,45

b). Pendokumentasian

No.	Pertanyaan	Data Pendukung	NILAI
1.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
1.1	Apakah Badan Publik telah menunjuk PPID yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang?	Ada Lengkap	100
1.2	Apakah tugas dan fungsi PPID pada Badan Publik saudara tertuang dalam bentuk Peraturan/Keputusan?	Ada Lengkap	100
1.3	Apakah Badan Publik Saudara telah memiliki struktur/bagan PPID yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan?	Ada Lengkap	100
2.	Koordinasi PPID dengan satuan/unit kerja di Badan Publik		
2.1	Apakah ada koordinasi yang dilakukan secara rutin dan terjadwal?	Ada Lengkap	100
2.2	Apakah ada pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi?	Ada Lengkap	100
3.	Tata Kelola Pendokumentasian Informasi		
3.1	Apakah Badan Publik anda memiliki SOP dalam penyimpanan informasi dan dokumentasi?	Ada Lengkap	100
3.2	Apakah badan publik anda menyimpan informasi dan dokumentasi dalam bentuk manual?	Ada Lengkap	100
3.3	Apakah badan publik anda menyimpan informasi dan dokumentasi dalam bentuk digital?	Ada Lengkap	100
3.4	Apakah penyimpanan informasi dan dokumentasi memiliki Ruang Arsip tersendiri?	Ada Sebagian	50
3.5	Apakah Badan Publik anda memiliki anggaran tetap dalam penatausahaan dan penyimpanan informasi?	Ada Sebagian Besar	75
Jumlah Nilai			92,5

c). Pelayanan Informasi

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2022	NILAI
1.	Peraturan Pelayanan Informasi Publik		
1.1	Memiliki Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelayanan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
1.2	Keputusan Bupati/Walikota tentang PPID Utama dan PPID Pembantu	Ada Lengkap	100
1.3	Peraturan/Keputusan mengenai Tugas dan fungsi PPID pada Badan Publik	Ada Lengkap	100
2.	Memiliki SOP tentang Tata Kelola Informasi Publik		
2.1	- SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	Ada Lengkap	100
2.2	- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
2.3	- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	Ada Lengkap	100
2.4	- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
2.5	- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi	Ada Lengkap	100
3.	Aktivitas PPID		
3.1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu	Ada Lengkap	100
3.2	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu	Ada Lengkap	100
3.3	Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan	Ada Sebagian Besar	100
3.4	Memiliki agenda rutin dan terjadwal kegiatan PPID Utama dengan PPID Pembantu terkait:	Ada Sebagian Besar	75
3.5	Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik	Ada Lengkap	100
3.6	Uji Konsekuensi	Ada Lengkap	100
3.7	Membuat laporan layanan informasi publik ke Komisi Informasi secara berkala	Ada Lengkap	100
3.8	Melakukan sinergitas PPID dengan Pimpinan daerah	Ada Lengkap	100
4.	Pelayanan Informasi		

4.1	Menyediakan ruang khusus pelayanan informasi lengkap dengan meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan serta komputer (desk information) yang mudah di akses publik	Ada Lengkap	100
4.2	Ada Petugas khusus yang melayani informasi Publik	Ada Lengkap	100
4.3	Menyediakan Informasi Publik pada Papan pengumuman informasi	Ada Sebagian Besar	75
4.4	Memiliki anggaran tetap bagi tata kelola informasi publik	Ada Lengkap	100
4.5	Apakah memiliki Ruang Khusus PPID	Ada Sebagian	50
4.6	Apakah memiliki Meja layanan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
Jumlah Nilai			95,45

REKAPITULASI

Nomor	Variabel Penilaian	Persentase	Nilai	Hasil
1.	Pengumuman melalui Website	25%	96,15	24,04
2.	Pelayanan Informasi		90,38	
	2.1 – Informasi Wajib berkala		90,28	
	2.2 – Informasi Tersedia Setiap Saat	30%	85,42	27,05
	2.3 – Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan		95,45	
3.	Pendokumentasian	25%	92,5	23,125
4.	Pelayanan Informasi	20%	94,45	19,09
Total		100	-	93,37

PREDIKAT : MENUJU INFORMATIF

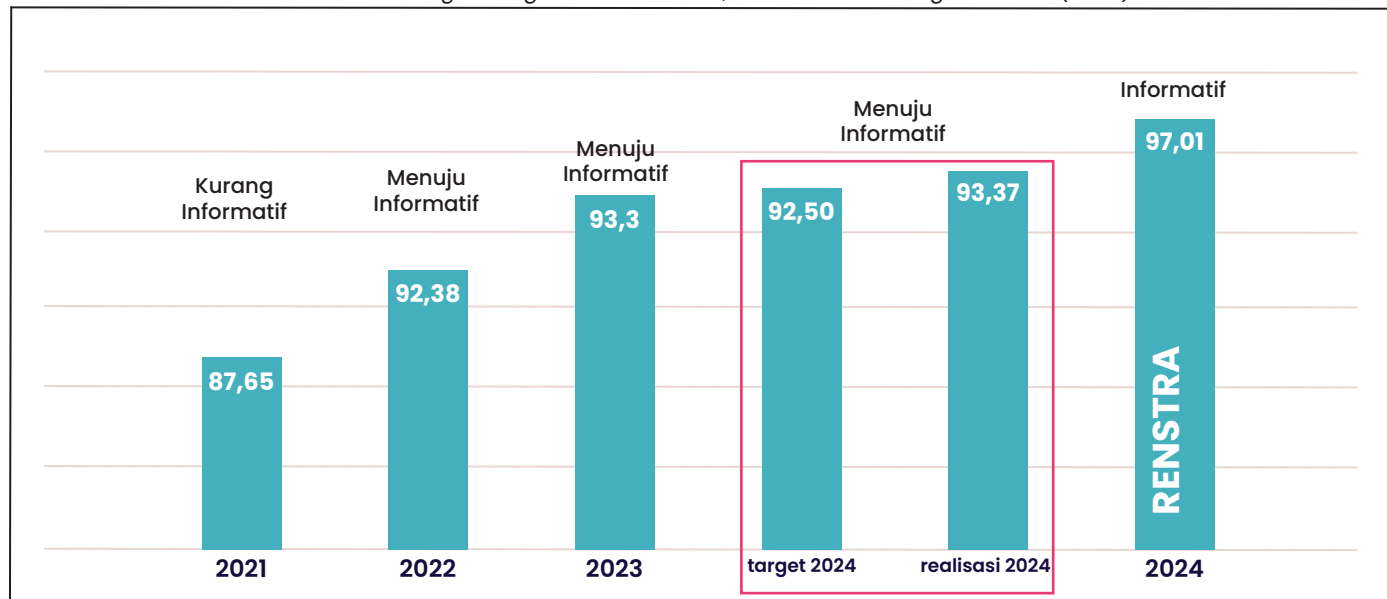
Berdasarkan hasil pengukurannya tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2023 pada sasaran strategis I digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (92.50)	Menuju Informatif (93,37)	100,94%

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis I, predikat keterbukaan informasi publik melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2024, yaitu dari target menuju informatif (92.50) terealisasi menuju informatif (93,37)

Chart 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2024 Target dengan Realisasi 2024, 2021-2023 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang IKP Dinas KominfoSP, Januari 2024

Capaian Kinerja dasar target 2022

= 93,37
92,50 **100,9%**

Capaian Kinerja dasar 2021-2024, Meningkat :

5,72%

Capaian Kinerja target Akhir Renstra

= 93,37
97,01 **96,24%**

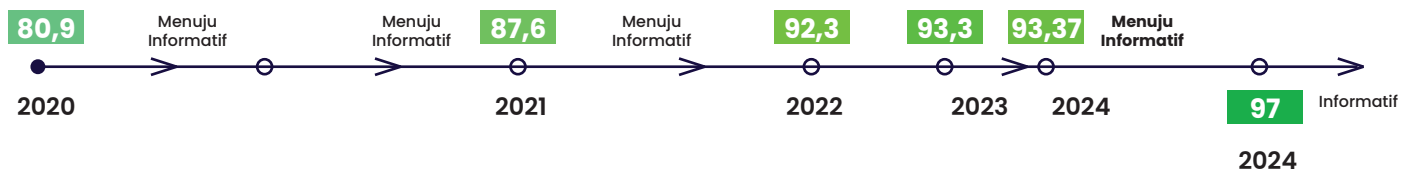
Mencermati chart tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja Dinas KominfoSP dalam mewujudkan keterbukaan informasi public terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 (87,65%), tahun 2022 (92,38%), tahun 2023 (93,30%) dan tahun 2024 (93,37%). Capaian predikat keterbukaan informasi public mengalami peningkatan sangat signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 (92,38%), kondisi dipengaruhi terlaksananya pendampingan secara kontinu oleh PPID utama kepada Perangkat Daerah selaku PPID pembantu, serta Website sebagai sarana utama layanan informasi public, oleh PPID utama juga telah diupgrade di tahun 2022 untuk peningkatan layanan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap daftar informasi public yang terupdate oleh PPID pembantu, turut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap capaian kinerja tahun

2023 (93,30%). Capaian ini didukung kinerja PPID utama dalam meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi public pada Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu. Dengan kondisi ini, layanan informasi public tersaji lebih informatif untuk digunakan oleh pemohon informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Selanjutnya kondisi capaian 2024 meningkat sebesar 5,72% dari kondisi tahun 2023. Capaian predikat keterbukaan informasi publik tahun 2024 (93,37%), meski melebihi target yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja tidak mengalami kenaikan signifikan. Adanya serangan siber pada Pusat Data Nasional (PDN) turut mempengaruhi capaian kinerja keterbukaan informasi publik. Sebagaimana diketahui, Pusat Data Nasional (PDN), dimanfaatkan untuk menopang layanan informasi digital. PDN mewujudkan penyimpanan data terpusat secara nasional.

PDN sebagai pusat data nasional, terintegrasi dengan aplikasi dan layanan publik, termasuk layanan website Perangkat Daerah, layanan e-PPID dan Layanan Aduan Lapor yang merupakan instrumen layanan untuk menilai keterbukaan informasi publik setiap tahun. Serangan siber pada PDN Kembali dimulai pada penghujung tahun 2024. Dampaknya, Perangkat daerah selaku PPID pembantu tidak maksimal dalam upload data informasi public pada layanan aplikasi website, e-PPID dan aduan Lapor. Kondisi ini turut mempengaruhi penilaian mandiri keterbukaan informasi public oleh Dinas KominfoSP pada akhir tahun 2024. Meski mengalami kendala ditengah target mewujudkan keterbukaan

informasi public predikat menuju informatif tahun 2024, Dinas KominfoSP selaku PPID utama secara konsisten terus melakukan Upaya meningkatkan capaian keterbukaan informasi public, diantaranya dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada SDM admin website, PPID dan Lapor seluruh Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu. Materi pelatihan mencakup tata cara pengelolaan informasi public agar lebih informatif dan memberi nilai sampai pada tahap penyebarluasan informasi public. Hal ini juga memberi dampak bagi PPID pembantu berpartisipasi lebih aktif dalam mengupdate informasi public pada website dan e-PPID.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat informatif (97,01), maka kondisi saat ini sudah mencapai 93,37%. Capaian ini, dapat digambarkan dengan milestone sebagai berikut :



ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

1. Adanya regulasi terkait keterbukaan informasi publik, yang meliputi tata kelola informasi publik, daftar informasi publik, dan admin e-PPID.
2. Upgrade secara berkala sarana utama layanan informasi public (Website).
3. Peningkatan peran dan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik.

Faktor Penghambat :

1. Adanya serangan siber pada Pusat data Nasional (PDN) mempengaruhi akses upload data informasi publik
2. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi Publik melalui website dan e-PPID belum terlaksana secara berkala.

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Internalisasi dan pendampingan berkelanjutan PPID Pembantu dalam pengelolaan pengelolaan informasi publik.
- Penguatan koordinasi PPID utama dengan PPID pembantu.
- Dukungan penganggaran untuk backup server data jika PDN mengalami gangguan siber

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 62.762.385,-	54.547.382,-	86.91
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 62.762.385,-	54.547.382,-	86.91
a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 48.506.515,-	Rp. 42.541.512,-	87.70
b. Pelayanan Informasi Publik	Rp. 10.445.210,-	Rp. 10.445.210,-	100
c. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp. 3.810.660,-	Rp. 1.560.660,-	40.96



Gambar 3.1. Pembinaan Admin Perangkat Daerah Terkait Penyajian Informasi Publik dalam Rangka Peningkatan layanan informasi publik pada Organisasi Perangkat Daerah



SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator : Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE

Target : Terstandarisasi-Kolaborasi

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	Terstan darisasi Kolaborasi	Terstan darisasi Kolaborasi	111,1%

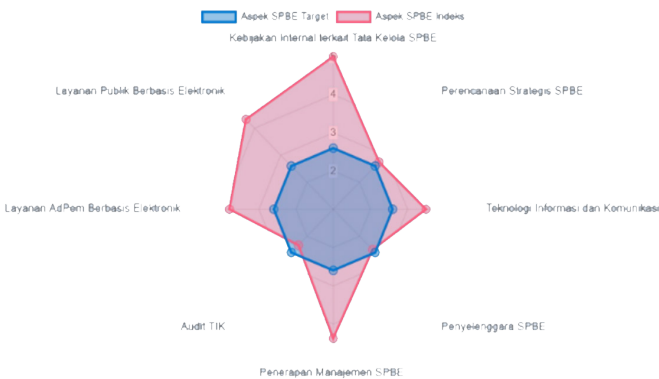
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE. Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

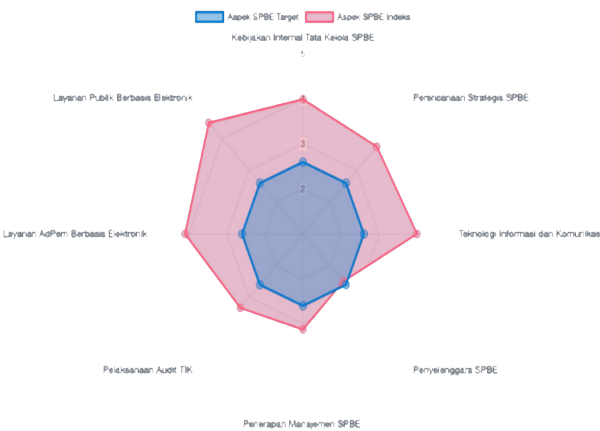
Berdasarkan Keputusan Menteri PAN Dan RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 yaitu 3,88 dengan predikat sangat baik. Capaian indeks SPBE tahun 2024 mengalami peningkatan yang dari kondisi sebelumnya, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 sebesar 3,85 dengan predikat Sangat Baik.

Chart. 3.2
Perbandingan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2023-2024

Indeks SPBE Tahun 2023



Indeks SPBE Tahun 2024



Hasil Evaluasi SPBE 2023

Nama Instansi :	
Pemerintah Kab. Polewali Mandar	
KIUD	Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	3,85
Predikat SPBE	Sangat Baik
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	5,0
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5,0
Domain Tata Kelola SPBE	3,0
Perencanaan Strategis SPBE	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,50
Penyelenggara SPBE	2,50
Domain Manajemen SPBE	3,82
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,38
Penyelenggara SPBE	2,33
Domain Layanan SPBE	4,01
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,8
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,33

Hasil Evaluasi SPBE 2024

Nama Instansi :	
Pemerintah Kab. Polewali Mandar	
KIUD	Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	3,88
Predikat SPBE	Sangat Baik
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	4
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4
Domain Tata Kelola SPBE	3,6
Perencanaan Strategis SPBE	3,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4
Penyelenggara SPBE	2,5
Domain Manajemen SPBE	3,18
Penerapan Manajemen SPBE	3,13
Pelaksanaan Audit TIK	3,33
Domain Layanan SPBE	4,26
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,1
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,5

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS PROSES

RINTISAN

Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

TERKELOLA

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi

TERSTANDARISASI

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi

TERINTEGRASI DAN TERUKUR

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif

OPTIMUM

Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas

TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS FUNGSI TEKNIS	
INFORMASI	Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
INTERAKSI	Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
TRANSAKSI	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
KOLABORASI	Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain
OPTIMALISASI	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

Adapun capaian tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

No.	Indikator	Level
A. Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses		3,58
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1

20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	4
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4
B. Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis		4,2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

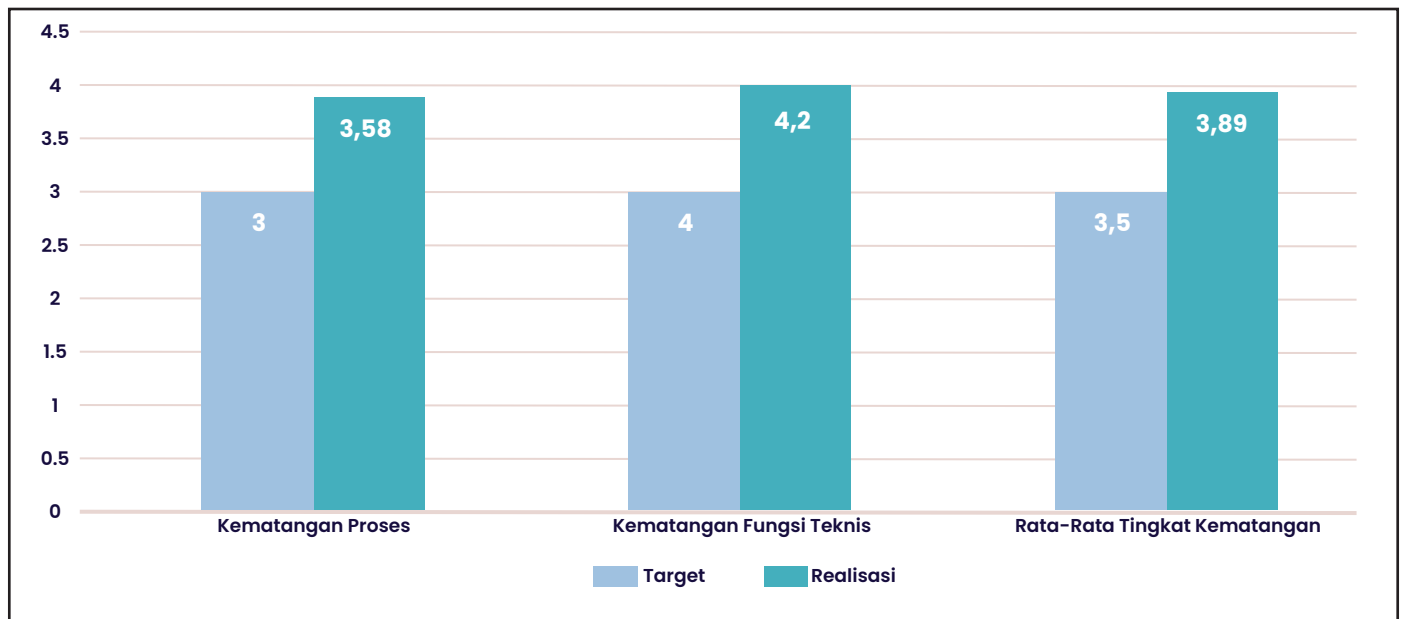
Sumber: <https://monev.spbe.go.id>

Memperhatikan hasil perhitungan pada Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kematangan SPBE pada kapabilitas proses nilai 3,58 atau dengan tingkat kematangan Terstandarisasi, sedangkan untuk Tingkat Kematangan SPBE pada kapabilitas fungsi teknis nilai 4,2 dengan predikat tingkat kematangan kolaborasi. Dengan demikian realisasi kinerja melampaui target kinerja yang direncanakan yaitu Terstandarisasi (nilai 3) -Kolaborasi (nilai 4). Capaian tahun 2024, mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 Tingkat Kematangan SPBE pada kapabilitas proses nilai 3,93 atau dengan tingkat kematangan Terstandarisasi, sedangkan untuk Tingkat Kematangan SPBE pada kapabilitas fungsi teknis nilai 4 dengan predikat tingkat

kematangan kolaborasi. hal ini dipengaruhi Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE. Keunggulan aspek layanan publik nampak telah digunakannya layanan publik yang bersifat tematik. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dibuktikan dengan adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan Publik Sektoral menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Layanan Publik Sektoral dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi-aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi. Keunggulan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik lainnya pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan adanya aplikasi pusat yang digunakan seperti SP4N LAPOR, SATU DATA, JDIH dan JDIHN yang telah melakukan layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lain.. Adapun capaian kinerja dimaksud dapat digambarkan melalui chat berikut:

Chart 3.3

Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024



Sumber : Data Olah, <https://monev.spbe.go.id> 2024

Capaian Kinerja
dasar target 2024

= 3,89
3,5

111,1%

Capaian Kinerja
dasar 2022-2024,
Meningkat :

0,30%

Capaian Kinerja
target Akhir Renstra

= 3,89
3,5

111,1%

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Electronic (SPBE) bahwa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi baik dalam aspek kebijakan, tata kelola maupun dalam aspek layanan pemerintahan. Pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP, realisasi Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Fungsi SPBE 2024 Sudah melebihi 111,1% dari Target 3,5 yang ditentukan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2024, maka diketahui kondisi fungsi-fungsi utama Pemerintahan Daerah yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pemetaan Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan Yang telah didukung Teknologi Sistem Informasi Tahun 2024

No	Fungsi-fungsi Utama Perangkat Daerah	Aplikasi Yang Digunakan
1	SEKRETARIAT DAERAH	
1	fungsi Tata Pemerintahan	Elektronik-LPPD, Elektronik-SPM
2	fungsi Kesejahteraan Rakyat	-
3	fungsi Hukum	JDIH
4	fungsi Administrasi Pembangunan	-
5	fungsi Pengadaan Barang Dan Jasa	SiRUP, LPSE
6	fungsi Perekonomian Dan SDA	-
8	fungsi Organisasi	-
	- fungsi kelembagaan	e-sakip,
	- fungsi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Sistem Informasi Pelayanan Publik
	- fungsi reformasi birokrasi	e-PMPRB, SKP Online

	9	fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-
2	SEKRETARIAT DPRD		
	1	fungsi Risalah dan Persidangan	-
	2	fungsi Hubungan Masyarakat	-
3	INSPEKTORAT		
	1	Fungsi Pengawasan	Whistle Blowing System
	2	Fungsi Audit	e-Auditee
	3	Fungsi Review	e-review SAKIP OPD
	4	Fungsi Pemantauan Tindak Lanjut	SimHPPemda
4	BALITBANGREN		
	1	fungsi penelitian dan pengembangan	Sistem Inovasi Daerah
	2	fungsi Perencanaan Dan Pengendalian Program	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
5	BADAN KEUANGAN		
	1	fungsi Anggaran	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
	2	fungsi Verifikasi Dan Perbendaharaan	SIMDA Keuangan
	3	fungsi Akuntansi	SIMDA Keuangan
	4	fungsi Aset	SIMDA BMD
6	BKPP		
	1	fungsi Pengadaan, Informasi Kinerja Pegawai	SIMPEG, e-LAPKIN
	2	fungsi Administrasi Kepegawaian	SAPK
	3	fungsi Pendidikan Dan Pelatihan	-
7	BADAN KESBANG POL		
	1	fungsi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial & Budaya	Sistem Informasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya
	2	fungsi Politik Dalam Negeri	Sistem Informasi Politik Dalam Negeri
	3	fungsi Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional	Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
8	BPBD		
	1	fungsi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	InaRISK Personal
			Sistem Penerima Peringatan Informasi Gempa Bumi
			Sistem Informasi Prakiraan Cuaca, Iklim, Udara dan Gempa Bumi
			Data Informasi Bencana Indonesia
	2	fungsi Kedaruratan Dan Logistik	InaRISK Personal
	3	fungsi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Aplikasi e-Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9	BADAN PENDAPATAN		
	1	fungsi Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan	SIMPADU
	2	fungsi Penagihan	SIMPADU
	3	fungsi Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan	SIMPADU
10	DINAS KESEHATAN		
	1	fungsi Kesehatan Masyarakat	SIM Gizi Terpadu
	2	fungsi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	SIM Tuberculosis Terpadu
	3	fungsi Pelayanan Kesehatan	SIM Rujukan terpadu
			Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
	4	fungsi Sumber Daya Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan Daerah
			Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	fungsi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-
	2	fungsi Ketertiban Umum Dan Ketentraman	-
	3	fungsi Sumber Daya Aparatur	-
	4	fungsi Perlindungan Masyarakat	-

12	DIKNASBUD		
	1	fungsi Pendidikan Dan Pengajaran	DAPODIKDAS
	2	fungsi Sarana Dan Prasarana	DAPODIKDAS
	3	fungsi Pengembangan Mutu Pendidikan	DAPODIKDAS
	4	fungsi PAUD dan Pendidikan Masyarakat	DAPODIK PAUD & DIKMAS
	5	Kepala fungsi Kebudayaan	DAPOBUD
13	DINAS KOMINFO, STATISTIK & PERSANDIAN		
	1	fungsi Teknologi Informasi	Halo Yantik
	2	fungsi Statistik	Polman Satu Data
	3	fungsi Informasi & Komunikasi publik	e-PPID
			LAPOR!
	4	fungsi Persandian	Sertifikat Elektronik
			QR Code Polewali Mandar
14	DINAS SOSIAL		
	1	fungsi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-
	2	fungsi Perlindungan Dan Jaminan Sosial	e-SDM PKH
			SIKS-NG
			e-PKH
	3	fungsi Rehabilitasi Sosial	-
15	DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA & ESDM		
	1	fungsi Perencanaan, Fasilitasi Pertanahan, Transmigrasi dan ESDM	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi
	2	fungsi Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi	Sistem Informasi Penyebaran Penduduk Transmigrasi
			Sistem Web GIS Tata Kelola Aset Transmigrasi
	3	fungsi Tenaga Kerja	Jaringan dan Informasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
		Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja LN	
		Sistem Informasi Ketenagakerjaan	
16	PENANAMAN MODAL & PTSP		
	1	fungsi Penanaman Modal	-
	2	fungsi Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan	OSS, SiCantik
	3	fungsi Peninjauan dan Penetapan	-
17	DP2KBP2A		
	1	fungsi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan	Sistem Informasi Kampung KB
	2	fungsi Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Sistem Informasi Keluarga
	3	fungsi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sistem Informasi Kabupaten Layak Anak
			Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN		
	1	fungsi Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
	2	fungsi Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	3	fungsi Kebersihan dan Pertamanan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA		
	1	fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa	Sistem Informasi Indeks Desa Membangun
	2	fungsi Pemerintahan Desa	Sistem Informasi Desa
	3	fungsi Usaha Ekonomi Desa Dan Pendayagunaan SDA Dan Teknologi Tepat Guna	-

20	DINAS PERHUBUNGAN		
	1	fungsi Pengembangan Perhubungan	-
	2	fungsi Lalu Lintas	-
	3	fungsi Angkutan	Uji KIR Kendaraan Bermotor
21	DINAS PERTANIAN & PANGAN		
	1	fungsi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Pusat Komando Strategis Tanaman Pangan Early Warning System Tanaman Hortikultura
	2	fungsi Peternakan	Sistem Informasi Pasar Online Nasional Ternak Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Yang Terintegrasi Indonesia
	3	fungsi Perkebunan	Sistem Informasi Perkebunan
	4	fungsi Pengembangan Sdm	Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian
	5	fungsi Prasarana Dan Sarana Pertanian	Sistem Bantuan Alsintan Online
	6	fungsi Ketahanan Pangan	-
22	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA		
	1	fungsi Pemuda	-
	2	fungsi Olah Raga	-
	3	fungsi Usaha Pariwisata	-
	4	fungsi Promosi Wisata	-
23	DINAS PERINDAGKOP & UKM		
	1	fungsi Perindustrian	Klinik Desain Merk dan Kemasan
	2	fungsi Perdagangan	Sistem Informasi Pasar Rakyat
	3	fungsi Standarisasi Perlindungan Konsumen	-
	4	fungsi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Sistem Pendataan Usaha Kecil dan Menengah Online Data System (ODS-UKM)
24	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, PERTANAHAN		
	1	fungsi Permukiman	Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman
	2	fungsi Pertanahan	Sistem Informasi Pertanahan
	3	fungsi Perumahan	Sistem Informasi Profil Perumahan Sistem Informasi Bantuan Perumahan
25	DINAS PU & PENATAAN RUANG		
	1	fungsi Sumber Daya Air	-
	2	fungsi Bina Marga	Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah
	3	fungsi Cipta Karya	Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Cipta karya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
	4	fungsi Bina Konstruksi	Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
	5	fungsi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang
26	DISDUK CAPIL		
	1	fungsi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	2	fungsi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	3	fungsi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	4	fungsi Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	
27	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN		
	1	fungsi Perikanan Budidaya	Aplikasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
	2	fungsi Perikanan Tangkap Dan Pesisir	-
	3	fungsi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-
	4	fungsi Kelembagaan Dan Penyuluhan	-

28	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN		
	1	fungsi Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Manajemen Internet Perpustakaan
	2	fungsi Pengolahan, Pelestarian Dan Pelayanan Perpustakaan	-
	3	fungsi Kearsipan	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
	1	fungsi Pelayanan Medis Dan Keperawatan	SIMRS
30	KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH		
	1	Fungsi Perencanaan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
	2	Fungsi Keuangan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
	3	Fungsi Perbendaharaan	SIMDA Keuangan
	4	fungsi Akuntansi	SIMDA Keuangan
	5	fungsi Aset	SIMDA BMD
	6	Fungsi Monitoring dan Pelaporan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
	7	Fungsi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-SAKIP
	8	Fungsi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sistem Informasi Pelayanan Publik
	9	Fungsi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Penilaian Mandiri RB
	10	Fungsi Pengukuran Kinerja Individu	SKP Online
	11	Fungsi Disiplin Pegawai	e-Absensi
	12	Fungsi Kepegawaian	SIMPEG
	13	Fungsi Informasi Publik	e-PPID Pembantu
Jumlah		120	99
Persentase Fungsi Utama Yang Telah Didukung Sistem Informasi Aplikasi			82,50%

Sumber : Bidang TIP Dinas KominfoSP, Januari 2025

Optimalnya pencapaian kinerja kualitas teknologi informasi ini juga didukung oleh semakin membaiknya kualitas bandwidth tahun 2024, sebagaimana terlihat pada chart berikut :

Tabel 3.4
Penataan Bandwitch Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024

NO	OPD	BANDWITCH 2022	BANDWITCH 2023	BANDWITCH 2024
1..	Ruang Kerja Bupati	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
2..	Ruang Kerja Wabup	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
3..	Ruang Kerja Sekda	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
4..	Ass 1	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
5..	Ass 2	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
6..	Ass 3	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
7..	Bagian Pemerintahan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
8..	Bagian Kesra	Upto 30 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
9..	Bagian Humas Dan Protokol	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
10..	Bagian Ekonomi	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
11..	Bagian Pembangunan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
12..	Bagian Pengadaan Barang Jasa	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
13..	Bagian Ortala	Upto 30 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO

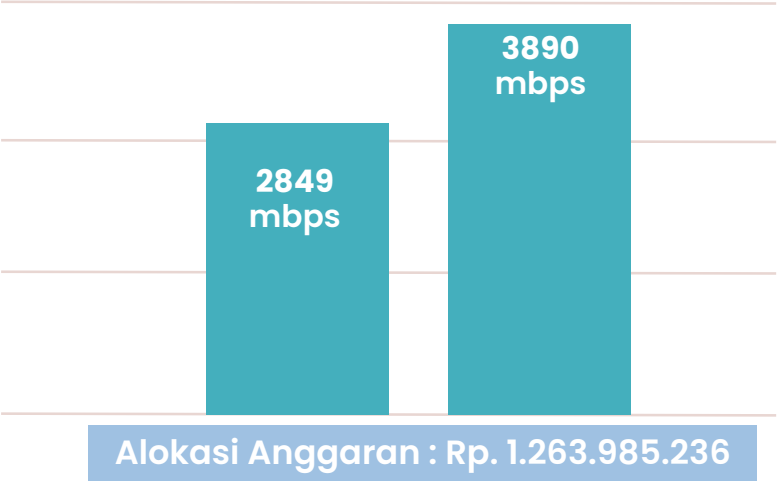
14	Bagian Hukum	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
15	Bagian Umum Dan Perlengkapan	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
16	Staf Ahli	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
17	Ruang Pola	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
18	Rujab Bupati	Upto 100 Mbps, FO	Upto 100 Mbps, FO	Upto 100 Mbps, FO
19	Rujab Wakil	Upto 130 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO
20	Rujab Sekda	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
21	Rumah Posko	-	-	Upto 50 Mbps, FO
22	Sekretariat DPRD	Upto 120 Mbps, FO	Upto 120 Mbps, FO	Upto 120 Mbps, FO
23	Inspektorat	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
24	Bappeda Litbang	Upto 130 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO
25	Badan Keuangan	3 Mbps+ Upto 120 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 120 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 120 Mbps, FO
26	Badan Pendapatan	6 Mbps+ Upto 40 Mbps, FO	6 Mbps+ Upto 40 Mbps, FO	6 Mbps+ Upto 40 Mbps, FO
27	Bkpp	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
28	Badan Kesbangpol	Upto 30 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
29	Bpbd	Upto 30 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
30	Disdikbud	Upto 80 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO
31	Dinkes	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
32	Dinas Sosial	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
33	Dinas Pupr	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
34	Dinas Rumkimtan	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
35	Disdukcapil	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
36	Dinas Pertanian Pangan	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
37	Dinas Kelautan Perikanan	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
38	DLHK	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
39	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
40	Disperindagkop	Upto 80 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO
41	Dispop	Upto 80 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO
42	Dpmpstsp	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
43	Dpmd	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
44	Dp2kbp3a	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
45	Dinas Satpol Pp	Upto 30 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
46	Dinas Kominfo Sp	Upto 120 Mbps, FO	Upto 120 Mbps, FO	Upto 120 Mbps, FO
47	Dinas Perhubungan	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
48	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
49	Kec. Binuang	Upto 10 Mbps, FO	Upto 10 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO

50..	Kec.Polewali	Upto 10 Mbps, FO	Upto 10 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
51..	Kec. Matakali	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
52..	Kec. Wonomulyo	Upto 10 Mbps, FO	Upto 10 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
53..	Kec. Mapilli	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
54..	Kec. Balanipa	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
55..	Kec. Tinambung	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
56..	Kec. Anreapi	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
57..	Kec. Tutar	--	--	--
58..	Kec. Bulu	--	--	--
59..	Kec. Matangnga	--	--	--
60..	Kec. Campalagian	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
61..	Kec. Luyo	--	--	--
62..	Kec. Limboro	Upto 10 Mbps, FO	Upto 10 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
63..	Kec. Tapango	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
64..	Kec. Alu	--	--	--
65..	UPTD Meteorologi	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
66..	UPTD Perhubungan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
67..	Mesjid Syuhada	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
68..	Gedung Gadis	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
69..	Rumah Kemasan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
70..	LTSA	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
Besaran Bandwitch		2849 Mbps	2849 Mbps	3890 Mbps

Chart 3.5
Peningkatan Kapasitas Bandwitch Tahun 2023-2024



Kapasitas Bandwitch pada tahun 2024, mengalami peningkatan pada kapasitas 3890 Mbps dengan kualitas fiber optic

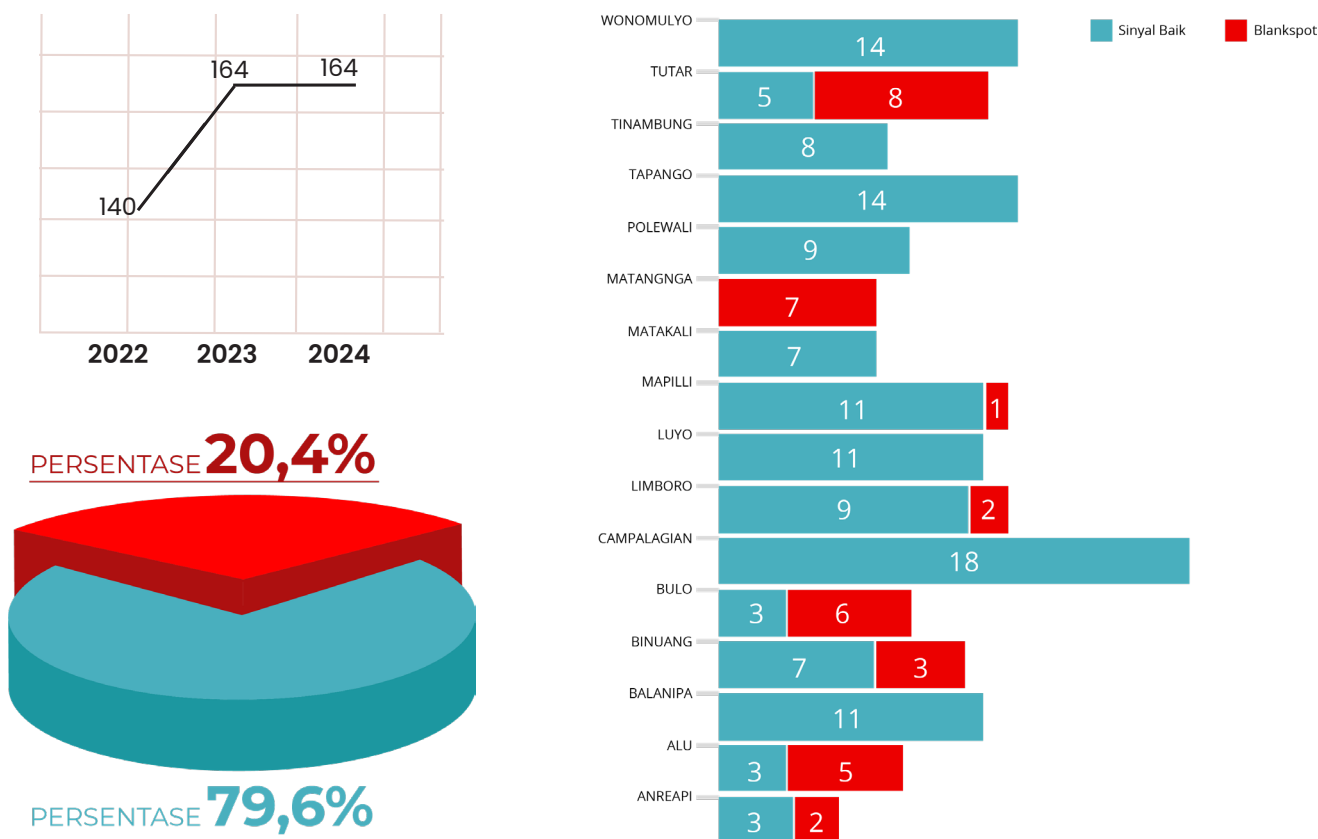


Dari aspek eksternal, Dinas KominfoSP mengupayakan pengurangan daerah blankspot agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan komunikasi sehingga berbagai sistem informasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah dapat diakses oleh masyarakat utamanya yang terkait dengan pelayanan publik dan

perkembangan layanan pemerintahan dan pembangunan. Upaya peningkatan kapasitas bandwith pada tahun 2024, mengalami peningkatan, dengan adanya dukungan penganggaran yang berdampak pada adanya penambahan titik bandwith pada Perangkat Daerah

Adapun kondisi blankspot dan pertumbuhan menara telekomunikasi, dapat dilihat pada chart berikut ini :

Chart 3.6
Pertumbuhan Menara Telekomunikasi Tahun 2022 s.d. 2024 dan Blankspot Desa per Kecamatan Tahun 2024



ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

- Adanya kebijakan SPBE yang mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lembaga turut menyediakan aplikasi terintegrasi Pusat-Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang juga turut menunjang kinerja kementerian/ lembaga

Faktor Penghambat :

- Kompetensi SDM SPBE belum memenuhi standar kompetensi SDM SPBE pada seluruh Perangkat Daerah

- | | |
|---|---|
| b. Berkembangnya teknologi Wifi Station Fiber Optic yang memiliki kecepatan jauh lebih baik dan aman sehingga memudahkan Perangkat Daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi manajemen | b. Belum dilengkapinya penerapan Manajemen Perubahan yang tertuang di dalam Peta Rencana SPBE. Penerapan Manajemen Perubahan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Perubahan (KemenPANRB). |
| c. Adanya monitoring, evaluasi dan penilaian penyelenggaraan SPBE yang memudahkan Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE | c. Belum dilengkapinya Peta Rencana SPBE yang masih berlaku yang didalamnya tertuang tentang Kompetensi SDM SPBE dan Manajemen Perubahan. |
| d. Adanya komitmen BSSN untuk mensupport keamanan sistem informasi di daerah | d. Belum dilengkapinya pedoman manajemen Layanan SPBE untuk pelaksanaan Manajemen Layanan. |

Solusi :

1. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM terkait untuk mengelola dan mengimplementasikan kebijakan SPBE secara lebih efektif.
2. Meningkatkan koordinasi antara berbagai unit kerja untuk memastikan integrasi yang lebih baik dalam tata kelola SPBE.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan penyedia Bandwitch untuk peningkatan kualitas akses internet Perangkat Daerah.
4. Penguatan mekanisme pelaporan dan komunikasi, mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek manajemen risiko dan keamanan informasi, menyediakan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam pengembangan aplikasi dan layanan, serta mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dan meningkatkan penggunaan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efektif.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas teknologi informasi dan persandian daerah, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Aplikasi Informatika	Rp. 1.263.985.236	Rp. 1.244.069.136	98,42
Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.263.985.236	Rp. 1.244.069.136	98,42

a. Pengembangan dan Pengelolaan SD TIK Pemerintah Daerah	Rp.	1.263.985.236	Rp.	1.220.236.676	98,67
b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp.	27.267.460	Rp.	23.832.460	87,40
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	14.946.330	Rp.	8.584.600	57,44
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	14.946.330	Rp.	8.584.600	57,44
a. Penyediaan Layanan Keamanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	14.946.330	Rp	8.584.600	57,44



Gambar 3.2. Workshop Tim Tanggap Insiden Siber (CsIRT) dalam mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024



SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral

Indikator : Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online

Target : 82%

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 pada sasaran Strategis 3, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tata kelola data menjadi penting seiring meningkatnya volume data dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi pun turut memberi pengaruh terhadap kecepatan, validitas dan penyediaan data yang up to date. Demikian pula kecepatan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi pembangunan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis pemerintahan pembangunan, membutuhkan ketersediaan data yang

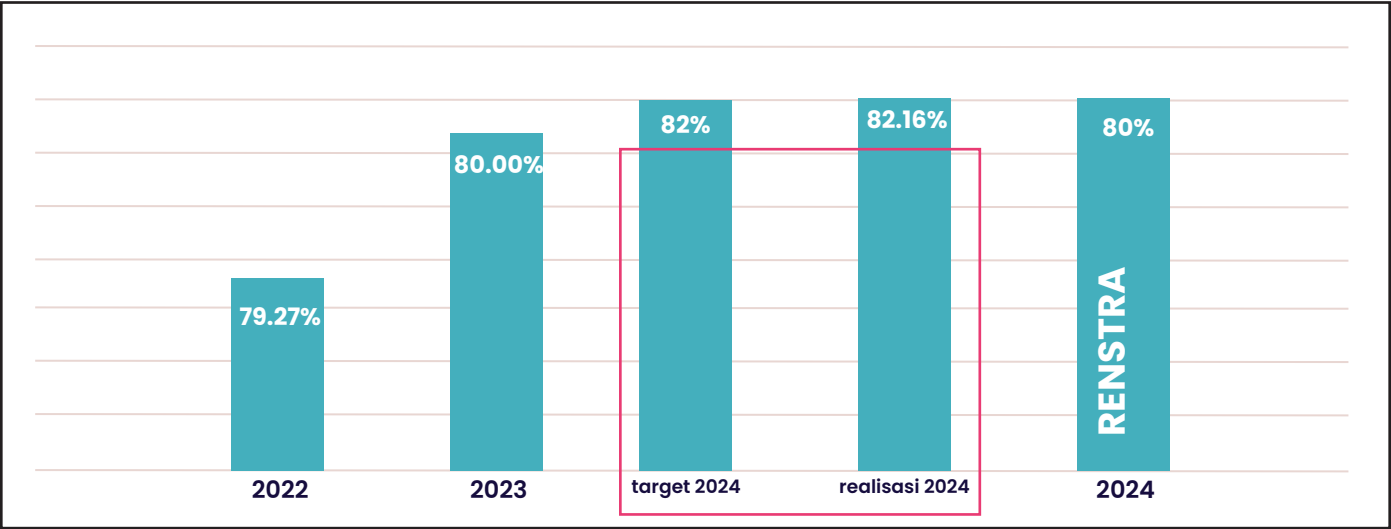
cepat, akurat dan kekinian. Olehnya itu, Dinas KominfoSP merupakan Perangkat Daerah yang memastikan tercapainya sasaran meningkatnya kualitas data statistik daerah.

Adapun capaian kinerja sasaran 'Meningkatnya Kualitas Data Statistik sektoralTahun 2024 dan perbandingan degan tahun – tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada Chart berikut ini :

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online	82%	82,16%	100,20%

Chart 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Data Statistik SektoralPemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Target dengan Realisasi 2024, 2022-2023 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Statistik Dinas KominfoSP, Januari 2025

**Capaian Kinerja
target-realisasi 2024**

 = 82,16%
82% **100,20%**
**Capaian Kinerja
2022-2024,
Meningkat :**
2,89%
**Capaian Kinerja
target Akhir Renstra**

 = 82,16%
80% **102,7%**

Sebagaimana capaian kinerja yang tersaji pada Chart diatas, maka diketahui bahwa Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Data Statistik sektoral dengan indikator persentase data sektoral yang memenuhi standar data dan dapat diakses secara online untuk Tahun 2024 mencapai 82,16% data valid. Valid dalam pengertian ini adalah data yang disampaikan melalui aplikasi Polman Satu Data telah memiliki kelengkapan perhitungan yang memadai dan disampaikan (diinput) oleh pejabat yang membidangi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Kondisi capaian 82,16% ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 82% atau dengan capaian

realisasi 100,20%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 validitas data sektoral di angka 74,56%, capaian kinerja tahun 2023 meningkat signifikan 80%. Adanya peningkatan kapasitas SDM pengelola data, optimalnya pendampingan kepada Perangkat Daerah selaku produsen data, pemutakhiran aplikasi Polman Satu Data, terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan data sektoral serta kolaborasi dan koordinasi Pembina data, Koordinator forum satu data, walidata dan produsen data melalui forum satu data, dalam menetapkan strategi perbaikan tata Kelola data secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja pengelolaan data sektoral.

Sedangkan untuk pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP, realisasi kinerja 2024 ini sudah melebihi 102,7 % dari target 80% yang ditentukan tahun 2024. Adapun kondisi pemenuhan data sektoral berdasarkan urusan pemerintahan daerah, dapat diamati pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Pemenuhan Data Sektoral Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Urusan	Jumlah Data	Data Terinput	Data Lengkap Penunjang	%
1	Sekretariat Daerah	152	123	123	80,92
2	Sekretariat DPRD	13	9	9	69,23
3	Inspektorat	57	53	53	92,98
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206	140	140	67,96
5	Dinas Kesehatan	174	125	125	71,84
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	131	121	121	92,37
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	69	49	49	71,01
8	Dinas Sosial	75	69	69	92,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36	31	31	86,11
10	Satuan Polisi Pamong Praja	51	43	43	84,31
11	Dinas Perhubungan	51	45	45	88,24
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	69	59	59	85,51
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	68	50	50	73,53
14	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	84	81	81	96,43
15	DP2KBP3A	111	88	88	79,28
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	74	74	74	100
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	72	66	66	91,67

18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71	47	47	66,20
19	Dinas Pertanian dan Pangan	216	178	178	82,41
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	72	52	52	72,22
21	Dinas Perindagkop dan UKM	65	62	62	95,38
22	Dinas Transnaker dan ESDM	117	101	101	86,32
23	Balitbangren	64	59	59	92,19
24	Badan Keuangan	57	44	44	77,19
25	Badan Pendapatan	48	39	39	81,25
26	BKPP	40	33	33	82,50
27	Bakesbangpol	40	35	35	87,50
28	BPBD	38	31	31	81,58
Jumlah		2.321	1.907	1.907	82,16

Sumber : Bidang Statistik Dinas KominfoSP, Januari 2025

Melalui inovasi Polman Satu Data sebagai sebuah aplikasi berbasis web ini, Perangkat Daerah sebagai produsen data sektoral dapat melakukan pengelolaan data dengan lebih tertib, up to date dan valid. Publik juga dapat mengakses data sektoral ini dengan lebih mudah dan cepat dengan mengunjungi situs www.satudata.polmankab.go.id. Disisi lain, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan data di setiap perangkat daerah sampai dengan ke tingkat satuan kerja terkecil di setiap perangkat daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pembinaan, baik berupa pemberian penghargaan Data Award setiap Tahun pada perangkat daerah dengan kinerja Pengelolaan Data Terbaik, serta melakukan upaya-upaya pendampingan perbaikan kualitas data sektoral termasuk pemberian sanksi.

Untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kesepakatan antar penyelenggara statistik sektoral terhadap kebutuhan data yang akan datang telah dilakukan pertemuan Forum Satu Data tingkat Kabupaten Polewali Mandar yang dihadiri oleh Pembina Data, Koordinator Forum Satu Data, Wali Data dan Wali Data Pendukung serta Produsen Data.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

- Adanya kebijakan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Tersedianya kebijakan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi Pembina data, walidata dan produsen data melalui forum satu data.
- Meningkatnya perhatian publik terhadap ketersediaan data sektoral yang memadai.

Faktor Penghambat :

- Aplikasi Polman Satu Data terkendala pada saat maintenance
- Aplikasi Polman Satu Data tidak mudah diakses pada saat PDN terkena serangan siber
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan statistik yang diperlukan pada prinsip satu data yang berkualitas yaitu : memenuhi standar data, dilengkapi dengan metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas, menggunakan kode referensi dan data induk.
- Belum efektifnya penerapan sanksi bagi pemangku data yang tidak mampu menyediakan data sesuai standar data yang ditetapkan.

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga penyedia aplikasi Polman Satu Data
- Meningkatkan Koordinasi dengan bidang terkait pada Pusat Data Nasional Kemenkominfo
- Meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan data sectoral baik dalam penyediaan, pengolahan, penginputan termasuk pemanfaatan aplikasi Polman Satu Data
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas aplikasi Polman Satu Data
- Menyelenggarakan pembinaan berupa monitoring, evaluasi, dan penilaian bagi Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Data Terbaik Tahun 2024

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas data sektoral, sebagai berikut:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 58.404.382	Rp. 35.517.982	61,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 58.404.382	Rp. 35.517.982	61,00
a. Koordinasi sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Rp. 45.310.542	Rp. 22.424.142	49,00
b. Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp. 13.093.840	Rp. 13.093.840	100



Gambar 3.3 Forum Satu Data Tingkat Kab.Polewali Mandar 2024



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah
Target : A (89,50)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (89,66)	A (89,50)	100,17%

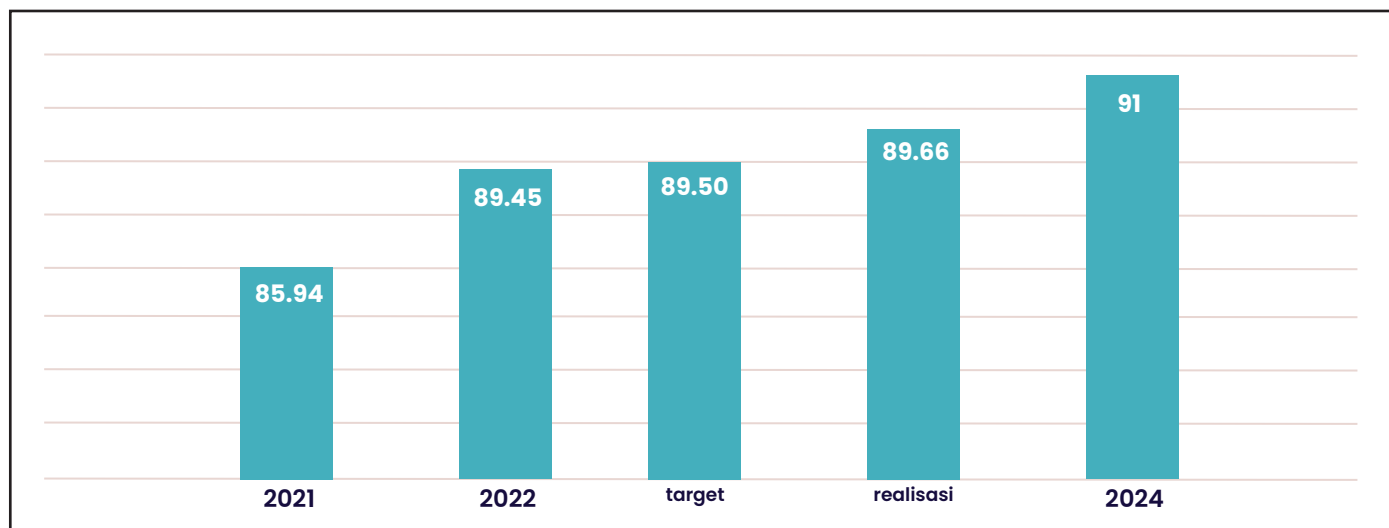
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian

pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat.

Adapun capaian hasil evaluasi SAKIP Dinas KominfoSP, pada tabel berikut :

Komponen SAKIP	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	28,80	30,00	30,00
Pengukuran Kinerja	22,19	22,50	22,50
Pelaporan Kinerja	12,31	13,38	13,38
Evaluasi Internal	8,14	7,08	7,28
Capaian Kinerja	14,50	16,50	16,50
Nilai	85,94	89,45	89,66
Predikat	A	A	A

Chart 3.6
Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2022–2024



Sumber : Sekretariat Dinas KominfoSP, Januari 2025

**Capaian Kinerja
target–realisasi 2024**

= 89,66
89,50 **104,17**

**Capaian Kinerja
2022–2024,
Meningkat :**

3,72 POINT

**Capaian Kinerja
target Akhir Renstra**

= 89,66
91 **98,52**

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas KominfoSP sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas KominfoSP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2022, Predikat A (85,94%) juga dicapai signifikan dengan adanya komitmen tinggi pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP. Hal ini turut mempengaruhi keterlibatan semua pihak pada internal Dinas, untuk meningkatkan nilai SAKIP dan bekerjasama untuk mencapai

tujuan SAKIP. Capaian (89,45%) Predikat A dicapai tahun 2023 dan capain (89,66) Predikat A 2024 dipengaruhi komitmen pimpinan dalam penguatan koordinasi internal Dinas, kepada para pemangku SAKIP melalui rapat-rapat internal Dinas dengan memperhatikan capain realisasi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan setiap triwulan, dan secara nyata berpengaruh terhadap perbaikan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan serta pengukuran kinerja.

Sedangkan untuk pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP, realisasi kinerja 2024 ini sudah mencapai 98,52 % dari target 91 % yang ditentukan tahun 2024.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

- Tersedianya aplikasi e-SAKIP terintegrasi

Faktor Penghambat :

- Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja

Solusi :

- Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Organisasi dan Balitbangren dalam rangka penguatan pengelolaan data kinerja

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.579.800	35.579.800	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.352.678	2.352.678	100
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.402.730	5.402.730	100
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.449.010	3.449.010	100
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.360.660	6.360.660	100



Gambar 3.4. Rapat Evaluasi Kinerja Pemangku SAKIP Dinas KominfoSP Terkait Pencapaian Target Kinerja 2024



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Target : 100

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

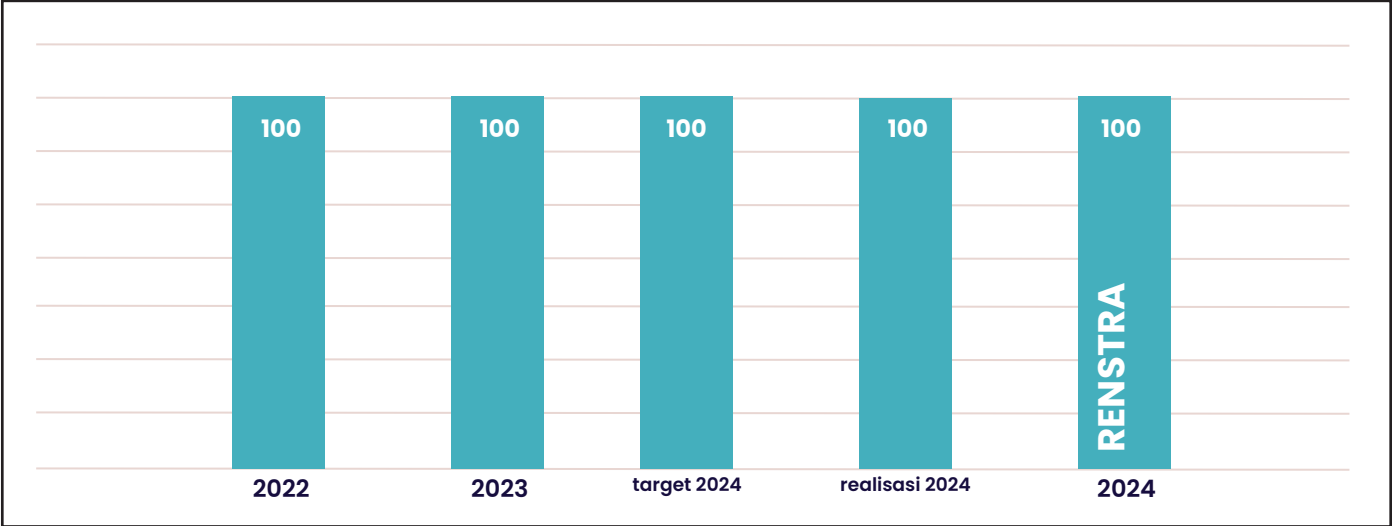
Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%	100

Laporan keuangan Dinas KominfoSP bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan anggaran. Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas KominfoSP turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian

Opini BPK, maka diharapkan pencapaian WTP Tahun 2024 dapat kembali dicapai. Dalam hal ini Dinas KominfoSP optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Chart 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas KominfoSP Tahun 2024 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2024, 2022-2023 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Sekretariat Dinas KominfoSP, Januari 2024

Capaian Kinerja target-realisasi 2024

= 100

100

100%

Capaian Kinerja 2022-2024, Meningkat :

0 POINT

Capaian Kinerja target Akhir Renstra

= 100

100

100%

Mencermati perkembangan capaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas KominfoSP sebagaimana tersaji pada chart 3.7 di atas, kualitas pengelolaan keuangan aset Dinas KominfoSP setiap tahunnya pada kisaran peningkatan yang sama. Pengelolaan keuangan dan aset tahun 2022, dicapai (100%), capaian ini dipengaruhi optimalnya tertib administrasi aset internal Dinas. Tahun 2023, capaian pengelolaan keuangan dan aset dicapai (100%). Hal ini dipengaruhi meningkatnya tertib administrasi aset dan peningkatan tertib administrasi keuangan dan pengarsipan. Capaian pengelolaan keuangan dan aset tahun 2024 juga dapat dicapai (100%) dengan adanya pemanfaatan aplikasi aset BMD serta aplikasi penatausahaan keuangan yang lebih mutakhir serta dukungan tinggi pimpinan dan jajaran internal dinas dalam mendukung penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset BMD yang transparan dan akuntabel yang diwujudkan melalui rapat-rapat koordinasi di internal dinas yang melibatkan pimpinan dan para pengelola keuangan dan aset BMD secara intens.

Sedangkan untuk pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP, realisasi kinerja 2024 ini sudah mencapai 100 % dari target 100 % yang ditentukan tahun 2024.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

- a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas KominfoSP untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur
- b. Tersedianya aplikasi SIM Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah

Faktor Penghambat :

- a. Minimnya SDM Pengelola Keuangan
- b. Minimnya SDM pengelola Asset BMD

Solusi :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan aset BMD
- b. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.575.506.045	1.573.936.612	99,90
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.082.067	7.082.067	100
- Penyusunan Laporan Keuangan Berkala	4.116.258	4.116.258	100
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.564.307.720	1.562.738.287	99,90



Gambar 3.5. Penguatan Rapat koordinasi Triwulan internal Dinas KominfoSP oleh Pengelola Aset dan Keuangan terkait capaian kinerja dan realisasi keuangan 2024.



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

Target : Sangat Baik (98,85)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Sangat Baik (98,85)	Sangat Baik (99,21)	100,36%

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas KominfoSP, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas KominfoSP semakin membaik. Terdapat 9 (sembilan) layanan Dinas KominfoSP yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, sebagai berikut :

1. Layanan peliputan
2. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR)
3. Keterbukaan Informasi publik
4. Pemeliharaan jaringan TIK
5. Fasilitasi pendampingan pengelolaan aplikasi TIK
6. Fasilitasi pengelolaan website satuan kerja
7. Layanan pusat data (server) TIK
8. Layanan fasilitasi video conference
9. Layanan penyajian infografis data sektoral

Adapun capaian hasil survei pelayanan publik Dinas KominfoSP, pada tabel berikut :

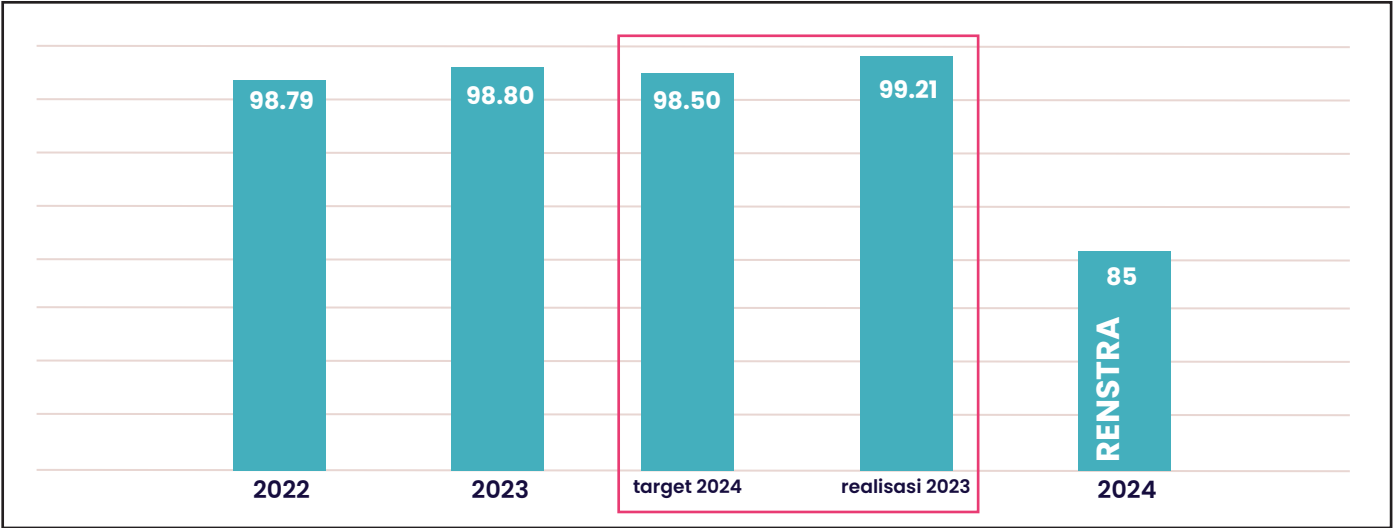
No	Layanan Yang Disurvei	Nilai Survei									
		Layanan Peliputan	LAPOR	Keterbukaan Informasi Publik	Pemeliharaan Jaringan TIK	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Aplikasi TIK	Fasilitasi Pengelolaan Website Satuan Kerja	Layanan Pusat Data (Server) TIK	Layanan Fsilitasi Vidoce Conference	Layanan Penyajian Infografis Data Sektoral	Jumlah
1.	Persyaratan	100	96,00	100	100	100	100	100	100	100	99,56
2.	Prosedur	100	96,00	100	100	100	100	100	100	98,00	97,67
3.	Waktu Pelayanan	100	90,00	100	98,00	100	100	100	98,96	97,00	99,33
4.	Biaya Tarif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,56
5.	Produk Layanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,78
6.	Kompetensi Pelaksana	100	100	100	100	100	100	100	100	99,00	99,78
7.	Perilaku Pelaksana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,56
8.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	100	90,00	96,00	99,00	100	100	100	100	100	99,66
9.	Sarana dan Prasarana	96,00	97,00	98,00	100	98,00	98,00	96,00	98,00	97,00	99,00
Nilai rata-rata Kepuasan Pengguna Layanan											99,21%
Rata-rata IK		99,21									
Predikat Kinerja Layanan											
Tidak Baik			Kurang Baik				Baik			Sangat Baik	
25 – 43,75			43,76 – 62,50				62,51 – 81,25			97,04 -100	

Mencermati Tabel dan Chart terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholders atas 9 jenis layanan Dinas KominfoSP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan berarti. Tahun 2022, nilai rata-rata survei kepuasan layanan (98,79%) predikat sangat baik. Kondisi ini didukung adanya kemudahan prosedur layanan serta dukungan internal dinas yang berkomitmen memberikan layanan terbaik. Selanjutnya capaian kinerja kepuasan pelayanan publik pada tahun 2023 mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2022 dengan predikat sangat baik, indeks (98,82%). Adanya dukungan teknologi informasi aplikasi e-survey kepuasan, kemudahan mengakses layanan serta kecepatan merespon layanan sangat berpengaruh nyata terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan. Predikat sangat baik, indeks kepuasan layanan (99,21%), Kembali dapat dicapai tahun 2024. Pengembangan aplikasi e-survey yang semakin mutakhir serta adanya peningkatan kualitas di semua unsur layanan, menjadi factor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna layanan.

Sedangkan untuk pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP, realisasi kinerja 2023 ini sudah mencapai 116,2 % dari target 85% yang ditentukan tahun 2024

Chart 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Dinas KominfoSP Tahun 2024 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2024, 2022-2023 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Sekretariat Dinas KominfoSP, Januari 2024

Capaian Kinerja target-realisasi 2024

= 99,21 / 98,50 **100,72%**

Capaian Kinerja 2022-2024, Meningkat :

0,42%

Capaian Kinerja target Akhir Renstra

= 99,21 / 85 **116,7%**

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

- a. Tingginya motivasi kerja Pegawai
- b. Adanya perkembangan teknologi dan informasi
- c. Meningkatnya perhatian perangkat daerah terhadap layanan yang disediakan Dinas KominfoSP

Faktor Penghambat :

- a. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak
- b. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan

Solusi :

- a. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai
- b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja

Sejumlah Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	630.388.340	535.136.097	84,88
Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah			
Penatausahaan BMD Pada SKPD	1.636.860	1.636.860	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.157.730	1.157.730	100
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	5.791.980	5.791.980	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.480.740	1.480.740	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.305.000	29.785.000	92,20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.529.053	9.049.053	54,75
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	1.440.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.900.200	73.983.149	60,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	49.953.777	40.118.585	80,31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000	302.500.000	91,67
Pemeliharaan BMD Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.193.000	39.193.000	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.000.000	29.000.000	100

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja

yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas KominfoSP, dapat disajikan sebagai berikut:



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2024, maka dapat diamati melalui Tabel berikut

Tabel 3.11
Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas KominfoSP Tahun 2024

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Predikat Keterbukaan Informasi Publik	92,50	93,37	100,94%	Rp 62.762.385	Rp 54.547.382	86,91	14,03	Program Informasi dan Komunikasi Publik
2	Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemerintahan Berbasis Elektronik Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	3,5	3,89	111,14%	Rp 1.278.931.566	Rp 1.252.653.736	97,94	13,2	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
3	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online	82	82,16	100,20%	Rp 58.404.382	Rp 35.517.982	61,00	39,2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Predikat SAKIP Perangkat Daerah	89,50	89,66	100,17%	Rp 17.565.078	Rp 17.565.078	100	0,17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100	100	100%	Rp 1.575.506.045	Rp 1.573.936.612	99,90	0,1	
	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	98,85	99,21	100,36%	Rp 630.388.340	Rp 535.136.097	84,88	15,48	
JUMLAH				102,13	Rp 3.623.527.796	Rp 3.469.356.887	95,74	13,6	

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2024 sebesar 102,13%, maka hal ini menunjukkan terjadinya efisiensi penggunaan dana sebesar 13,6%. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 95,71% telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 102,13%.

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Dinas KominfoSP Tahun 2024, dilakukan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Mencermati tabel nilai efisiensi pada akuntabilitas kinerja di atas, secara umum

dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya Dinas KominfoSP tahun 2024 adalah **efisien**, karena seluruh realisasi kinerja **terealisasi melebihi target (kinerja 102,13%)** dengan realisasi anggaran **95,74%**.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas KominfoSP sehingga efisiensi sumber daya tahun 2024 dapat dilakukan, antara lain :

1. Komitmen pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik fisik maupun keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Terbangunnya pemahaman di seluruh level internal Dinas, terkait target kinerja yang harus dicapai, dengan menghasilkan kinerja berorientasi hasil yang berdaya guna.
3. Adanya pembagian kerja yang nyata dan jelas di setiap unit kerja, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan direview secara berkala oleh pimpinan.

04 **PENUTUP**

Terima
Kasih

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tahun 2024. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Renstra 2019–2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2024, secara keseluruhan dapat dinyatakan **“berhasil”**. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas KominfoSP sebesar **106,19%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **95,74%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas KominfoSP berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **13,6%**.

Namun, tidak dipungkiri masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

- a. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, melalui aplikasi e-PPID dan pengelolaan Website Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dalam merespon dan menindaklanjuti aduan dan aspirasi masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai dan aplikasi khusus serta pengembangan Server Pusat Pemerintah Daerah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik;
- d. Peningkatan keamanan informasi melalui pemanfaatan tanda tangan digital serta kerjasama dengan BSSN untuk kelayakan keamanan informasi sistem elektronik pemerintah daerah;
- e. Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan pengelolaan data sektoral di seluruh Perangkat Daerah untuk menghasilkan data yang lebih berkualitas, baik dalam aspek validitas, kekinian, ketepatan, kelengkapan serta kemudahan pemanfaatan Polman Satu Data.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Kepala Dinas KominfoSP



Dr. Aco Musaddad HM, M.Ag., M.Si



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK PERSANDIAN



Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.sp.polmankab.go.id email: dinaskominfo.sp@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar

Selanjutnya disebut **Pihak pertama**

Nama : **Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**
Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama,

Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19751006 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Menuju Informatif
2	Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	Terstandarisasi-Kolaborasi	Terstandarisasi-Kolaborasi
3	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online	80,00%	82,00%
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100,00%	100,00%
		Indeks Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 84.381.385	APBD
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 1.313.985.236	APBD
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 66.441.082	APBD
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 14.946.330	APBD
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.624.486.027	APBD
	JUMLAH	Rp 4.104.240.060	

Polewali, 23 Februari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,



Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA


KEPALA DINAS KOMINFO
STATISTIK DAN PERSANDIAN,

DI. ACO MUSADDAD, HM, M.Ag., M.Si
 Pengkaji Pembina
 NIP. : 19751006 201001 1 007

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, mengisyaratkan pentingnya membangun keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Disamping regulasi dimaksud, keterbukaan informasi juga merupakan bagian penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi publik dan berdampak pula pada pertumbuhan investasi di daerah.

Indikator Kinerja

Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Penentuan Predikat Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil evaluasi mandiri yang mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Berdasarkan hasil pengisian Kuisioner Mandiri, maka predikat keterbukaan informasi publik, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 97 – 100 : Informatif
- nilai 80 – 96 : Menuju Informatif
- nilai 60 – 79 : Cukup Informatif
- nilai 40 – 59 : Kurang Informatif
- nilai < 39> : Tidak Informatif

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, dilaksanakan sebagai berikut :

No.	Variabel Penilaian	Persentase
1.	Pengumuman melalui website	25%
2.	Pelayanan Informasi	30%
	2.1. Informasi Wajib Berkala	
	2.3. Informasi Tersedia Setiap Saat	
	2.4. Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan	
3.	Pendokumentasian	25%
4.	Pelayanan Informasi	20%
	Total	100%

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Dengan membaiknya predikat keterbukaan informasi publik, mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik	1. Nilai 97 - 100 : Informatif 2. Nilai 80 - 96 : Menuju Informatif 3. Nilai 60 - 79 : Cukup Informatif 4. Nilai 40 - 59 : Kurang Informatif 5. Nilai < 39 : Tidak Informatif	Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Tren keterbukaan Informasi publik meningkat signifikan setiap tahunnya. Target predikat keterbukaan informasi publik ditetapkan tahun 2024, Menuju informatif (94,00). Hal ini didasari capaian tahun 2023 (93,48) dan 2022 (92,38) menuju informatif.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis Berbasis Elektronik

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interview melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung. Peran pentingnya SPBE, diatur melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator Kinerja

Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses :

1. Rintisan :
Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc
2. Terkelola :
Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi
3. Terstandarisasi :
Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi
4. Terintegrasi dan Terukur :
Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan antar instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif
5. Optimum :
Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi :
Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah
2. Interaksi :
Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Transaksi :
Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4. Kolaborasi :
Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE Lain
5. Optimalisasi :
Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE	Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terstandarisasi 4. Terintegrasi dan Terukur 5. Optimum Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi : 1. Informasi 2. Interaksi 3. Transaksi 4. Kolaborasi 5. Optimalisasi	Kemenpan-RB

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE	Terstandarisasi Kolaborasi	Tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE menunjukkan tren positif setiap tahun, dengan tingkat kematangan 3,58; Terstandarisasi Kolaborasi (2022) dan tingkat kematangan 3,86; Terstandarisasi Kolaborasi (2023). Capaian ini menjadi dasar penetapan tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE 2024, Terstandarisasi Kolaborasi (3,70)

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral

Data Sektoral merupakan data yang diproduksi oleh perangkat daerah selaku produsen data berdasarkan urusan pemerintahan dan fungsi. Setiap data sektoral harus memenuhi standar data dan dapat diakses dengan mudah secara online. Perpres Nomor 39 tahun 2019 diterbitkan terkait kebijakan pengelolaan data. Perpres ini lahir dari dorongan terkait kebutuhan terhadap data yang valid dan akuntabel.

Indikator Kinerja

Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online.

Tata kelola data menjadi penting seiring meningkatnya volume data dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi pun turut memberi pengaruh terhadap kecepatan, validitas dan penyediaan data yang up to date. Kecepatan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi pembangunan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis pemerintahan dan pembangunan, membutuhkan ketersediaan data yang cepat, akurat dan kekinian. Melalui inovasi Polman Satu Data sebagai sebuah aplikasi berbasis web, Perangkat Daerah sebagai produsen data sektoral dapat melakukan pengelolaan data dengan lebih tertib, up to date dan valid

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Data sektoral yang memenuhi standar data dan mudah diakses secara online yang dihasilkan oleh produsen data mendorong peningkatan kualitas data statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara online}}{\text{Jumlah Data sektoral}} \times 100\%$	Bidang Statistik Dinas KominfoSP

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase data sektoral yang memenuhi standar data dan dapat diakses secara online	82%	Capaian pengelolaan data sektoral menunjukkan tren positif setiap tahun. Tahun 2022 dicapai (79,27%), 2023 (80%) Target 82% ditentukan tahun 2024, dengan mempertimbangkan jumlah elemen data pada semua Perangkat Daerah selaku produsen data

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 - 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 - 50	Bagian Organisasi Setda
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Diperoleh dengan mereview kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Dinas KominfoSP
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Nilai-nilai efesiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	$\frac{\text{Jumlah seluruh IKP layanan}}{\text{Jumlah layanan publik Dinas yang dilakukan survey kepuasan}} \times 100$	Sekretariat Dinas KominfoSP

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	Target SAKIP predikat A tahun 2024 optimis diraih Dinas KominfoSP, dengan melihat Capaian SAKIP Dinas KominfoSP dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2021(Predikat A; 82,76), tahun 2022 (Predikat A;85,94).
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	100%	Target 100% pengelolaan keuangan dan aset Dinas KominfoSP menjadi target 2024. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas KominfoSP menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2021 (100%), 2022 (100%).

3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Sangat Baik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Dinas KominfoSP yang menyediakan 9 (sembilan) unsur layanan, juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Capaian IKM 2021 (Predikat Sangat Baik; 97,04), serta 2022 (Predikat Sangat Baik; 98,79). Dengan tren positif setiap tahunnya, IKM optimis ditargetkan predkat sangat baik setiap tahunnya.
---	--	-------------	--

Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024



PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA

SECARA BERKALA BERJENJANG

TRIWULAN I TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Polewali, 02 April 2024

Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Anggaran

Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah					
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian																						
	Sasaran Renstra :																					
	Meningkatnya kapabilitas proses dan fungsi teknis pemerintahan berbasis elektronik																					
	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	predikat	Terstandarisasi Kolaborasi																			
	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral																					
	Persentase Data Sektoral yang memenuhi standar data dan dapat diakses secara online	persen	82																			
	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik																					
	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	predikat	Menuju Informatif																			
	Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas																					
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas	predikat	Sangat Baik			Sangat Baik										sangat Baik	95.54					
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	predikat	A													0	0					
	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	persen	100																			

Catatan Evaluasi Saat ini

- 1. e-PPID belum optimal dimanfaatkan untuk permohonan informasi oleh masyarakat
- 2. Belum seluruh Aduan masyarakat memenuhi standar aduan yang memadai
- 3. Perangkat Daerah belum optimal dalam pemetaan data sectoral terkait cakupan tugas dan fungsinya

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

- 1. Sosialisasi pemanfaatan e-PPID oleh masyarakat melalui media sosial, banner dan pengumuman di website
- 2. Sosialisasi tata cara penyampaian aduan yang baik melalui iklan motion grafis, sosialisasi di media sosial dan pengumuman di website
- 3. Pendampingan lanjutan pemanfaatan aplikasi V3 Polman Satu Data

Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Humas 1

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Humas 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pranata Humas 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya kualitas media informasi publik perangkat daerah																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaanwebsite, e-PPID, Lapor dan Media Sosial	OPD	27			3										3	10.71
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Optimalnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah																	
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	dokumen	4			1										1	25
	Optimalnya layanan informasi publik pemerintah daerah dan perangkat daerah																	
		Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	dokumen	2														

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Peningkatan peran dan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik
2. Upgrade secara berkala sarana utama layanan informasi publik
3. Peningkatan kapasitas admin LAPOR Perangkat Daerah

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Implementasi standar layanan public pada OPD dilaksanakan secara berkala setiap tahun
2. Monitoring evaluasi terhadap keterbukaan informasi public ditingkatkan secara berkala
3. Email admin LAPOR dan PPID diupayakan menggunakan email tetap

Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Komputer 1

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

[illegible]

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Komputer 2

Pengukuran Kinerja		Pengukuran Anggaran		Kendala dan Solusi													
Tidak Ada Target		0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%		Melebihi Target >100%								
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pranata Komputer 2																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi																
		Jumlah area keamanan informasi yang tertangani	area	6													
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Tersedianya kebijakan dan tata kelola keamanan informasi																
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	OPD	28													

Catatan Evaluasi Saat ini

- 1. Belum optimalnya aplikasi yang terintegrasi
- 2. Belum optimalnya fungsi utama Perangkat Daerah
- 3. Masih ada sejumlah kecamatan yang belum mendapatkan akses internet karena kendala infrastruktur jaringan

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

- 1. Koordiansi pengembangan aplikasi agar dapat online, interaktif, terintegrasi utamanya untuk perencanaan penganggaran, aset, dan akuntansi pelaporan
- 2. Koordinasi pemakaian aplikasi berbagai pakai
- 3. Peningkatan kapasitas data center untuk melayani kebutuhan aplikasi

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Statistik

[illegible]

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Statistisi 1

[illegible]

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Statistisi 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Statistisi 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Sektoral Perangkat Daerah																	
		Jumlah Elemen Data Sektoral Yang dilengkapi standar data dan metadata	elemen data	1,500														
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral																	
		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral	dokumen	2														

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data belum memenuhi standar data tidak dilengkapi dengan metadata
2. Pengumpulan data masih menunggu updating dari Balitbangren selaku koordinator data
3. Maintenance Aplkasi Polman Satu Data

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah agar data yang dihasilkan memenuhi standar data dan dapat menyertakan Metadata setiap data yang dihasilkan
2. Pendampingan pemenuhan dan validasi data dilaksanakan secara berkelanjutan
3. Koordinasi dengan pihak ketiga terkait pemeliharaan Aplikasi Polman Satu Data

Polewali, 02 April 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian



Dr. Aco Musaddad HM, M.Ag., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19751006 201001 1 007

PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA

SECARA BERKALA BERJENJANG

TRIWULAN II TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Polewali, 02 Juli 2024

Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Pengukuran Kinerja																				Pengukuran Anggaran					Kendala dan Solusi						
Tidak Ada Target				0 - 49.99%				50 - 64.99%				65 - 74.99%				75 - 89.99%				90 - 99.99%				Tercapai 100%				Melebihi Target >100%			
Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target														Kinerja(%)												
					1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11	12		Jumlah											
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian																															
	Sasaran Renstra :																														
	Meningkatnya kapabilitas proses dan fungsi teknis pemerintahan berbasis elektronik																														
		Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	predikat	Terstandarisasi Kolaborasi																											
	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral																														
		Persentase Data Sektoral yang memenuhi standar data dan dapat diakses secara online	persen	82							1,67							1.67	2.04												
	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik																														
		Predikat Keterbukaan Informasi Publik	predikat	Menuju Informatif																											
	Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas																														
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas	predikat	Sangat Baik			Sangat Baik			Sangat Baik							Sangat Baik	95.37													
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	predikat	A						A							89.66	100,17													
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	persen	100																											

Catatan Evaluasi Saat ini

- 1. PPID Pembantu belum optimal dalam upload data ke e-PPID
- 2. Aplikasi yang tersedia belum berbasis fungsi
- 3. Produsen Data belum seluruhnya menyediakan data yang telah diupdating

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

- 1. Koordinasi dengan admin PPID Perangkat Daerah
- 2. Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan aplikasi berbasis fungsi
- 3. Pendampingan kepada Perangkat Daerah selaku produsen data

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Pengukuran Kinerja																		Pengukuran Anggaran																		Kendala dan Solusi																	
Tidak Ada Target						0 - 49.99%						50 - 64.99%						65 - 74.99%						75 - 89.99%						90 - 99.99%						Tercapai 100%						Melebihi Target >100%											
Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan				Indikator												Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)																						
																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah																					
Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik																																																					
	Sasaran Program :																																																				
	Meningkatnya kualitas tata kelola informasi dan komunikasi perangkat daerah																																																				
					Persentase Perangkat Daerah yang cukup informatif dan komunikatif												persen	96,42			11.11				40.74										40.74	41.39																	

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Humas 1

Pengukuran Kinerja																		
Pengukuran Kinerja		Pengukuran Anggaran					Kendala dan Solusi											
Tidak Ada Target		0 - 49.99%		50 - 64.99%		65 - 74.99%		75 - 89.99%		90 - 99.99%		Tercapai 100%			Melebihi Target >100%			
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pranata Humas 1																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya kualitas media informasi publik perangkat daerah																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaanwebsite,e-PPID, Lapor dan Media Sosial	OPD	27			3			11						14	10.71	
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Optimalnya layanan aspirasi dan pengaduan publik																	
		Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	dokumen	2						1						1	50	

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Humas 2

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Pranata Humas 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya kualitas media informasi publik perangkat daerah																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website, e-PPID, Lapor dan Media Sosial	OPD	27			3			11							14	10.71
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Optimalnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah																	
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	dokumen	4			1			1							2	50
	Optimalnya layanan informasi publik pemerintah daerah dan perangkat daerah																	
		Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	dokumen	2						1							1	50

Catatan Evaluasi Saat ini

- 1. Peningkatan peran dan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik
- 2. Upgrade secara berkala sarana utama layanan informasi publik
- 3. Peningkatan kapasitas admin LAPOR Perangkat Daerah

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

- 1. Implementasi standar layanan public pada OPD dilaksanakan secara berkala setiap tahun
- 2. Monitoring evaluasi terhadap keterbukaan informasi public ditingkatkan secara berkala
- 3. Email admin LAPOR dan PPID diupayakan menggunakan email tetap

Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Komputer 1

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pranata Komputer 1																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi																	
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	99														
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Tersedianya kebijakan, tata kelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik																	
		Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	unit	99						98							98	98.99
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																	
		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Perangkat Daerah	dokumen	2						1							1	50

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Komputer 2

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Pranata Komputer 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi																	
		Jumlah area keamanan informasi yang tertangani	area	6														
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Tersedianya kebijakan dan tata kelola keamanan informasi																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	OPD	28														

Catatan Evaluasi Saat ini

- 1. Dalam Penyelenggaraan keamanan informasi, kapasitas SDM masih terbatas
- 2. Data yang dikelola sudah terlindungi, selanjutnya mencegah dari serangan atau kebocoran data
- 3. Masih ada sejumlah kecamatan yang belum mendapatkan akses internet karena kendala infrastruktur jaringan

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

- 1. Peningkatan kapasitas SDM persandian
- 2. Peningkatan kapasitas data center untuk melayani kebutuhan aplikasi
- 3. Dukungan penganggaran untuk pemenuhan akses internet Kecamatan

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Statistik

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Anggaran

Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Kepala Bidang Statistik																		
	Sasaran Program :																	
	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral																	
		Persentase data sektoral yang valid	persen	82						1.67							1.67	2.04

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Statistisi 1

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Anggaran

Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Statistisi 1																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Sektoral Perangkat Daerah																	
		Jumlah Elemen Data Sektoral Yang dilengkapi standar data dan metadata	elemen data	1,500						25							25	1.67
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Tersedianya sistem Informasi Satu Data																	
		Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	dokumen	1						1							1	25

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Statistisi 2

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Statistisi 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Sektoral Perangkat Daerah																	
		Jumlah Elemen Data Sektoral Yang dilengkapi standar data dan metadata	elemen data	1,500						25							25	1.67
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral																	
		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral	dokumen	2						2							2	25

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data belum memenuhi standar data tidak dilengkapi dengan metadata
2. Pemanfaatan aplikasi Polman Satu Data terkendala maintenace

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Koordinasi kepada Perangkat Daerah agar data yang dihasilkan memenuhi standar data dan dapat menyertakan Metadata setiap data yang dihasilkan
2. Koordinasi dengan pihak ketiga penyedia Aplikasi Polman Satu Data

Polewali, 02 Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian



Dr. Aco Musaddad HM, M.Ag., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19751006 201001 1 007

PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA

SECARA BERKALA BERJENJANG

TRIWULAN III TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Polewali, 02 Oktober 2024

Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Pengukuran Kinerja		Pengukuran Anggaran		Kendala dan Solusi															
Tidak Ada Target		0 - 49.99%		50 - 64.99%		65 - 74.99%		75 - 89.99%		90 - 99.99%		Tercapai 100%		Melebihi Target >100%					
Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target														Kinerja(%)
					1	2	3		4	5	6		7	8	9		10	11	
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian																			
	Sasaran Renstra :																		
	Meningkatnya kapabilitas proses dan fungsi teknis pemerintahan berbasis elektronik																		
		Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	predikat	Terstandarisasi Kolaborasi															
	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral																		
		Persentase Data Sektoral yang memenuhi standar data dan dapat diakses secara online	persen	82							1,67				186			221	
	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik																		
		Predikat Keterbukaan Informasi Publik	predikat	Menuju Informatif															
	Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas																		
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas	predikat	Sangat Baik			Sangat Baik				Sangat Baik				Sangat Baik			Sangat Baik	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	predikat	A							A							89.66	
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	persen	100															

Catatan Evaluasi Saat ini

- 1. Aplikasi yang tersedia belum berbasis fungsi
- 2. Adanya serangan Siber PDN mempengaruhi upload data PPID Pembantu
- 3. Aplikasi Polman Satu Data maintenance berkala, mempengaruhi upload data produsen data

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

- 1. Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan aplikasi berbasis fungsi Kepada Perangkat Daerah
- 2. Koordinasi dengan PDN Kemenkominfo
- 3. Koordinasi dengan pihak ketiga penyedia Aplikasi Polman Satu Data

Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Humas 1

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Pranata Humas 1																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya kualitas media informasi publik perangkat daerah																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaanwebsite,e-PPID, Lapor dan Media Sosial	OPD	27			3			11			10			24	85,71	
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Optimalnya layanan aspirasi dan pengaduan publik																	
		Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	dokumen	2						1						1	50	

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Humas 2

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pranata Humas 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya kualitas media informasi publik perangkat daerah																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaanwebsite,e-PPID, Lapor dan Media Sosial	OPD	27			3			11			10				24	85.71
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Optimalnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah																	
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	dokumen	4			1			1			1				3	75
	Optimalnya layanan informasi publik pemerintah daerah dan perangkat daerah																	
		Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	dokumen	2						1							1	50

Catatan Evaluasi Saat ini

- 1. Peningkatan peran dan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik
- 2. Back up server pusat data

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

- 1. Monitoring evaluasi terhadap keterbukaan informasi public ditingkatkan secara berkala
- 2. Dukungan penganggaran untuk pengadaan back up server data

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Anggaran

Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian																		
	Sasaran Program :																	
	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik																	
		Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik	persen	82,50						81.66			82.5				82.5	100
	Meningkatnya Keamanan TIK Perangkat Daerah																	
		Persentase TIK Yang Didukung Keamanan Informasi Yang Memadai	persen	33,00									33.33				33.33	101.01

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Komputer 1

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pranata Komputer 1																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi																	
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	99						98			1				99	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Tersedianya kebijakan, tata kelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik																	
		Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	unit	99						98			1				99	100
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																	
		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Perangkat Daerah	dokumen	2						1							1	50

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Komputer 2

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Pranata Komputer 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi																	
		Jumlah area keamanan informasi yang tertangani	area	6									6				6	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Tersedianya kebijakan dan tata kelola keamanan informasi																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	OPD	28									28				28	100

Catatan Evaluasi Saat ini

- 1. Belum optimalnya aplikasi yang terintegrasi
- 2. Belum optimalnya fungsi utama Perangkat Daerah
- 3. Masih ada sejumlah kecamatan yang belum mendapatkan akses internet karena kendala infrastruktur jaringan

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

- 1. Koordiansi pengembangan aplikasi agar dapat online, interaktif, terintegrasi utamanya untuk perencanaan penganggaran, aset, dan akuntansi pelaporan
- 2. Koordinasi pemakaian aplikasi berbagai pakai
- 3. Peningkatan kapasitas data center untuk melayani kebutuhan aplikasi

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Statistik

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Kepala Bidang Statistik																		
	Sasaran Program :																	
	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral																	
		Persentase data sektoral yang valid	persen	82						1.67			14.73				16.4	17.96

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Statistisi 1

Pengukuran Kinerja		Pengukuran Anggaran		Kendala dan Solusi													
Tidak Ada Target		0 - 49.99%		50 - 64.99%		65 - 74.99%		75 - 89.99%		90 - 99.99%		Tercapai 100%		Melebihi Target >100%			
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Statistisi 1																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Sektoral Perangkat Daerah																
		Jumlah Elemen Data Sektoral Yang dilengkapi standar data dan metadata	elemen data	1,500						25			196			221	14.73
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Tersedianya sistem Informasi Satu Data																
		Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	dokumen	1						1						1	25

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Statistisi 2

Pengukuran Kinerja																	Pengukuran Anggaran																	Kendala dan Solusi																																																																																																					
Tidak Ada Target																	0 - 49.99%																	50 - 64.99%																	65 - 74.99%																	75 - 89.99%																	90 - 99.99%																	Tercapai 100%																	Melebihi Target >100%																
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target														Kinerja(%)																																																																																																																				
					123456789101112Jumlah																																																																																																																																		
Statistisi 2																																																																																																																																							
	Sasaran Kegiatan :																																																																																																																																						
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Sektoral Perangkat Daerah																																																																																																																																						
		Jumlah Elemen Data Sektoral Yang dilengkapi standar data dan metadata															elemen data	1,500					25			196				221	14.73																																																																																																								
	Sasaran Sub-Kegiatan :																																																																																																																																						
	Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral																																																																																																																																						
		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral															dokumen	2					2						2	50																																																																																																									

PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA

SECARA BERKALA BERJENJANG

TRIWULAN IV TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Polewali, 02 Januari 2025

Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

[illegible]

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Antisipasi serangan siber pada PDN
2. Kapasitas SDM Pengelola SPBE belum merata pada Perangkat Daerah
3. Antisipasi maintenance berulang pada aplikasi Polman Satu Data

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Dukungan penganggaran untuk backup data server pusat data
2. Penguatan kapasitas SDM Pengelola SPBE Perangkat Daerah
3. Perbaharui penyedia layanan Aplikasi Polman Satu Data

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Pengukuran Kinerja		Pengukuran Anggaran		Kendala dan Solusi														
Tidak Ada Target		0 - 49.99%		50 - 64.99%		65 - 74.99%		75 - 89.99%		90 - 99.99%		Tercapai 100%		Melebihi Target >100%				
Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik																		
	Sasaran Program :																	
	Meningkatnya kualitas tata kelola informasi dan komunikasi perangkat daerah																	
		Persentase Perangkat Daerah yang cukup informatif dan komunikatif	persen	96,42			11.11			40.74			37.04			11.11	96.42	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Pranata Humas 1

Pengukuran Kinerja																		Pengukuran Anggaran																		Kendala dan Solusi																							
Tidak Ada Target																		0 - 49.99%						50 - 64.99%						65 - 74.99%						75 - 89.99%						90 - 99.99%						Tercapai 100%						Melebihi Target >100%					
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan																	Indikator																	Satuan	Target	Realisasi Target														Kinerja(%)								
																																					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah										
Pranata Humas 1																																																											
	Sasaran Kegiatan :																																																										
	Meningkatnya kualitas media informasi publik perangkat daerah																																																										
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaanwebsite,e-PPID, Lapor dan Media Sosial																	OPD	27			3			11			10			3	27	100																									
		Sasaran Sub-Kegiatan :																																																									
		Optimalnya layanan aspirasi dan pengaduan publik																																																									
		Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik																	dokumen	2						1						1	2	100																									

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Humas 2

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pranata Humas 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya kualitas media informasi publik perangkat daerah																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaanwebsite, e-PPID, Lapor dan Media Sosial	OPD	27			3			11			10			3	27	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Optimalnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah																	
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	dokumen	4			1			1			1			1	4	100
	Optimalnya layanan informasi publik pemerintah daerah dan perangkat daerah																	
		Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	dokumen	2						1						1	2	100

Catatan Evaluasi Saat ini

- 1. Peningkatan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik
- 2. Upgrade secara berkala sarana utama layanan informasi publik

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

- 1. Implementasi standar layanan public pada OPD dilaksanakan secara berkala setiap tahun
- 2. Monitoring evaluasi terhadap keterbukaan informasi public ditingkatkan secara berkala

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian

Pengukuran Kinerja																				Pengukuran Anggaran				Kendala dan Solusi							
Tidak Ada Target				0 - 49.99%				50 - 64.99%				65 - 74.99%				75 - 89.99%				90 - 99.99%				Tercapai 100%				Melebihi Target >100%			
Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan			Indikator												Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian																															
	Sasaran Program :																														
	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik																														
		Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik												persen	82,50						81.66			82.5				82.5	100		
	Meningkatnya Keamanan TIK Perangkat Daerah																														
		Persentase TIK Yang Didukung Keamanan Informasi Yang Memadai												persen	33,00								33.33				33.33	101.01			

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Komputer 1

Pengukuran Kinerja		Pengukuran Anggaran		Kendala dan Solusi														
Tidak Ada Target		0 - 49.99%		50 - 64.99%		65 - 74.99%		75 - 89.99%		90 - 99.99%		Tercapai 100%		Melebihi Target >100%				
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Pranata Komputer 1																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi																	
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	99						98			1			99	100	
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Tersedianya kebijakan, tata kelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik																	
		Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	unit	99						98			1			99	100	
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																	
		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Perangkat Daerah	dokumen	2						1						1	2	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pranata Komputer 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Pranata Komputer 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi																	
		Jumlah area keamanan informasi yang tertangani	area	6									6				6	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Tersedianya kebijakan dan tata kelola keamanan informasi																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	OPD	28									28				28	100

Catatan Evaluasi Saat ini

- 1. Kompetensi SDM SPBE belum memenuhi standar kompetensi SDM SPBE pada seluruh Perangkat Daerah
- 2. Belum dilengkapinya pedoman manajemen Layanan SPBE untuk pelaksanaan Manajemen Layanan

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

- 1. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM terkait untuk mengelola dan mengimplementasikan kebijakan SPBE secara lebih efektif
- 2. Penguatan mekanisme pelaporan dan komunikasi, mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Bidang Statistik

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Kepala Bidang Statistik																		
	Sasaran Program :																	
	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral																	
		Persentase data sektoral yang valid	persen	82						1.67			14.73			65.6	82.16	100.20

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Statistisi 1

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Statistisi 1																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Sektoral Perangkat Daerah																	
		Jumlah Elemen Data Sektoral Yang dilengkapi standar data dan metadata	elemen data	1,500						25			196			1,306	1,527	101.80
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Tersedianya sistem Informasi Satu Data																	
		Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	dokumen	1						1			1			1	1	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Statistisi 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Statistisi 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Sektoral Perangkat Daerah																	
		Jumlah Elemen Data Sektoral Yang dilengkapi standar data dan metadata	elemen data	1,500						25			196			1,306	1,527	101.80
		Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral																	
		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral	dokumen	2						2			2			2	2	100

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan statistik yang diperlukan pada prinsip satu data yang berkualitas
2. Belum efektifnya penerapan sanksi bagi pemangku data yang tidak mampu menyediakan data sesuai standar data yang ditetapkan

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan data sektoral baik dalam penyediaan, pengolahan, penginputan termasuk pemanfaatan aplikasi Polman Satu Data
2. Menyelenggarakan pembinaan berupa monitoring, evaluasi, dan penilaian bagi Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Data Terbaik Tahun 2024

Polewali, 02 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian



Dr. Aco Musaddad HM, M.Ag., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19751006 201001 1 007

Lampiran 3. Realisasi Anggaran Tahun 2024



LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN DESEMBER 2024

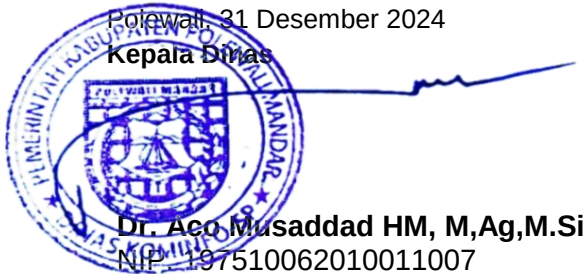
NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
<i>I</i>	2.16.01.2.01	PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.565.078	4.388.745	13.176.333	17.565.078	-
1	2.16.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.352.678	-	2.352.678	2.352.678	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.352.678	-	2.352.678	2.352.678	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
2	2.16.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	5.402.730	1.998.675	3.404.055	5.402.730	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	264.180	-	264.180	264.180	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.113.550	1.323.675	1.789.875	3.113.550	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	675.000	1.350.000	2.025.000	-
3	2.16.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.449.010	2.390.070	1.058.940	3.449.010	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	451.770	451.770	-	451.770	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.647.240	588.300	1.058.940	1.647.240	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-
4	2.16.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.360.660	-	6.360.660	6.360.660	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	162.060	-	162.060	162.060	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.173.600	-	4.173.600	4.173.600	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	2.025.000	2.025.000	-
<i>II</i>	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.575.506.045	1.453.278.613	120.657.999	1.573.936.612	1.569.433
1	2.16.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.082.067	-	7.082.067	7.082.067	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alata/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	243.090	-	243.090	243.090	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.463.977	-	3.463.977	3.463.977	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	3.375.000		3.375.000	3.375.000	-
2	2.16.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.564.307.720	1.450.930.048	111.808.239	1.562.738.287	1.569.433
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.170.321.951	1.086.860.351	83.461.600	1.170.321.951	-
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	107.100.222	99.472.128	7.628.094	107.100.222	-
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	98.994.900	92.229.900	6.765.000	98.994.900	-
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	30.240.000	28.080.000	2.160.000	30.240.000	-
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.035.000	29.120.000	2.215.000	31.335.000	700.000
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	63.802.020	58.442.940	4.490.040	62.932.980	869.040
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	2.728.112	2.531.165	196.947	2.728.112	-
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.072	15.540	1.139	16.679	393
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	49.419.471	45.330.283	4.089.188	49.419.471	-
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.412.222	2.211.916	200.306	2.412.222	-

	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.236.750	6.635.825	600.925	7.236.750	-
3	2.16.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	4.116.258	2.348.565	1.767.693	4.116.258	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	741.258	323.565	417.693	741.258	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	3.375.000	2.025.000	1.350.000	3.375.000	-
III	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.636.860	493.950	1.142.910	1.636.860	-
1	2.16.01.2.03.06	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.636.860	493.950	1.142.910	1.636.860	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	916.860	493.950	422.910	916.860	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	720.000	-	720.000	720.000	-
IV	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	180.604.703	83.276.714	39.410.938	122.687.652	57.917.051
1	2.16.01.2.06.01	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.157.730	1.157.730	-	1.157.730	-
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.157.730	1.157.730	-	1.157.730	-
2	2.16.01.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.791.980	1.906.869	3.885.111	5.791.980	-
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	5.791.980	1.906.869	3.885.111	5.791.980	-
3	2.16.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.480.740	1.480.740	-	1.480.740	-
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.480.740	1.480.740	-	1.480.740	-
4	2.16.01.2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	32.305.000	5.798.000	23.987.000	29.785.000	2.520.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000	4.950.000	19.800.000	24.750.000	2.250.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.305.000	848.000	4.187.000	5.035.000	270.000
5	2.16.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.529.053	2.571.426	6.477.627	9.049.053	7.480.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	10.529.053	2.571.426	6.477.627	9.049.053	1.480.000
	5.1.02.02.04.0355	- Belanja Sewa peralatan Umum	6.000.000	-	-	-	6.000.000
6	2.16.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	1.320.000	120.000	1.440.000	-
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	1.320.000	120.000	1.440.000	-
7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	121.900.200	69.041.949	4.941.200	73.983.149	47.917.051
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	100.780.200	53.426.949	2.391.200	55.818.149	44.962.051
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.120.000	15.615.000	2.550.000	18.165.000	2.955.000
V	2.16.01.2.06	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	379.953.777	284.213.762	58.404.823	342.618.585	37.335.192
8	2.16.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	49.953.777	36.713.762	3.404.823	40.118.585	9.835.192
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	49.353.777	36.713.762	3.404.823	40.118.585	9.235.192
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	600.000	-	-	-	600.000
9	2.16.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	330.000.000	247.500.000	55.000.000	302.500.000	27.500.000
	5.1.02.02.01.0023	- Belanja Jasa tenaga pelayanan umum	307.800.000	230.850.000	51.300.000	282.150.000	25.650.000
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.01.0030	-Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000	9.000.000	2.000.000	11.000.000	1.000.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Caraka	10.200.000	7.650.000	1.700.000	9.350.000	850.000
VI	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.193.000	44.325.000	23.868.000	68.193.000	-
1	2.16.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	39.193.000	20.800.000	18.393.000	39.193.000	-
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	17.580.000	13.800.000	3.780.000	17.580.000	-

	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	1.613.000	-	1.613.000	1.613.000	-
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-
	5.1.02.03.02.0038	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor Roda dua	10.000.000	7.000.000	3.000.000	10.000.000	-
2	2.16.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.000.000	23.525.000	5.475.000	29.000.000	-
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	1.525.000	1.525.000	3.050.000	-
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	10.950.000	7.000.000	3.950.000	10.950.000	-
VII	2.16.02.2.01	PENGELOLAAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.762.385	30.044.520	24.502.862	54.547.382	8.215.003
1	2.16.02.2.01.02	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	3.810.660	576.534	984.126	1.560.660	2.250.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	984.126	-	984.126	984.126	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	576.534	576.534	-	576.534	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	-	-	-	2.250.000
2	2.16.02.2.01.05	PENGLOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	48.506.515	21.262.036	21.279.476	42.541.512	5.965.003
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.270.839	1.270.839	-	1.270.839	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	579.476	-	579.476	579.476	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	3.000.000	2.400.000	5.400.000	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	6.526.200	6.526.197	-	6.526.197	3
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ transport peliputan	34.730.000	10.465.000	18.300.000	28.765.000	5.965.000
3	2.16.02.2.01.06	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10.445.210	8.205.950	2.239.260	10.445.210	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	739.260	-	739.260	739.260	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	615.950	615.950	-	615.950	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.250.000	750.000	1.500.000	2.250.000	-
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.840.000	6.840.000	-	6.840.000	-
VIII	2.16.03.2.02	PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.263.985.236	835.048.200	409.020.936	1.244.069.136	19.916.100
1	2.16.03.2.02.07	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	27.267.460	17.267.200	6.565.260	23.832.460	3.435.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.809.300	-	1.809.300	1.809.300	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	705.960	-	705.960	705.960	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	4.050.000	-	4.050.000	4.050.000	-
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.602.200	13.602.200	-	13.602.200	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.100.000	3.665.000	-	3.665.000	3.435.000
2	2.16.03.2.02.10	PENGEMBANGAN DAN PENGLOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	1.236.717.776	817.781.000	402.455.676	1.220.236.676	16.481.100
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.724.940	-	1.724.940	1.724.940	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.073.936	-	1.073.936	1.073.936	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.250.000	-	2.250.000	2.250.000	-
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.174.171.200	782.772.000	391.386.000	1.174.158.000	13.200
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	-

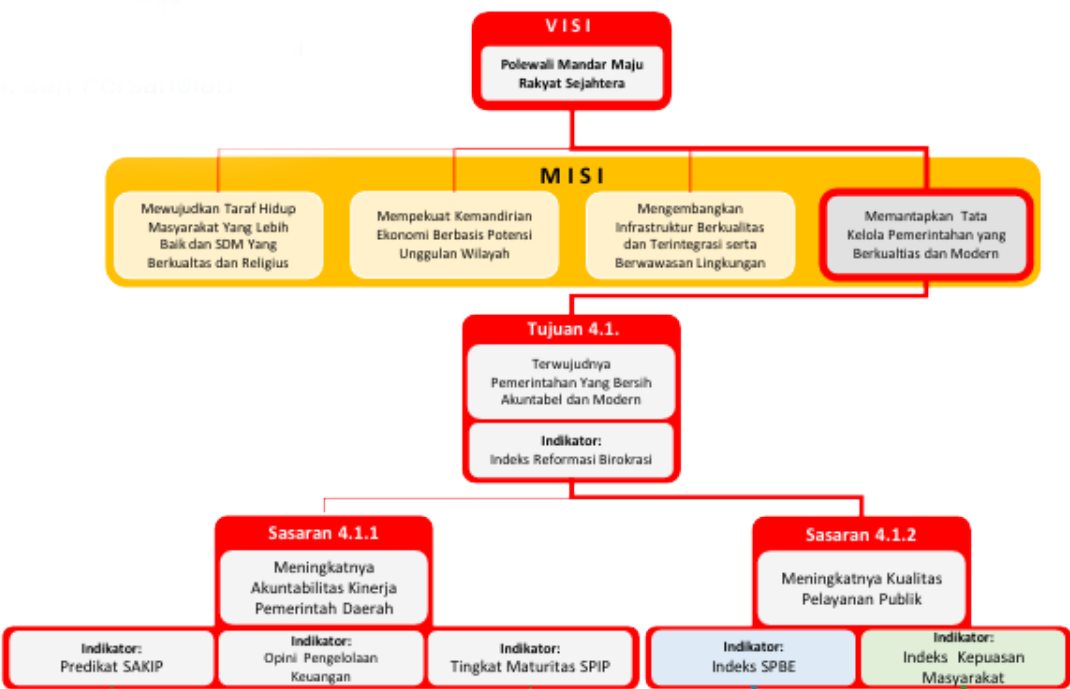
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.837.700	8.809.000	6.020.800	14.829.800	8.007.900
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.660.000	1.200.000	-	1.200.000	8.460.000
IX	2.2.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.404.382	20.146.449	15.371.533	35.517.982	22.886.400
1	2.20.02.2.01.01	KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGUMPULAN, PENGELOLAHAN,ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	45.310.542	18.766.449	3.657.693	22.424.142	22.886.400
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.727.049	1.727.049	-	1.727.049	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	417.693	-	417.693	417.693	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	7.380.000	4.140.000	3.240.000	7.380.000	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.960.800	2.774.400	-	2.774.400	14.186.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.825.000	10.125.000	-	10.125.000	8.700.000
2	2.20.02.2.01.03	MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	13.093.840	1.380.000	11.713.840	13.093.840	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.713.840	-	1.713.840	1.713.840	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.01.0026	- Belanja Jasa Tenaga Admnistrasi honor nara sumber	900.000	900.000	-	900.000	-
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan aset tidak berwujud -software	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000	480.000	-	480.000	-
X	2.21.02.2.01.04	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.946.330	2.491.200	6.093.400	8.584.600	6.361.730
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	931.290	-	931.290	931.290	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	470.640	-	470.640	470.640	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.700.000	-	2.700.000	2.700.000	-
	5.1.02.02.15.0005	- Belanjasewa aset tidak berwujud- software	4.320.000	-	1.991.470	1.991.470	2.328.530
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	2.774.400	1.291.200	-	1.291.200	1.483.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000	1.200.000	-	1.200.000	2.550.000
		JUMLAH	3.623.557.796	2.757.707.153	711.649.734	3.469.356.887	154.200.909

Polewali, 31 Desember 2024
Kepala Dinas



Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si
NIP. 197510062010011007

Lampiran 4. Pohon Kinerja 2024





Pemkab
Polewali Mandar

Dinas KominfoSP/
Unit Es.II

Bidang/
Unit Es.III

Seksi /
Unit Es.IV

Proses

Input

Outcome/ impact

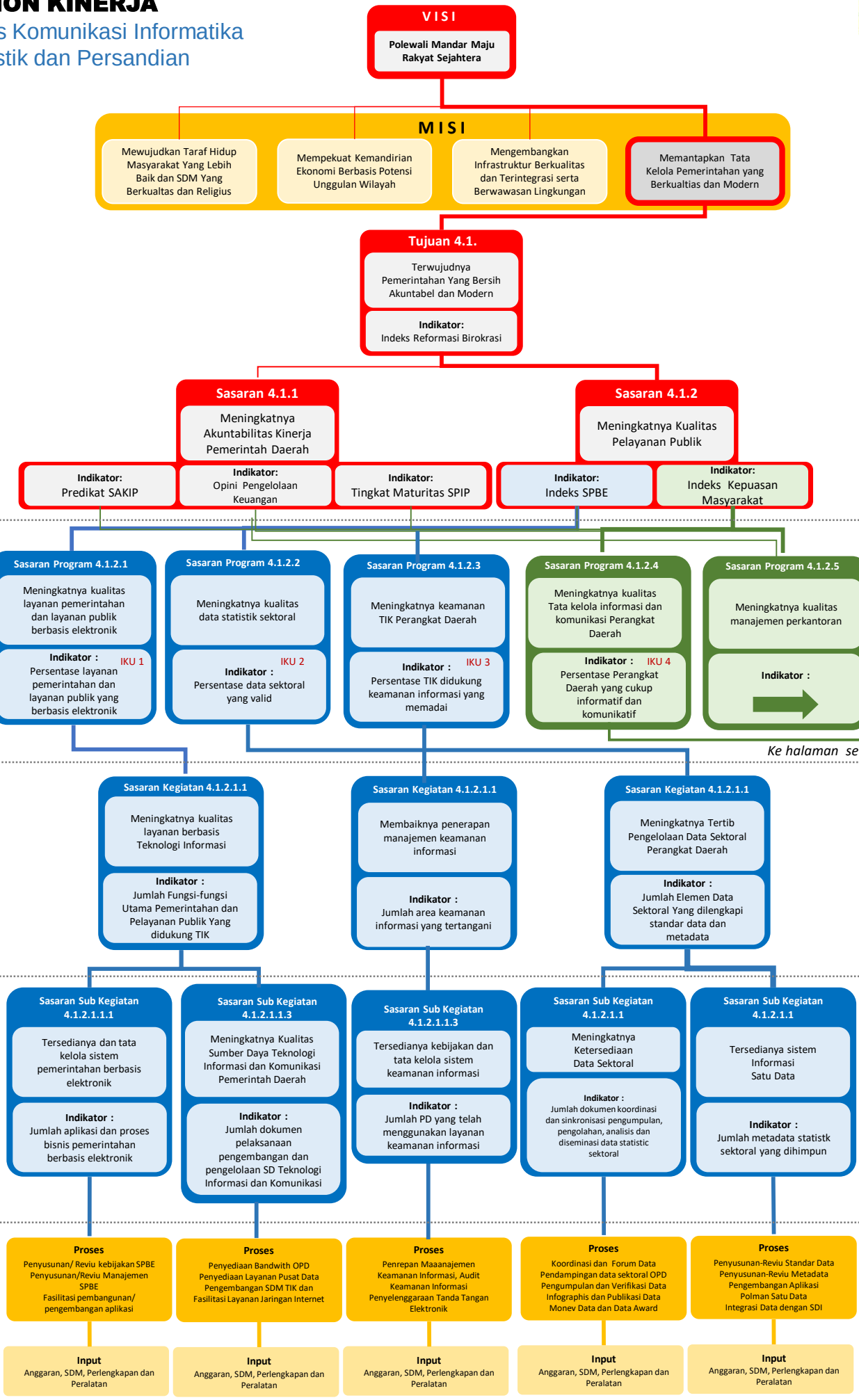
Intermediate Outcome

Immediate Outcome

Output

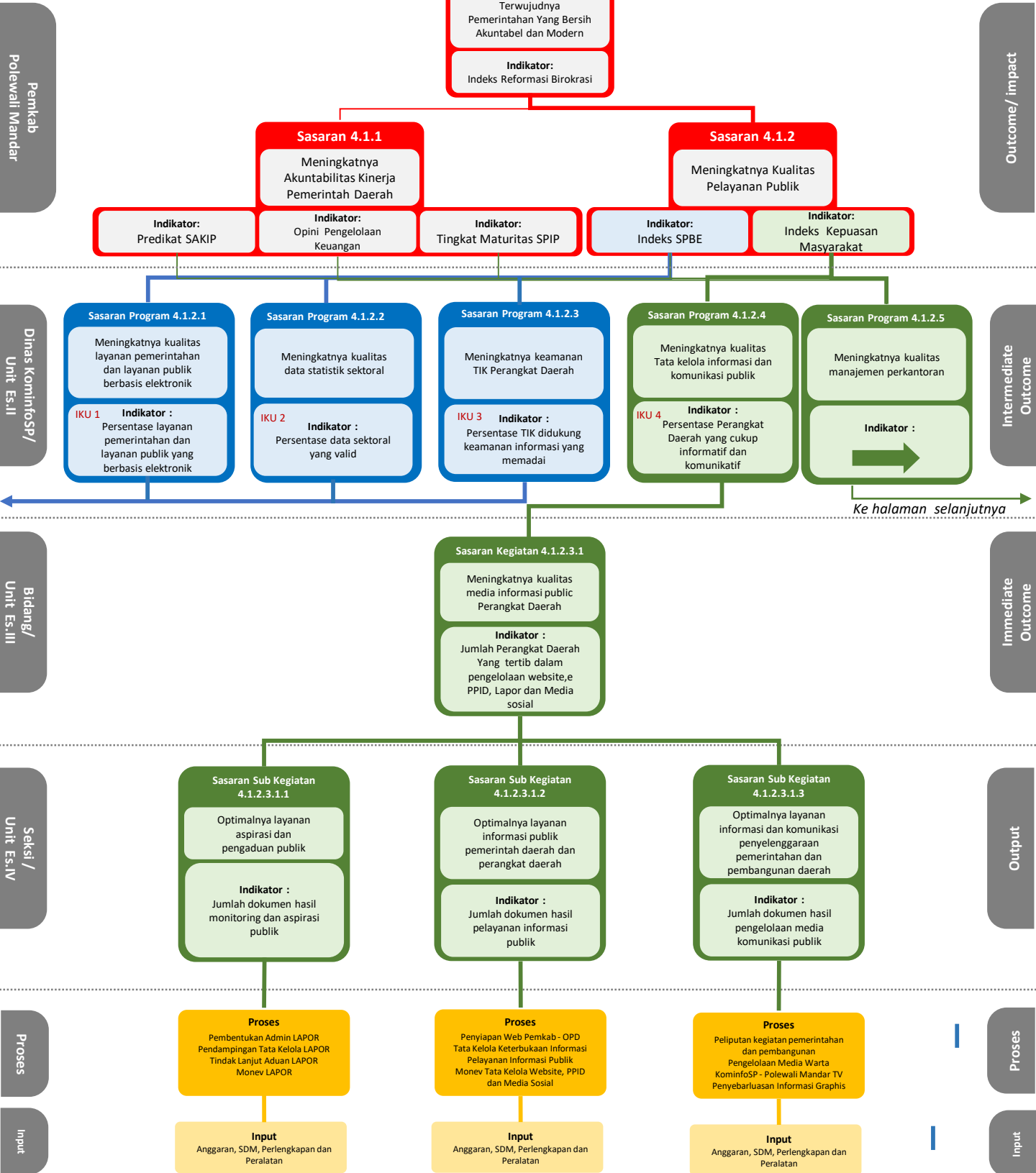
Proses

Input



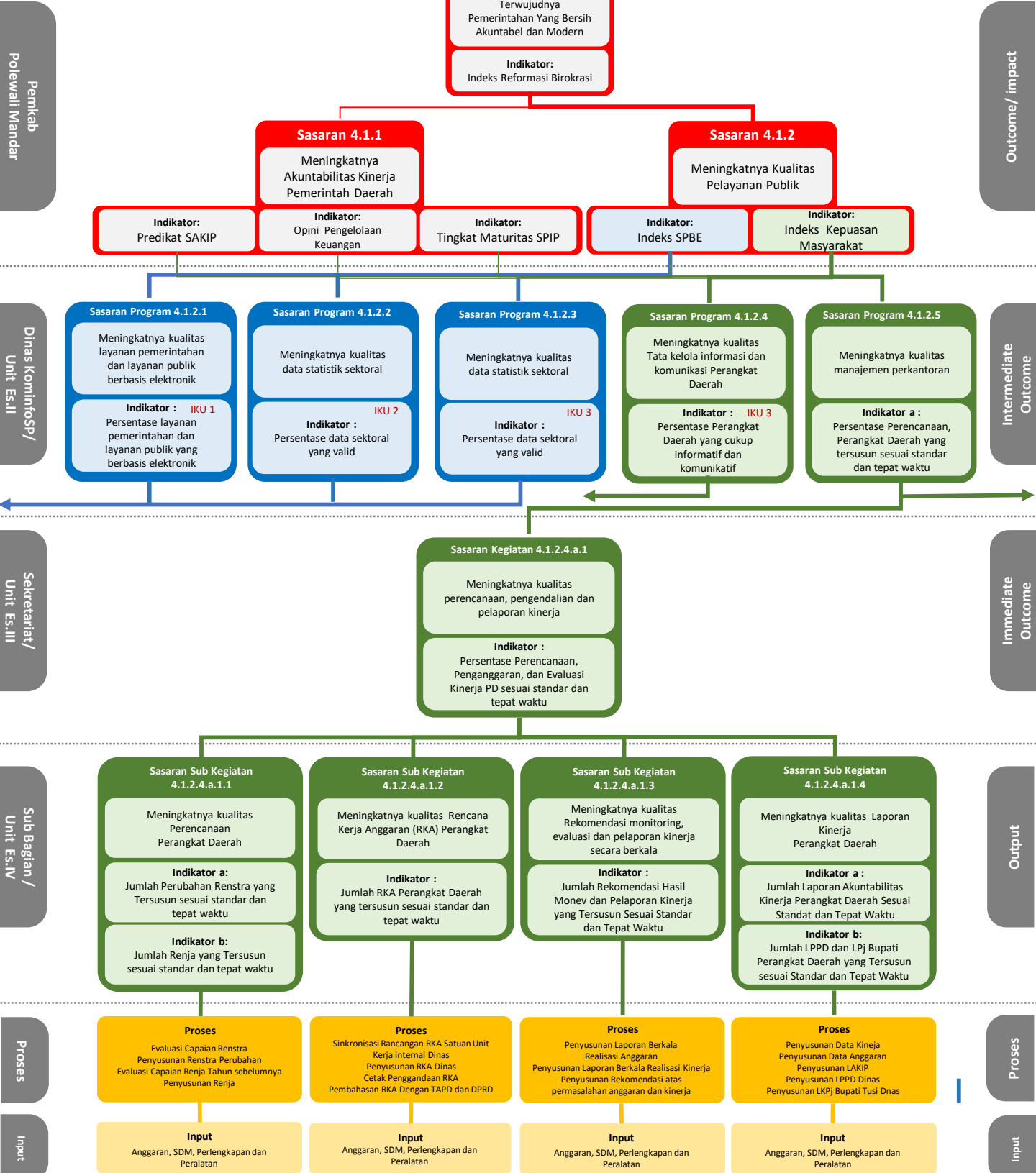
POHON KINERJA

Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



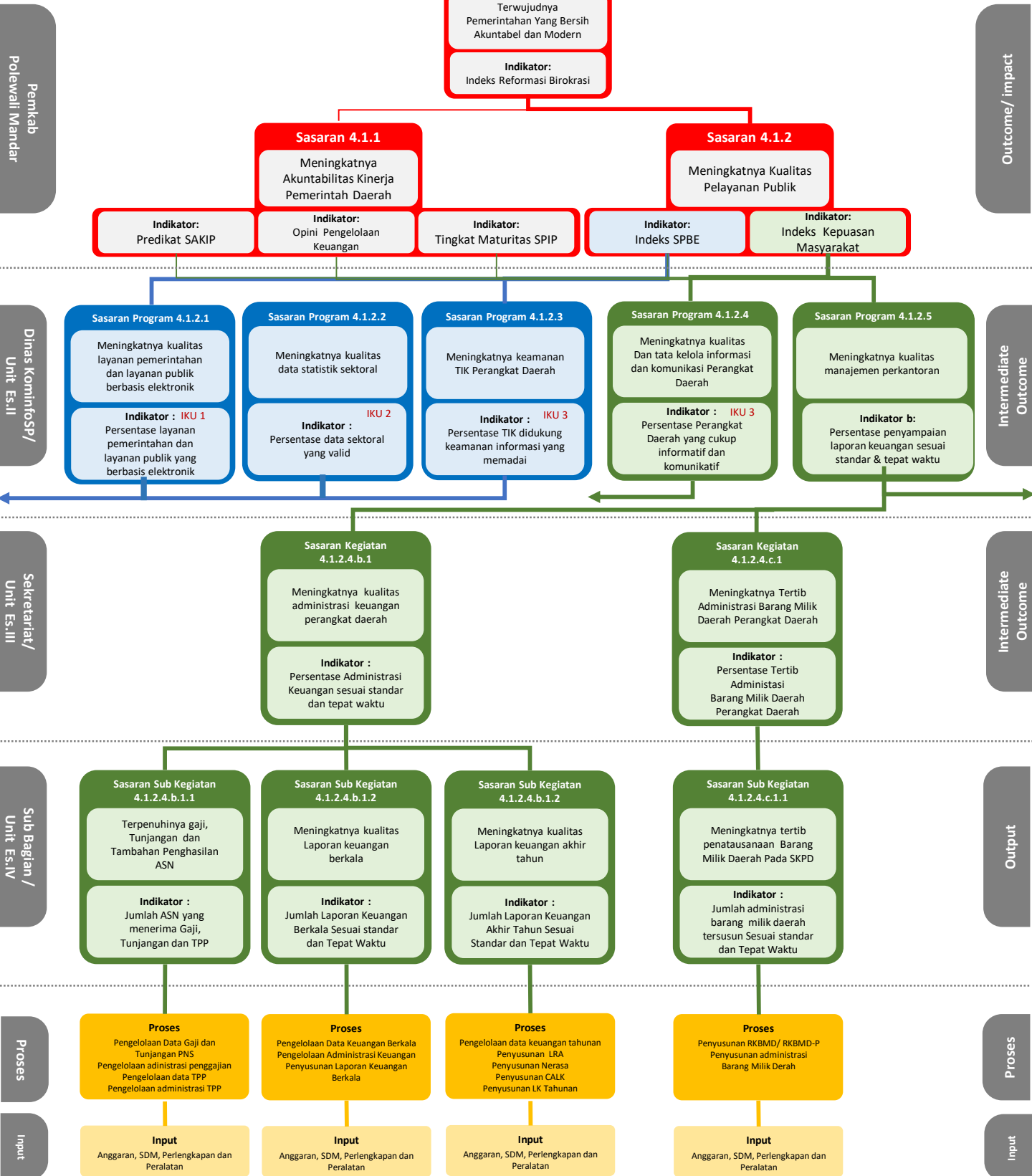
POHON KINERJA

Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



POHON KINERJA

Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian





Pemkab
Polewali Mandar

Dinas KominfoSP/
Unit Es.II

Sekretariat/
Unit Es.III

Su Bagian/
Unit Es.IV

Proses

Input

Outcome/ impact

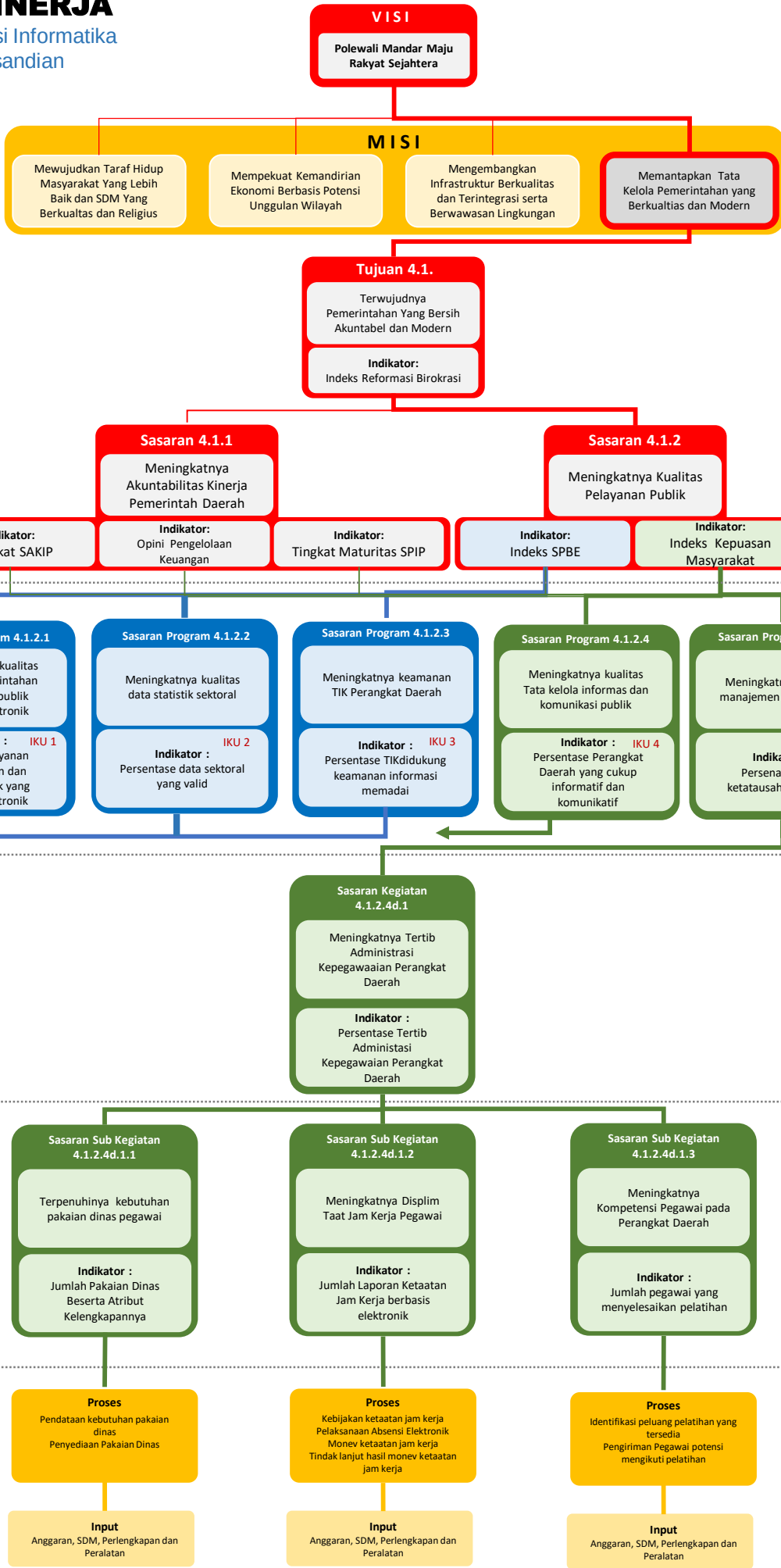
Intermediate Outcome

Immediate Outcome

Output

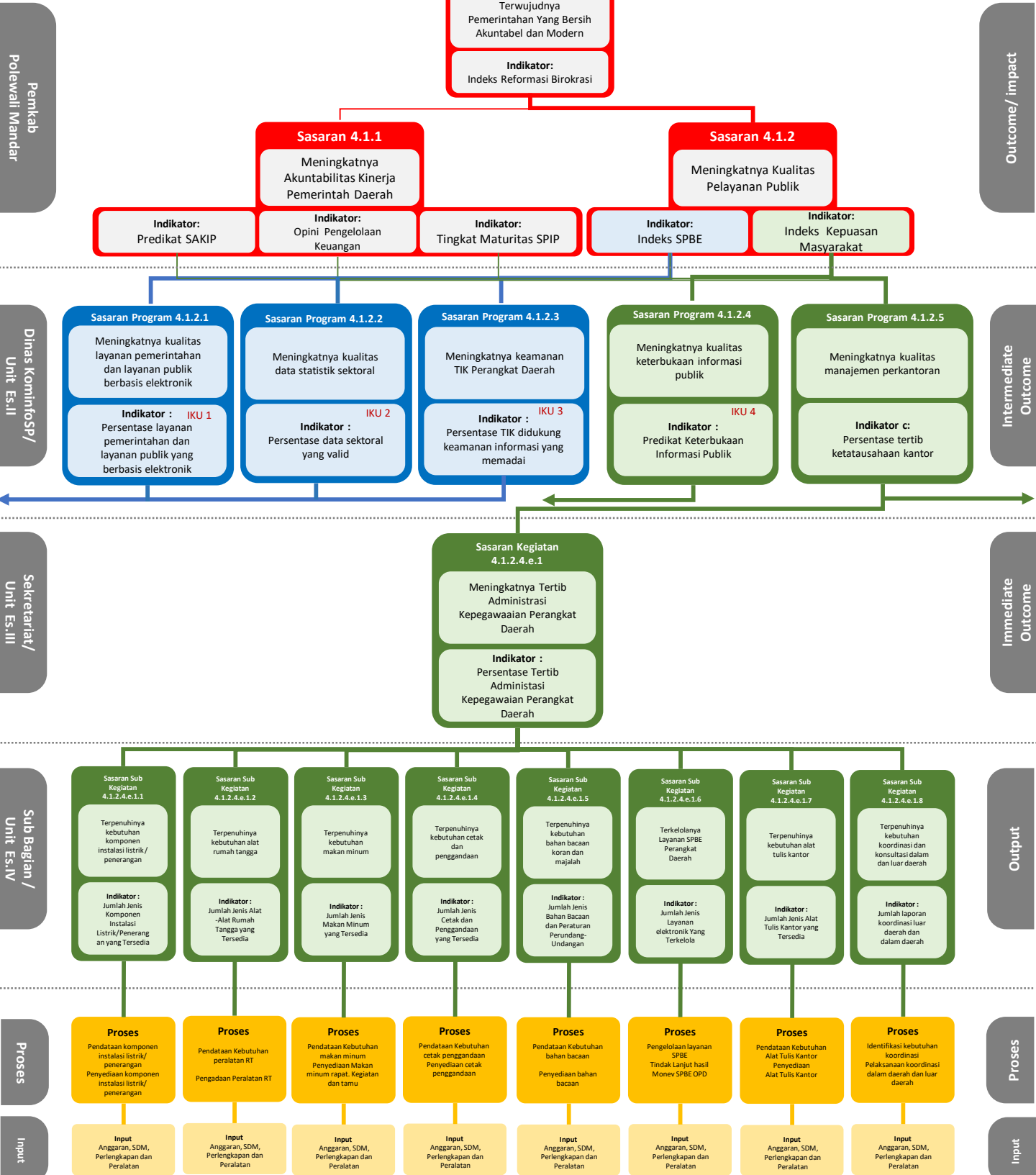
Proses

Input



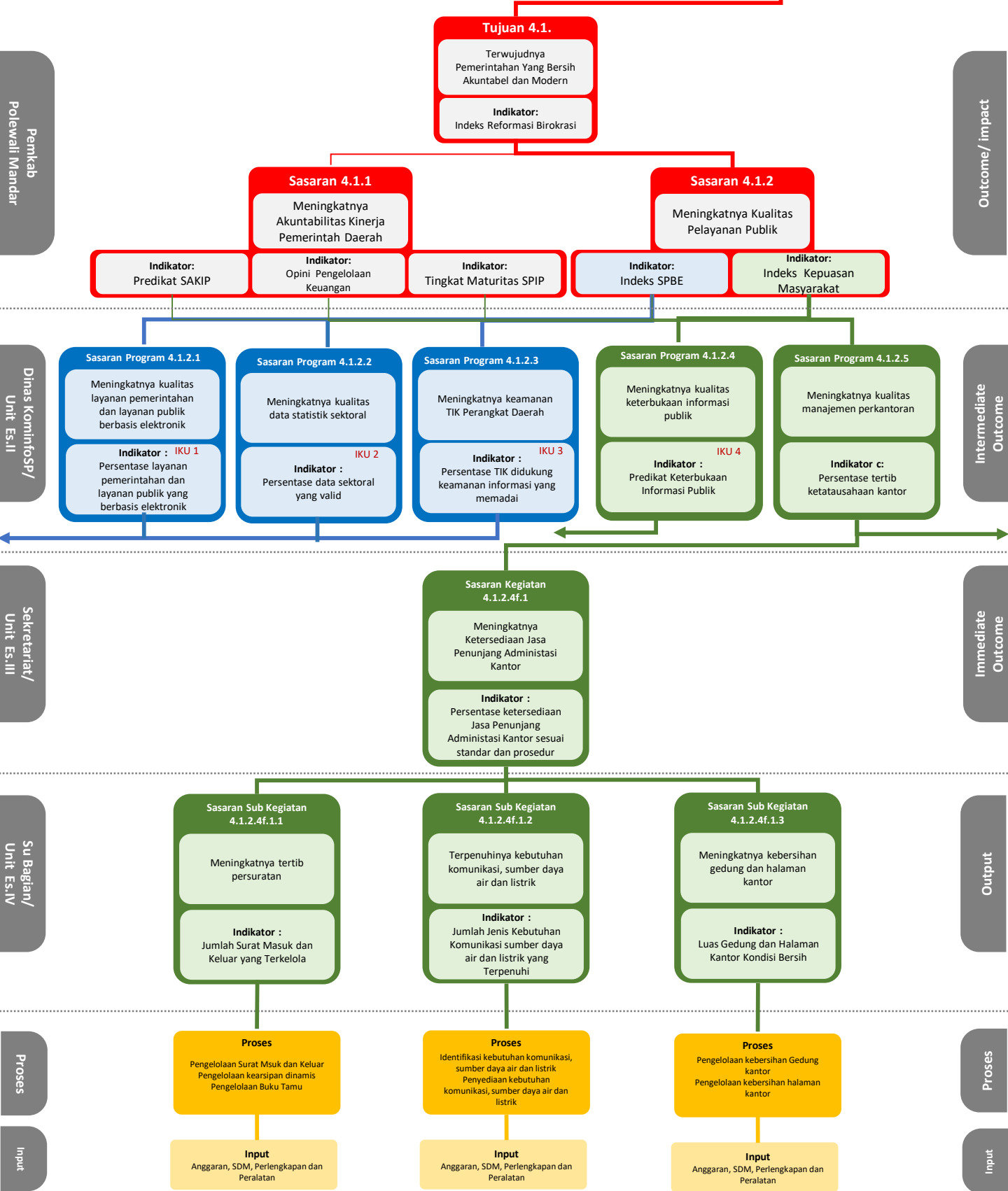
POHON KINERJA

Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



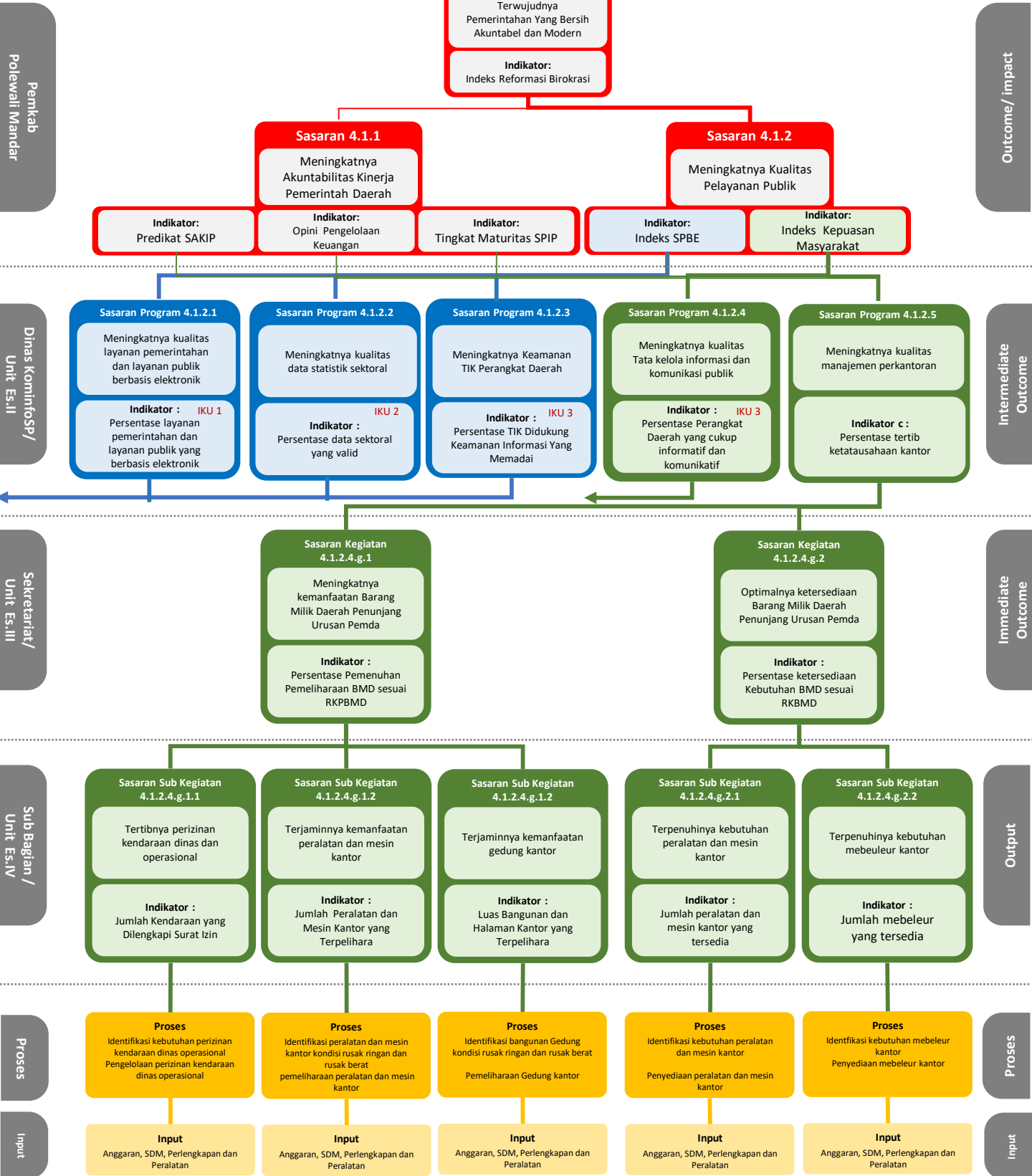
POHON KINERJA

Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



POHON KINERJA

Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



Lampiran

Lampiran 5. Laporan Money Rencana Aksi 2024



LAPORAN MONEV RENCANA AKSI DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN
TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = (5+6+7)		10 = 9/4*100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
I	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Cukup Informatif dan Komunikatif	96,42%	84.381.385	10,71	-							10,71	-	11,11	-	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Lapor dan Media Sosial	27 OPD	84.381.385	3 OPD	-							3 OPD	-	10,71	-	
1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	2 Dokumen	9.060.660	0	0							1 Dokumen	0	25,00	-	
1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	4 Dokumen	54.875.515	1 Dokumen	0							1 Dokumen	0	25,00	-	
1.3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	2 Dokumen	20.445.210	0	0							1 Dokumen	0	25,00	-	
II	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan pemerintahan yang berbasis elektronik	82,50%	1.313.985.236	0	0							0	0	0	0	
2	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	99 Fungsi	1.313.985.236	0	0							0	0	0	0	
2.1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	99 Unit	77.267.460	0	0							0	0	0	0	
2.2	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	1.236.717.776	0	0							1 Dokumen	0	50,00	0	
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Valid	82%	66.441.082	0	0							0	0	0	0	
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	1500 Elemen Data	66.441.082	0	0							0	0	0	0	
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	2 Dokumen	45.310.542	0	0							0	0	0	0	
3.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	21.130.540	0	0							0	0	0	0	
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase TIK yang didukung Keamanan Informasi Yang Memadai	33,00%	14.946.330	0	0							0	0	0	0	
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	6 Area	14.946.330	0	0							0	0	0	0	
4.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	28 OPD	14.946.330	0	0							0	0	0	0	
IV	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	100%;100%;100%;	2.624.486.027		340.598.247								340.598.247	29,00	12,98	

4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	23.127.138											50,00		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.214.738	1 Dokumen	0							1 Dokumen	;0	50,00	;0	
4.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	4 Dokumen	5.402.730	1 Dokumen	0							1 Dokumen	0	25,00	0	
4.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	6.149.010	1 Laporan	;0							1 Dokumen	;0	25,00	0	
4.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.360.660	1 Laporan	0							1 Laporan	0	100,00	0	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	1.976.259.369		330.032.933								330.032.933	50,00	16,70	
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	1.965.061.044	22 Orang	330.032.933							25,00	330.032.933	25,00	16,80	
5.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.082.067	0	0							0	0	0	0	
5.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	4.116.258	3 Laporan	0							3 Laporan	0	25,00	0	
6	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	1.636.860	0	0							0	0	0	0	
6.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	6 Laporan	1.636.860	0	0							0	0	0	0	
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	100%	173.075.563		360.000								360.000	4,16	0,21	
8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	1.157.730	0	0							0	0	0	0	
8.2	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	5.791.980	0	0							0	0	0	0	
8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	1.480.740	0	0							0	0	0	0	
8.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	29.785.000	0	0							0	0	0	0	
8.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	11.519.913	0	0							0	0	0	0	
8.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1.440.000	1 Dokumen	360.000							1 Dokumen	360.000	25,00	25,00	
8.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	206 Laporan	121.900.200	.0	0							0	;0	0	;0	
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	382.194.097		10.205.314								10.205.314	12,50	2,67	
9.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	50.553.777	1 Laporan	10.205.314							1 Laporan	10.205.314	25,00	20,19	
9.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	331.640.320	0	0							0	0	0	0	

10	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMMD	85%	68.193.000	0	0							0	0	0	0	
10.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	39.193.000	0	0							0	0	0	0	
10.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Yang dipelihara	11 Unit	29.000.000	0	0					97,91		0	0	0	0	
JUMLAH				4.104.240.060	20,06	340.598.247								340.598.247			
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)												20,06	8,30	
			Predikat Kinerja														

Disusun
Tanggal 01 April 2024
Kepala Dinas



Dr. Aco Musaddad HM, M.Ag., M.Si
Pangmas Pembina
NIP : 19750610 201001 1 007

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024				Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)	Ket			
				I		II							
1	2	3	4		5		6		9 = (5+6+7)		10 = 9/4*100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
I	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Cukup Informatif dan Komunikatif	96,42%	84.381.385	11,11	-	14 OPD	19.597.120	51,85	19.597.120	53,78	23,22	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Lapor dan Media Sosial	27 OPD	84.381.385	3 OPD	-	11 OPD	19.597.120	14 OPD	19.597.120	50,00	23,22	
1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	2 Dokumen	9.060.660	0	0	1 Dokumen	576.534	1 Dokumen	576.534	50,00	6,36	
1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	4 Dokumen	54.875.515	1 Dokumen	0	1 Dokumen	13.397.036	2 Dokumen	13.397.036	50,00	24,41	
1.3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	2 Dokumen	20.445.210	0	0	1 Dokumen	5.623.550	1 Dokumen	5.623.550	50,00	27,51	
II	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan pemerintahan yang berbasis elektronik	82,50%	1.313.985.236	0	0	0	431.312.904	81,66	431.312.904	98,98	32,82	
2	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	99 Fungsi	1.313.985.236	0	0	0	431.312.904	98 Fungsi	431.312.904	98,99	32,82	
2.1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	99 Unit	77.267.460	0	0	98 Unit	11.286.904	98 Unit	11.286.904	98,99	14,61	
2.2	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	1.236.717.776	0	0	0	420.026.000	1 Dokumen	420.026.000	50,00	33,96	
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Valid	82%	66.441.082	0	0		15.075.249	1,67	15.075.249	2,04	23	
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	1500 Elemen Data	66.441.082	0	0	25 Elemen Data	15.075.249	25 Elemen Data	15.075.249	1,67	23	
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	2 Dokumen	45.310.542	0	0	2 Dokumen	14.175.249	2 Dokumen	14.175.249	25	31	

3.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	21.130.540	0	0	1 Dokumen	900.000	1 Dokumen	900.000	25,00	4	
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase TIK yang dldukung Keamanan Informasi Yang Memadai	33,00%	14.946.330	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	6 Area	14.946.330	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	28 OPD	14.946.330	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	100%;100%; 100%;	2.624.486.027		344.986.992		751.992.655		1.096.979.647	57,34	41,80	
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	23.127.138		4.388.745		0		4.388.745	56,25	18,98	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.214.738	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	;0	50,00	;0	
4.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	4 Dokumen	5.402.730	1 Dokumen	1.998.675	0	0	1 Dokumen	1.998.675	25,00	36,99	
4.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	6.149.010	1 Laporan	2.390.070	1 Laporan	;0	2 Laporan	2.390.070	50,00	38,87	
4.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.360.660	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	0	100,00	0	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	1.976.259.369		330.032.933		563.390.683		893.423.616	66,67	45,21	
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	1.965.061.044	22 Orang	330.032.933	22 Oang	561.042.118	22 Orang	891.075.051	50,00	45,35	
5.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.082.067	0	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	100,00	0	
5.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	4.116.258	3 Laporan	0	3 Laporan	2.348.565	6 Laporan	2.348.565	50,00	57,06	
6	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	1.636.860	0	0		493.950	0	493.950	66,67	30,18	
6.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	6 Laporan	1.636.860	0	0	4 Laporan	493.950	4 Laporan	493.950	66,67	30,18	

8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	100%	173.075.563		360.000		36.043.725		36.403.725	65,05	21,03	
8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	1.157.730	0	0	3 Paket	1.157.730	3 Paket	1.157.730	100,00	100,00	
8.2	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	5.791.980	0	0	1 Paket	1.906.869	1 Paket	1.906.869	50,00	32,92	
8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	1.480.740	0	0	4 Paket	1.480.740	4 Paket	1.480.740	100,00	100,00	
8.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	29.785.000	0	0	2 Paket	5.798.000	2 Paket	5.798.000	50,00	19,47	
8.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	11.519.913	0	0	2 Paket	2.571.426	2 Paket	2.571.426	50,00	22,32	
8.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1.440.000	1 Dokumen	360.000	1 Dokumen	240.000	1 Dokumen	600.000	50,00	41,67	
8.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	206 Laporan	121.900.200	0	0	67 Laporan	22.888.960	67 Laporan	22.888.960	55,37	18,78	
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	382.194.097		10.205.314		116.239.297		126.444.611	50,00	33,08	
9.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	50.553.777	1 Laporan	10.205.314	1 Laporan	6.239.297	1 Laporan	16.444.611	50,00	32,53	
9.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	331.640.320	0	0	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	50,00	33,17	
10	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	85%	68.193.000	0	0		35.825.000	0	35.825.000	39,39	0	
10.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	39.193.000	0	0	2 Unit	12.300.000	2 Unit	12.300.000	33,33	31,38	
10.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Yang dipelihara	11 Unit	29.000.000	0	0	5 Unit	23.525.000	5 Unit	23.525.000	45,45	81,12	
JUMLAH				4.104.240.060	20,06	344.986.992	42,43	1.217.977.928		1.562.964.920			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											42,43	38,08	
Predikat Kinerja													

Disusun
Tanggal 03 Juli 2024
Kepala Dinas



Dr. Aco Musaddad HM, M.Ag., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19750610 201001 1 007

LAPORAN MPNE RENCANA AKSI DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN TRIWULAN III TAHUN 2024																	
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)		Ket	
				I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		10		11		9 = (5+6+7)		10 = 9/4*100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
I	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Cukup Informatif dan Komunikatif	96,42%	62.762.385	11,11	-	40,74	19.597.120	37,04	1.350.000			88,89	20.947.120	92,19	33,38	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Lapor dan Media Sosial	27 OPD	62.762.385	3 OPD	-	11 OPD	19.597.120	10 OPD	1.350.000			24 OPD	20.947.120	85,71	33,38	
1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	2 Dokumen	3.810.660	0	0	1 Dokumen	576.534	0	0			1 Dokumen	576.534	50,00	15,13	
1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	4 Dokumen	48.506.515	1 Dokumen	0	1 Dokumen	13.397.036	1 Dokumen	1.350.000			3 Dokumen	14.747.036	75,00	30,40	
1.3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	2 Dokumen	10.445.210	0	0	1 Dokumen	5.623.550	0	0			1 Dokumen	5.623.550	50,00	53,84	
II	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan pemerintahan yang berbasis elektronik	82,50%	1.263.985.236	0	0	81,66	431.312.904	0	201.673.296			82,50	632.986.200	100,00	50,08	
2	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	99 Fungsi	1.263.985.236	0	0	98 Fungsi	431.312.904	0	201.673.296			99 Fungsi	632.986.200	100,00	50,08	
2.1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	99 Unit	27.267.460	0	0	98 Unit	11.286.904	1 Unit	5.980.296			99 Unit	17.267.200	100,00	63,33	
2.2	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	1.236.717.776	0	0	1 Dokumen	420.026.000	0	195.693.000			1 Dokumen	615.719.000	50,00	49,79	
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Valid	82%	58.404.382	0	0		15.075.249		1.771.200			14,73	16.846.449	17,96	29	
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	1500 Elemen Data	58.404.382	0	0	25 Elemen Data	15.075.249	196 Elemen Data	1.771.200			221 Elemen Data	16.846.449	14,73	29	
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	2 Dokumen	45.310.542	0	0	2 Dokumen	14.175.249	0	1.291.200			2 Dokumen	15.466.449	50,00	34	
3.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	13.093.840	0	0	1 Dokumen	900.000	0	480.000			1 Dokumen	1.380.000	50,00	11	
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase TIK yang didukung Keamanan Informasi Yang Memadai	33,00%	14.946.330	0	0	0	0	0	33,33			33,33	1.200.000	101,01	8,03	
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	6 Area	14.946.330	0	0	0	0	6 Area	1.200.000			6 Area	1.200.000	100,00	8,03	

4.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	28 OPD	14.946.330	0	0	0	0	28 OPD	1.200.000			28 OPD	1.200.000	100,00	8,03	
IV	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	100%;100%;100%;	2.223.459.463		344.986.992		751.992.655		474.961.494				1.571.941.141	74,55	70,70	
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	17.565.078		4.388.745		0		0				4.388.745	87,50	24,99	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.352.678	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0			2 Dokumen	0	100,00	;0	
4.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	4 Dokumen	5.402.730	1 Dokumen	1.998.675	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0			3 Dokumen	1.998.675	75,00	36,99	
4.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	3.449.010	1 Laporan	2.390.070	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	;0			3 Laporan	2.390.070	75,00	69,30	
4.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.360.660	1 Laporan	0	0	0	0	0			1 Laporan	0	100,00	0	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	1.575.506.045		330.032.933		563.390.683		336.238.519				1.229.662.135	83,33	78,05	
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	1.564.307.720	22 Orang	330.032.933	22 Oang	561.042.118	22 Oang	336.238.519			22 Orang	1.227.313.570	75,00	78,46	
5.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.082.067	0	0	1 Laporan	0	0	0			1 Laporan	0	100,00	0	
5.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	4.116.258	3 Laporan	0	3 Laporan	2.348.565	3 Laporan	0			9 Laporan	2.348.565	75,00	57,06	
6	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	1.636.860	0	0		493.950		0			0	493.950	66,67	30,18	
6.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	6 Laporan	1.636.860	0	0	4 Laporan	493.950	0	0			4 Laporan	493.950	66,67	30,18	
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	100%	180.604.703		360.000		36.043.725		7.280.000				43.683.725	78,74	24,19	
8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	1.157.730	0	0	3 Paket	1.157.730	0	0			3 Paket	1.157.730	100,00	100,00	
8.2	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	5.791.980	0	0	1 Paket	1.906.869	1 Paket	0			1 Paket	1.906.869	50,00	32,92	
8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	1.480.740	0	0	4 Paket	1.480.740	0	0			4 Paket	1.480.740	100,00	100,00	
8.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	32.305.000	0	0	2 Paket	5.798.000	2 Paket	0			2 Paket	5.798.000	75,00	17,95	
8.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	16.529.053	0	0	2 Paket	2.571.426	2 Paket	0			2 Paket	2.571.426	75,00	15,56	

8.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1.440.000	1 Dokumen	360.000	1 Dokumen	240.000	1 Dokumen	480.000			1 Dokumen	1.080.000	75,00	75,00	
8.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	206 Laporan	121.900.200	.0	0	67 Laporan	22.888.960	90 Laporan	6.800.000			157 Laporan	29.688.960	76,21	24,36	
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	379.953.777		10.205.314		116.239.297		122.942.975				249.387.586	75,00	65,64	
9.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	49.953.777	1 Laporan	10.205.314	1 Laporan	6.239.297	1 Laporan	12.942.975			1 Laporan	29.387.586	75,00	58,83	
9.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	330.000.000	0	0	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000			1 Laporan	220.000.000	75,00	66,67	
10	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMĐ	85%	68.193.000	0	0		35.825.000		8.500.000			0	44.325.000	56,06	65,00	
10.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	39.193.000	0	0	2 Unit	12.300.000	2 Unit	8.500.000			4 Unit	20.800.000	66,67	53,07	
10.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Yang dipelihara	11 Unit	29.000.000	0	0	5 Unit	23.525.000	0	0			5 Unit	23.525.000	45,45	81,12	
JUMLAH				3.623.557.796	20,06	344.986.992	42,43	1.217.977.928	77,14	680.955.990				2.243.920.910			
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)												77,14	62	
			Predikat Kinerja														

Disusun
Tanggal 03 Oktober 2024
Kepala Dinas



Drs. Aco Musaddad HM. M.Ag., M.Si
Kepala Dinas
NIP : 19750610 201001 1 007

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN
TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)		Ket		
				I		II		III		IV			Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
1	2	3	4		5		6		10		11		9 = (5+6+7)		10 = 9/4*100		11
I	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Cukup Informatif dan Komunikatif	96,42%	62.762.385	11,11	-	40,74	19.597.120	37,04	1.350.000	11,11	33.600.262	96,429	54.547.382	100,00	86,91	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Lapor dan Media Sosial	27 OPD	62.762.385	3 OPD	-	11 OPD	19.597.120	10 OPD	1.350.000	3 OPD	33.600.262	27 OPD	54.547.382	96,43	86,91	
1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	2 Dokumen	3.810.660	0	0	1 Dokumen	576.534	0	0	1 Dokumen	984.126	2 Dokumen	1.560.660	100,00	40,96	
1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	4 Dokumen	48.506.515	1 Dokumen	0	1 Dokumen	13.397.036	1 Dokumen	1.350.000	1 Dokumen	27.794.476	4 Dokumen	42.541.512	100,00	87,70	
1.3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	2 Dokumen	10.445.210	0	0	1 Dokumen	5.623.550	0	0	1 Dokumen	4.821.660	2 Dokumen	10.445.210	50,00	100,00	
II	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan pemerintahan yang berbasis elektronik	82,50%	1.263.985.236	0	0	81,66	431.312.904	0	201.673.296	0	611.082.936	82,50	1.244.069.136	100,00	98,42	
2	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	99 Fungsi	1.263.985.236	0	0	98 Unit	431.312.904	0	201.673.296	0	611.082.936	99 Fungsi	1.244.069.136	100,00	98,42	
2.1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	99 Unit	27.267.460	0	0	98 Unit	11.286.904	1 Unit	5.980.296	0	6.565.260	99 Unit	23.832.460	100,00	87,40	
2.2	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	1.236.717.776	0	0	1 Dokumen	420.026.000	0	195.693.000	1 Dokumen	604.517.676	2 Dokumen	1.220.236.676	100,00	98,67	
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Valid	82%	58.404.382	0	0		15.075.249		1.771.200		18.671.533	82,16	35.517.982	100,20	61	
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	1500 Elemen Data	58.404.382	0	0	25 Elemen Data	15.075.249	196 Elemen Data	1.771.200	1306 Elemen Data	18.671.533	1527 Elemen Data	35.517.982	101,80	61	
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	2 Dokumen	45.310.542	0	0	2 Dokumen	14.175.249	0	1.291.200	2 Dokumen	6.957.693	2 Dokumen	22.424.142	100,00	49	
3.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	13.093.840	0	0	1 Dokumen	900.000	0	480.000	1 Dokumen	11.713.840	1 Dokumen	13.093.840	100,00	100	
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase TIK yang didukung Keamanan Informasi Yang Memadai	33,00%	14.946.330	0	0	0	0	0	1.200.000	0	7.384.600	33,33	8.584.600	101,01	57,44	
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	6 Area	14.946.330	0	0	0	0	6 Area	1.200.000	0	7.384.600	6 Area	8.584.600	100,00	57,44	

4.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	28 OPD	14.946.330	0	0	0	0	28 OPD	1.200.000	28 OPD	7.384.600	28 OPD	8.584.600	100,00	57,44	
IV	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	100%;100%;100%;	2.223.459.463		344.986.992		751.992.655		474.961.494		554.696.646		2.126.637.787	100,07	95,65	
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	17.565.078		4.388.745		0		0		13.176.333		17.565.078	100,00	100,00	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.352.678	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	0	2.352.678	2 Dokumen	2.352.678	100,00	100,00	
4.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	4 Dokumen	5.402.730	1 Dokumen	1.998.675	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	3.404.055	4 Dokumen	5.402.730	100,00	100,00	
4.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	3.449.010	1 Laporan	2.390.070	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	;0	1 Laporan	1.058.940	4 Laporan	3.449.010	100,00	100,00	
4.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.360.660	1 Laporan	0	0	0	0	0	0	6.360.660	1 Laporan	6.360.660	100,00	100,00	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	1.575.506.045		330.032.933		563.390.683		336.238.519		344.274.477		1.573.936.612	100,00	99,90	
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	1.564.307.720	22 Orang	330.032.933	22 Oang	561.042.118	22 Oang	336.238.519	22 Orang	335.424.717	22 Orang	1.562.738.287	100,00	99,90	
5.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.082.067	0	0	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	7.082.067	1 Laporan	7.082.067	100,00	100,00	
5.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	4.116.258	3 Laporan	0	3 Laporan	2.348.565	3 Laporan	0	3 Laporan	1.767.693	12 Laporan	4.116.258	100,00	100,00	
6	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	1.636.860	0	0		493.950		0	0	1.142.910	6 Laporan	1.636.860	100,00	100,00	
6.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	6 Laporan	1.636.860	0	0	4 Laporan	493.950	0	0	2 Laporan	1.142.910	6 Laporan	1.636.860	100,00	100,00	
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	100%	180.604.703		360.000		36.043.725		7.280.000		79.003.927		122.687.652	100,41	67,93	
8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	1.157.730	0	0	3 Paket	1.157.730	0	0	0	3 Paket	1.157.730	100,00	100,00		
8.2	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	5.791.980	0	0	1 Paket	1.906.869	1 Paket	0	1 Paket	3.885.111	1 Paket	5.791.980	100,00	100,00	
8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	1.480.740	0	0	4 Paket	1.480.740	0	0	0	4 Paket	1.480.740	100,00	100,00		
8.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	32.305.000	0	0	2 Paket	5.798.000	2 Paket	0	2 Paket	23.987.000	2 Paket	29.785.000	100,00	92,20	
8.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	16.529.053	0	0	2 Paket	2.571.426	2 Paket	0	2 Paket	6.477.627	2 Paket	9.049.053	100,00	54,75	

;8.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1.440.000	1 Dokumen	360.000	1 Dokumen	240.000	1 Dokumen	480.000	1 Dokumen	720.000	1 Dokumen	1.440.000	100,00	100,00	
8.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	206 Laporan	121.900.200	.0	0	67 Laporan	22.888.960	90 Laporan	6.800.000	55 Laporan	44.294.189	212 Laporan	73.983.149	102,91	60,69	
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	379.953.777		10.205.314		116.239.297		122.942.975		93.230.999		342.618.585	100,00	90,17	
9.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	49.953.777	1 Laporan	10.205.314	1 Laporan	6.239.297	1 Laporan	12.942.975	1 Laporan	10.730.999	1 Laporan	40.118.585	100,00	80,31	
9.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	330.000.000	0	0	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	82.500.000	1 Laporan	302.500.000	100,00	91,67	
10	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMDBMD	85%	68.193.000	0	0		35.825.000		8.500.000		23.868.000		68.193.000	100,00	100,00	
10.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	39.193.000	0	0	2 Unit	12.300.000	2 Unit	8.500.000	2 Unit	18.393.000	6 Unit	39.193.000	100,00	100,00	
10.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Yang dipelihara	11 Unit	29.000.000	0	0	5 Unit	23.525.000	0	0	6 Unit	5.475.000	11 Unit	29.000.000	100,00	100,00	
JUMLAH				3.623.557.796	20,06	344.986.992	42,43	1.217.977.928	77,14	680.955.990	100,24	1.225.435.977		3.469.356.887			
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,24	95,74	
			Predikat Kinerja														

Disusun
Tanggal 02 Januari 2025
Kepala Dinas



Dr. Aco M. Saddam HM. M.Ag.,M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19750610 201001 1 007

Lampiran 6. Evaluasi Internal Tahun 2024





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jalan Pameran Lingk Batu-Batu Kel. Darma Kec. Polewali

Website: inspektorat.polmankab.go.id email: inspektorat@polmankab.go.id

Polewali, 10 Juni 2024

Nomor : 047.1/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD
Tahun 2023

Kepada

Yth. **Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Polewali Mandar**

di –
Polewali

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, dengan tujuan:
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
 - b. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem AKIP;
 - c. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, memperoleh nilai **89,66** atau memperoleh predikat rating "**A**" (Memuaskan). Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	2023		2022	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	30,00	30	30,00
b.	Pengukuran Kinerja	25	22,50	25	22,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,38	15	13,38
d.	Evaluasi Internal	10	7,28	10	7,08
e.	Capaian Kinerja	20	16,50	20	16,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	89,66	100	89,45
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A		A

4. Nilai sebagai mana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen dan sub komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra Tahun 2019-2024), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Perencanaan Kinerja telah memuat sasaran, indikator dan target kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja di level kabupaten ke level OPD sampai ke level atasan dan bawahan (eselon III dan IV). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan perbaikan pada Rencana Strategis

(Renstra Tahun 2019-2024) dengan memuat sasaran strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil. Dan untuk menghasilkan perencanaan kinerja yang lebih baik lagi secara universal perlu dilakukan monitoring target jangka menengah setiap tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk menunjang pencapaian sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.

b. Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV. Selain itu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi monitoring kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Namun pengukuran kinerja belum di implementasikan secara optimal dan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebatas hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu.

Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan yang menggambarkan capaian-capaian kinerja outcome atau output penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- 1) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
- 2) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- 3) Pemanfaatan informasi kinerja belum efektif dalam mendorong berbagai perbaikan capaian kinerja yang diperlukan.

d. Evaluasi Internal

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan evaluasi internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan. Namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- 1) Evaluasi yang dilaksanakan sebatas hanya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggarannya, sehingga belum dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja serta peningkatan kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar..
- 2) Hasil evaluasi Rencana Aksi yang telah menunjukkan perbaikan baru sampai tahap semester belum sampai ketahap evaluasi secara triwulan.
- 3) Hasil evaluasi Rencana Aksi yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata belum optimal.

e. Capaian Kinerja

Dari output dan outcome yang dilaporkan menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian telah mencapai hasil yang cukup memadai walaupun belum optimal. Sehingga perlu ditingkatkan lagi capaian-capaian indikator outcome yang belum optimal dengan menyesuaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas serta dalam rangka meningkatkan penerapan SAKIP, maka kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar direkomendasikan agar melakukan upaya perbaikan untuk setiap komponen, sub-komponen AKIP pada Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Menyempurnakan indikator-indikator dalam komponen/sub komponen dalam akuntabilitas kinerja untuk memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih baik.
 - b. Melakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran serta program/kegiatan dan anggarannya untuk pencapaian sasaran strategis.

- c. Menyempurnakan penyajian Laporan Kinerja agar menyajikan informasi keuangan yang lebih baik dan dapat diandalkan dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang dihasilkan dari aplikasi monitoring kinerja dengan melakukan perbaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja yang diperjanjikan.
- e. Memperkuat komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
- f. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
- g. Lakukan evaluasi menyeluruh secara triwulan terhadap pelaksanaan program rencana aksi dan kegiatan serta penyerapan anggaran, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja serta peningkatan kinerja yang lebih optimal.
- h. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Pimpinan beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR KABUPATEN,

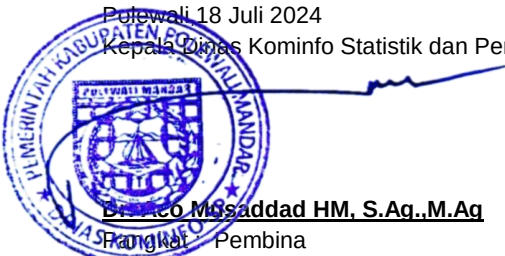

H.AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Rangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 20000 1 084

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI LAKIP TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN	EVIDENCE
1	Menyempurnakan indikator-indikator dalam komponen/sub komponen dalam akuntabilitas kinerja untuk memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih baik	Bobot nilai perencanaan kinerja Untuk Dinas KominfoSP pada LHE LAKIP 2023, nilai 30 (Nilai maksimal). Indikator kinerja Dinas KominfoSP pada level sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dianggap telah relevan dan terukur untuk mengukur keberhasilan kinerja (Tidak dibutuhkan rencana tindak lanjut)			Dinas KominfoSP	Penyempurnaan indikator kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang pada dokumen Perubahan Renstra 2019-2024,Dokumen Perubahan Renja 2023 dan Dokumen PK Revisi 2023	1. Perubahan Renstra Dinas KominfoSP 2029-2024
							2. Renja Dinas kominfoSP 2024
							3. Perjanjian Kinerja Revisi Dinas KominfoSP 2023
2	Melakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, serta program/kegiatan dan anggarannya untuk pencapaian sasaran strategis	Monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk penyempurnaan indikator kinerja sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	2 Kali	Bulan Juni dan Desember 2023	Dinas KominfoSP	Telah dilaksanakan monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan reviu secara berkala atas dokumen renstra melalui rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Rensta OPD Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2023	1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas KominfoSP Triwulan II 2023
							2. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas KominfoSP Triwulan IV 2023
3	Menyempurnakan penyajian laporan kinerja agar menyajikan informasi keuangan yang lebih baik dan dapat diandalkan dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	Perbaiki laporan realisasi keuangan pada dokumen LAKIP 2023	1 Kali	Juli 2024	Dinas KominfoSP	Penyajian laporan kinerja telah dilengkapi dengan penyajian realisasi keuangan per indikator sasaran, dengan menampilkan target dan capaian realisasi keuangan pada level program, kegiatan dan sub kegiatan	BAB III Dokumen LAKIP Dinas KominfoSP 2023
4	Mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang dihasilkan dari aplikasi monitoring kinerja dengan melakukan perbaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja yang diperjanjikan	Monitoring evaluasi kinerja melalui aplikasi e SAKIP Terintegrasi pada level sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka perbaikan strategi untuk pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan	1 Kali	Juli 2024	Dinas KominfoSP	Telah dilaksanakan monitoring evaluasi kinerja melalui aplikasi e-SAKIP dengan pemantauan capaian kinerja secara berjenjang	Monitoring evaluasi kinerja secara berjenjang Dinas KominfoSP melalui aplikasi e-SAKIP 2023

5	Menguatkan komitmen Kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui rencana aksi kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Penguatan monitoring evaluasi rencana aksi kinerja	1 Kali	Juli 2024	Dinas KominfoSP	Telah dilaksanakan monitoring evaluasi rencana aksi pada level terkecil	Monev Rencana Aksi Kinerja Triwulanan Dinas KominfoSP 2023
6	Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel	Peningkatan kapasitas SDM Pengelola akuntabilitas kinerja melalui bimtek/workshop secara berkelanjutan	1 Kali	Juni 2023	Dinas KominfoSP	Penanggung jawab dan pengelola akuntabilitas kinerja pada Dinas KominfoSP telah mengikuti workshop Akuntabilitas Kinerja pada tanggal 12 s.d 13 Desember 2022, Hotel Ratih Polewali. Namun karena refocusing anggaran, Bimtek lanjutan pada pengelola akuntabilitas kinerja tidak terlaksana	Surat Tugas penanggung jawab dan pengelola akuntabilitas kinerja pada workshop akuntabilitas kinerja
7	Lakukan evaluasi menyeluruh secara triwulan terhadap pelaksanaan program, rencana aksi dan kegiatan serta penyerapan anggaran, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja serta peningkatan kinerja yang lebih optimal	Penguatan monitoring evaluasi realisasi kinerja dan anggaran	4 Kali	Januari - Desember 2023	Dinas KominfoSP	Telah dilakukan monitoring evaluasi realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada level program, kegiatan dan sub kegiatan setiap triwulan tahun 2023	1. Laporan Monev Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas KominfoSP Triwulan I 2023 2. Laporan Monev Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas KominfoSP Triwulan II 2023 3. Laporan Monev Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas KominfoSP Triwulan III 2023 4. Laporan Monev Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas KominfoSP Triwulan IV 2023

Polewali 18 Juli 2024
Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian



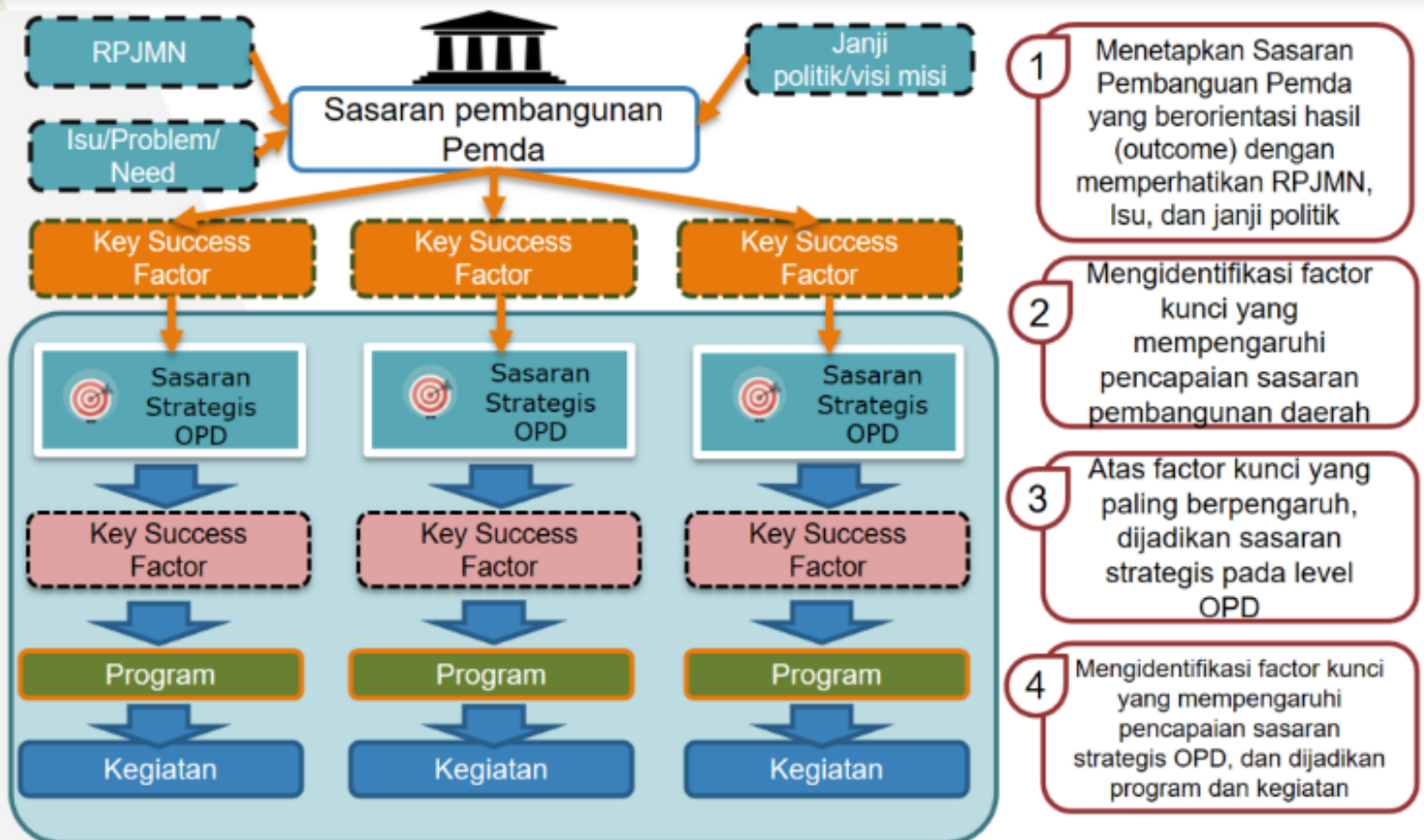
Dr. H. M. Saddam HM, S.Ag., M.Ag
Pangkat Pembina
NIP : 19751026 201001 1 007



Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo Statistik dan Persandian 2024

Lampiran

Lampiran 7. Cascading Tahun 2024



MATRIKS CASCADING KINERJA TAHUN 2021-2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		SATUAN		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 (Kondisi Akhir)	2024
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan									
VISI : POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAT SEJAHTERA																							
MSI 4: MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN																							
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Indeks Reformasi Birokrasi													Angka	58,02	62,18	63,09	71	75	81	81	85	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)											Angka	2,51	2,57	2,6	2,70	2,8	3,00	3,00	3,10	
														Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
				Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)									Angka	2,51	2,57	2,6	2,70	2,8	3,00	3,00	3,10	
														Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
						Meningkatnya kapasitas proses dan fungsi teknis pemerintahan berbasis elektronik	Tingkat Komatengan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE							Predikat	Terkecila - Informasi	Terkecila - Informasi	Ritisan - Transaksi	Terkecila - Transaksi	Terstandarisasi - Transaksi	Terstandarisasi - Kolaborasi	Terstandarisasi - Kolaborasi	Terstandarisasi - Kolaborasi	
						Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik		Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik	Program Aplikasi Informatika					Perian	32,00%	51,00%	58,00%	51,00%	58,00%	64,00%	80,00%	82,00%	
										Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK.	Pengelolaan e-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota		Fungsi	20,83%	48,00%	50%	54,17%	80,83%	81,66%	81,66%	82,00%	
												Tersedianya tata kelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Aplikasi	25 Fungsi	29 Fungsi	59 Fungsi	65 Fungsi	97 Fungsi	98 Fungsi	98 Fungsi	99 Fungsi
												Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Penyediaan akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
						Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang memenuhi standar data dan dapat diakses secara online							Perian	25,00%	64,00%	77,00%	64,00%	77,00%	77,00%	77,00%	92,00%	
								Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang valid	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				Perian	25,00%	64,00%	77,00%	64,00%	77,00%	77,00%	77,00%	92,00%	
										Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Sektoral Perangkat Daerah	Jumlah Elemen Data Sektoral Yang dilengkapi standar data dan metadata	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Elemen	3 jenis	4 jenis	5 jenis	800 Elemen Data	891 Elemen Data	1894 Elemen Data	1894 Elemen Data	1527 Elemen Data	
												Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengalahaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
													Tersedianya sistem informasi Satu Data	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
						Meningkatnya Keamanan TIK Perangkat Daerah	Persentase TIK didukung keamanan informasi yang memadai	Program Penyelenggaraan Persندان Untuk Pngamanan Informasi						Perian	18,00%	19,00%	23,00%	19,00%	23,00%	28,00%	33,00%	33,00%	
										Membahnya penerapan manajemen keamanan informasi	Jumlah area keamanan informasi yang tertangani	Penyelenggaraan Persندان Untuk Pngamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Area	6 Area	6 Area	6 Area	6 Area	6 Area	6 Area	6 Area	6 Area	
													Tersedianya kebijakan dan tata kelola keamanan informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah
						Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik							Predikat	Kurang Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju informatif	Menuju informatif	Menuju informatif	Menuju informatif	Menuju informatif	
								Meningkatnya kualitas tata kelola informasi dan komunikasi perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang cukup informatif dan komunikatif	Program Informasi dan Komunikasi Publik			Perian	5,00%	32,14%	53,57%	89,28%	92,85%	96,42%	96,42%	96,42%	96,42%	
										Meningkatnya kualitas media informasi publik perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terrib dalam pengelolaan website, e-ped, lapo dan media sosial	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		OPD	5 OPD	10 OPD	20 OPD	25 OPD	26 OPD	27 OPD	27 OPD	27 OPD	
												Optimalnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan media komunikasi publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
												Optimalnya layanan informasi publik pemerintah daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
												Optimalnya layanan aspirasi dan pengaduan publik	Jumlah dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen